



Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua



SERI MEMORIA PASSIONIS NO. 38

TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM

Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019

Theo van den Broek

SERI MEMORIA PASSIONIS NO. 38

TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM

Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019

Makna ilustrasi cover:

Martabat sangat berharga bagi manusia. Digambarkan siluet kepala manusia, untuk menggambarkan harga diri dan persamaan hak. Kedua tangan yang terhalang jeruji saat mengangkat kepala, menggambarkan perjuangan untuk mengangkat harga diri manusia yang menghadapi rintangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SERI MEMORIA PASSIONIS NO. 38

TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM

Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019



Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

**Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum
Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019**

Copyrights©2020, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan I, Mei 2020

Penerbit
SKPKC Fransiskan Papua
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura
Papua 99352

www.fransiskanpapua.org
Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis:
Theo van den Broek

Editor: Basilius Triharyanto

Layout: Anastasia Lintang

ISBN: 9-786027-446397

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

— iii

Bab 1

Insiden Surabaya-Malang: Noda Awal Rasisme Papua

— 1

Bab 2

Drama Politik dan Kemarahan Massa

— 13

Bab 3

Reaksi Setelah Demo Antirasisme

— 23

Bab 4

Kriminalisasi Veronica Koman

— 29

Bab 5

Meredam Gejolak: Dari Keamanan Hingga Lobi

— 37

Bab 6

Eksodus Mahasiswa dan Absennya Peran Pemerintah Sipil

— 47

Bab 7

Bara Rasisme di Wamena

— 53

Bab 8

Kerusuhan Wamena dan Pelantikan Jokowi

— 69

Bab 9

Ekses Politik Usai Kemelut Mereda

— 81

Bab 10

Tahanan Politik, Fobia 1 Desember, dan Politik Pemekaran

— 95

Bab 11

Operasi Militer dan Luka Damai Natal

— 111

Bab 12

Penutup

— 121

KATA PENGANTAR

Tahun 2019 setelah menerbitkan Buku Seri Memoria Passionis “Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018”, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) tahun ini kembali menerbitkan buku tentang pengakuan harkat dan martabat manusia Papua dalam kasus rasisme di Tahun 2019. Rentetan peristiwa seputar kasus rasisme terhadap kemanusiaan Papua yang cukup menyita perhatian publik di Tanah Papua maupun di luar Papua hingga tahun 2020 ini.

Bermula dari tindakan rasisme dan penghinaan terhadap kemanusiaan Papua, 15 Agustus 2019 lalu, kisah kelam tentang Papua kembali dihadirkan. Manusia dan kemanusiaan Papua menjadi sasaran para pihak yang berslogan ‘harga mati’ untuk keutuhan sebuah Negara. Pelbagai kisah kelam ini coba direkam dan dituliskan dengan lebih rinci oleh salah satu pemerhati persoalan Papua yang adalah sesepuh SKPKC Fransiskan Papua, Theo van den Broek.

Penulis, Theo van den Broek menarasikan situasi Papua, yang lebih didominasi kisah perjalanan di Provinsi Papua pada Agustus – Desember 2019. Kronologi rekaman setiap peristiwa yang disusun ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami apa yang sedang terjadi pada durasi lima bulan tersebut.

Penulis tidak saja memberikan fokus perhatian pada kasus perendahan martabat manusia (rasisme) tetapi juga pelbagai peristiwa yang muncul sebagai akibat dari kasus rasisme yang merendahkan martabat manusia Papua tersebut. Cerita-cerita tentang Papua sepanjang bulan Agustus – Desember 2019, dipilah dan dianalisa oleh penulis.

Tindakan rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya berujung pada aksi anti rasisme dan tuntutan keadilan yang terjadi serentak di Tanah

Papua dan juga di luar Papua. Aksi anti rasisme ini berakibat panjang pada manusia Papua dan para pihak yang bersolidaritas akan penderitaan orang Papua. Para pelaku tindakan rasisme mendapatkan hukuman yang sangat ringan (6-8 bulan penjara), tidak sebanding dengan akibat perbuatan rasis mereka yang menyebabkan manusia Papua baik orang asli Papua maupun pendatang (non Papua) yang ada di Papua harus mengalami duka yang bertubi-tubi. Banyak manusia Papua yang menolak tindakan rasisme ini berujung pada kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan kehilangan kebebasan fisik karena harus mendekam di penjara.

Tindakan rasisme terjadi di Malang dan Surabaya ini membawa dampak besar di Tanah Papua termasuk penurunan pasukan militer dalam jumlah yang sangat besar ke Papua. Sekitar 8000-an pasukan gabungan 'diutus' ke Tanah Papua sebagai jaminan untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Apakah masyarakat benar merasa aman? Apakah hukuman yang diterima oleh para pelaku tindakan rasisme sudah cukup untuk nilai keadilan?

Seri Memoria Passionis No. 38 dengan judul "Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum: Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019" membantu para pembaca untuk melihat lagi bagaimana perendahan martabat manusia Papua dan keadilan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Kiranya pandangan dan catatan kritis dari penulis dapat membuka wawasan lain dari para pembaca untuk mendalami situasi di Tanah Papua. Selamat membaca!

Jayapura, Mei 2020

Salam Hormat

Yuliana Langowuyo

Plt. Direktur SKPKC Fransiskan Papua

BAB I

INSIDEN SURABAYA-MALANG: NODA AWAL RASISME PAPUA

Menjelang perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 15 Agustus 2019, para mahasiswa menggelar aksi demo memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia. Aksi demo ini diinisiasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di beberapa kota: Jayapura, Ternate, Ambon, Sula (Maluku), Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Jakarta.

Dari aksi di berbagai kota itu, Surabaya dan Malang yang mendapatkan sorotan besar, karena adanya ujaran kebencian bernada rasis terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPPI), juga Front Pembela Islam (FPI).

Ujaran kebencian rasis menyebut ‘monyet’ pada mahasiswa Papua itu memicu gelombang protes dan unjuk rasa massa Papua di berbagai kota di Tanah Air.

Bagian ini mencatat dan menganalisa empat hari di bulan Agustus, sejak insiden di Surabaya pada 15 Agustus 2019 hingga 19 Agustus 2019.



Aksi demo menolak rasisme di Kota Jayapura, 19 Agustus 2019.
Foto: Dokumentasi SKPKC FP

LEBAH
 RUMAH KECIL - BERKUALITAS & BERKUALITAS

Ayo Manfaatkan Sekarang Juga...

KEDAS DUNDA PILAK KENDARAAN KEMOT'ION SPEK
 KEDAS DUNDA RER BALK NAMA KEMOT'ION 1000-1000
 KEDAS RER BALK NAMA KEMOT'ION 1000-1000
 PENTRANAN KEDAS 1000-1000

Pembayaran dapat dilakukan:

1. KEMOT'ION 1000-1000	2. KEMOT'ION 1000-1000	3. KEMOT'ION 1000-1000
4. KEMOT'ION 1000-1000	5. KEMOT'ION 1000-1000	6. KEMOT'ION 1000-1000
7. KEMOT'ION 1000-1000	8. KEMOT'ION 1000-1000	9. KEMOT'ION 1000-1000
10. KEMOT'ION 1000-1000	11. KEMOT'ION 1000-1000	12. KEMOT'ION 1000-1000

Informasi dan pemesanan hubungi: 0812-123456789



Rekaman Peristiwa

Kota Malang, Jawa Timur, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama dengan Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-PB) menggelar aksi demo turun jalan menolak *New York Agreement* atau Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Sekitar 70 orang mengambil bagian dalam demo itu, dan di tengah jalan mereka bertemu dengan kelompok atau ‘pendemo tandingan’ yang juga terdiri dari sekitar 70 orang. Pertemuan ini akhirnya berujung kekerasan verbal, termasuk pengungkapan bahwa orang Papua adalah ‘monyet’. Terjadi juga pelemparan batu dan saling kejar. Awalnya pihak kepolisian yang hadir membiarkannya, namun ketika terjadi bentrokan barulah kepolisian mulai melakukan intervensi. Sekitar 56 mahasiswa dibawa polisi ke markasnya untuk diinterogasi, lalu dilepaskan dan dipulangkan.

Pada 16 Agustus 2019 kegiatan yang sama dilakukan di Salatiga, tepatnya di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Kegiatan ini juga atas inisiatif AMP dan FRI-PB. Aksi ini dapat dijalankan tanpa adanya insiden. Selama aksi demo ini, peserta aksi juga memberikan perhatian terhadap operasi militer di wilayah Nduga, Provinsi Papua. Mereka menyerukan tuntutan agar segera menarik militer dari Nduga.

Hari yang sama, 16 Agustus 2019, terjadi peristiwa yang sangat tidak menyenangkan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Tersebar berita bahwa Mahasiswa Papua di asrama itu menurunkan bendera nasional Indonesia di depan asramanya dan membuangnya dalam got saluran air. Sampai saat ini tidak jelas sama sekali siapa sebenarnya melakukan itu dan menyebarkan beritanya.¹ Berita ini dipakai sebagai alasan oleh kelompok warga serta kelompok-kelompok ormas, seperti Front Pembela Islam dan Pemuda Pancasila untuk mengepung asrama Papua dan menunjukkan sikap agresifnya. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu nasional dan melontarkan kata-kata rasis terhadap orang Papua, dengan menyebut kata-kata ‘monyet’.

¹ Untuk diingat: tahun lalu, 2018, suatu massa – orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok radikal – memaksa mahasiswa di asrama yang sama untuk mengibarkan benderanya pada 17 Agustus. Baca juga siaran pers yang dikeluarkan oleh LBH dan KontraS Surabaya.

Kelompok organisasi masyarakat itu juga melakukan kekerasan verbal dan tindakan-tindakan agresif dengan menghalangi mahasiswa untuk keluar dari kompleks asrama dan melontarkan kata-kata kasar dan nada penghinaan. Ungkapan-ungkapan rasis dan hinaan itu seperti: *'Keluar! Keluar! Papua keluar!'*, *'Bunuh Papua! Bunuh Papua!'*. Pendeknya dalam kata pembela hukum dan HAM, Veronica Koman, *"orang di sekitar asrama meminta mahasiswa untuk keluar dari asrama supaya mereka dapat menyepakinya keluar dari kota dan membunuhnya"*.²

Dalam peristiwa itu, aparat kepolisian yang hadir di tempat tidak bertindak. Baru hari berikut, 17 Agustus 2019 – hari peringatan nasional Kemerdekaan Indonesia – polisi mulai beraksi, bukan untuk menindak para warga yang mengepung asrama itu, namun melawan para mahasiswa yang ada di asrama. Sambil melepaskan gas air mata, polisi memasuki asrama dan menuntut para mahasiswa untuk keluar. Sebanyak 43 orang mahasiswa selanjutnya diangkut naik truk dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi terkait persoalan tuduhan 'perusakan' dan 'pembuangan' bendera Merah Putih.

Kejadian di Malang dan Surabaya (juga ada insiden di Semarang) dengan cepat diketahui oleh orang-orang di Papua. Mereka mulai menanggapi melalui banyak diskusi dan meluapkan emosi dan kemarahan di media sosial. Beberapa daerah di Tanah Papua, tersebar undangan supaya siapa saja yang mencintai dan punya hati untuk orang Papua untuk melakukan aksi demo pada 19 Agustus 2019 untuk menyampaikan protes kepada pimpinan serta masyarakat di Papua dan di Indonesia.

Faktanya bahwa orang Papua dinilai sebagai 'sekumpulan monyet' memang sangat tidak dapat diterima orang asli Papua (OAP) maupun orang non-asli Papua. Penilaian ini dialami sebagai suatu penghinaan berat sekaligus suatu kontras yang ekstrem dengan sikap yang selalu ditunjukkan bangsa Papua dalam penerimaan ribuan orang dari luar Papua (migran) yang mau menetap dan mencari nafkahnya di Tanah Papua.

2 Informasi diperoleh dari mailing-list Joe Collins, 18 Agustus 2019.

Pengalaman bahwa mereka (OAP) digambarkan sebagai ‘monyet’ merupakan suatu pukulan yang sangat keras, sangat tidak dapat diterima dan merendahkan harga dirinya orang Papua.

Aksi demo turun jalan massal yang menyusul pada hari Senin, 19 Agustus, menunjukkan wajah yang berbeda-beda. Di Kota Manokwari, aksi demo menolak dan mengutuk rasisme berujung kerusuhan. Aksi kekerasan seperti memalang jalan-jalan, membakar fasilitas DPRD dan mengancam fasilitas sejumlah pedagang. Di Kota Sorong sejumlah fasilitas angkutan (motor, mobil) di bandara dibakar atau dirusak. Para petugas keamanan sangat sibuk untuk perlahan-lahan menguasai kembali suasananya. Sebaliknya demo di Kota Jayapura menunjukkan suatu wajah yang lain; pada umumnya demo ini dikoordinasi dengan baik – oleh mahasiswa bersama polisi – dan berjalan dengan penuh damai. Demo ini berupa suatu long-march oleh ribuan orang dari Waena, Abepura ke Jayapura (sekitar 16 kilometer), dan hanya mengakibatkan bahwa lalu-lintas mengalami kemacetan dan kegiatan di pinggir jalan dihentikan sementara waktu. Dari pengamatan langsung, masyarakat sudah siap untuk itu karena banyak jalan di sekitar Jayapura agak sepi. Para pendemo menuju gedung DPR Papua dan Kantor Gubernur Provinsi Papua. Para pendemo diterima dengan baik oleh Gubernur sendiri.

Sementara yang tidak mengambil bagian dalam demo bisa mengikuti segala perkembangan di TV nasional yang menyiarkan perkembangan demo-demo di Papua dan melengkapinya dengan informasi dan komentar. Banyak petinggi pemerintah dan pihak keamanan memberikan komentar. Dengan mengikuti sedikit siaran berkesinambungan itu menjadi jelas juga bagaimana pelbagai instansi mendekati dan menganalisa kejadian akhir-akhir ini.

Presiden Jokowi membatasi diri dalam komentarnya dan mengajak – dengan gaya agak paternalis – semua yang berkepentingan untuk ‘saling memaafkan’. Dia kurang memperlihatkan penilaiannya bahwa kejadian tersebut merupakan masalah penting yang sebenarnya patut ditanggapi dengan suatu sikap kepemimpinan yang lebih kokoh dari dirinya. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menunjukkan keprihatinannya dan meminta

suatu analisa yang tepat mengenai apa yang sebenarnya terjadi; apa latar belakangnya insiden-insiden di Surabaya dan Malang. Dia menuntut kejelasan, kebenaran dan keterbukaan semua.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian, memberikan kesan bahwa sepatutnya dia berperan sentral dalam menentukan kebijakan dalam hal ini. Tito meminta suatu penelitian tentang kejadian ini. Tito juga memberitahukan bahwa kejadian ini sebenarnya suatu 'perkara kecil' saja. Maka, dia meminta agar semua tenang dan bersama mencari suatu jalan keluar tanpa menimbulkan terlalu banyak emosi. Kelak dia memberitahu bahwa kejadiannya berlandaskan suatu 'berita hoax', dan dengan demikian dia memberikan kesan kuat bahwa sebenarnya tidak ada masalah; atau dengan kata lain: seolah tidak ada sikap nyata yang rasis dari sejumlah orang dan kelompok, dan seakan-akan tidak ada polisi yang cenderung menutup matanya hingga tidak bertindak terhadap sejumlah anggota kelompok yang menunjukkan suatu sikap yang tidak dapat diterima. Seolah-olah, peristiwa itu terjadi berdasarkan suatu 'salah paham' saja.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, juga meminta penelitian, sambil menekankan juga bahwa kita berhadapan dengan 'informasi palsu'. Dia menekan dan mengajak supaya kejadian ini tidak diberikan 'hidup panjang', dan dia memberikan peringatan pada para orang-orang atau kelompok-kelompok supaya tidak memanfaatkan insiden ini secara negatif. Dia juga mengungkapkan penghargaannya atas petinggi-petinggi pemerintah yang sudah meminta maaf secara publik pada masyarakat Papua.

Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan Walikota Surabaya, Ibu Risma, telah meminta maaf atas kejadian itu melalui pesan-pesan terbuka dan secara langsung kepada Gubernur Papua. Dengan demikian mereka juga menunjukkan bahwa kita tidak berhadapan dengan 'suatu perkara kecil', dan bahwa tindakan rasis menjadi perhatian semua orang. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka mendukung suatu kebijakan di mana ada tempat yang bermartabat buat orang Papua di wilayah pemerintahannya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mencatat supaya instansi-instansi keamanan di Indonesia perlu menyadari bahwa kenyataan diskriminasi,

represi, rasisme dan non-toleransi sangat menusuk hati masyarakat Papua dan akan menumbuhkan sikap nasionalisme setempat. Lukas Enembe mengucapkan apresiasi pada teman-teman pimpinan di Jawa Timur dan Surabaya yang sudah menawarkan ‘minta maaf’-nya. Namun sekaligus dia bertanya pada dirinya, mengingat istilah ‘saling memaafkan’ dia sebenarnya mesti minta maaf atas apa? Dia juga menyinggung faktanya bahwa selama bertahun-tahun Papua telah menerima ribuan migran dengan baik sekali sambil menjunjung tinggi ‘Bhineka Tunggal Ika’, dan dengan demikian dia merasa sangat tidak bisa menerima bahwa ‘bangsanya’, orang Papua, dinilai dan diberlakukan sebagai ‘binatang atau monyet’ di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Dia mengungkapkan juga harga dirinya orang Papua. Dia menyatakan siap untuk memanggil pulang para mahasiswa Papua yang sedang studi di luar di Indonesia. Akhirnya dia mengajak semua orang Papua, entah di Papua entah di tempat lain di Indonesia, untuk tidak berlaku demikian sampai harmoni antara kelompok-kelompok etnis terganggu, dengan kata lain, jangan kita meniru kelakuan yang terjadi di Surabaya dan Malang. Dia berharap juga bahwa semua non-Papua di Papua akan menolak segala bentuk rasisme, diskriminasi dan non-toleransi.

Catatan dan Uraian Sepintas

Pada umumnya, beberapa pejabat pemerintahan memberikan komentarnya pada aksi tolak rasisme di Tanah Papua yang terjadi pada 19 Agustus 2019. Ketika kita menyaksikan siaran TV nasional tentang pelbagai perkembangan di Tanah Papua, beberapa ahli atau pakar memberikan komentarnya, namun mereka sangat hati-hati dan cenderung mengikuti ‘gaya pendapat’ para wakil Negara yang resmi. Sangat sedikit diberikan kesempatan terhadap para saksi mata yang, kemungkinan besar, dapat memberikan keterangan yang membantu untuk memahami apa yang terjadi di pelbagai lokasi yang berbeda. Pendapat masih banyak ditandai ‘tebakan’ dan ‘pengandaian’. Para pejabat cenderung untuk sedapat mungkin melindungi instansi-instansi Negara yang resmi atau untuk

langsung membenarkan apa yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Yang menonjol juga bahwa lebih banyak perhatian diberikan oleh media tentang kekacauan di Manokwari (a.l. pembakaran gedung DPRD) dan Sorong (perusakan fasilitas di Bandara) daripada pada kegiatan protes serta long-march ribuan orang Papua di Kota Jayapura yang mengesankan karena terkoordinir dengan baik dan mampu menyampaikan pendapat dan perasaannya kepada pimpinan lokal, Gubernur Papua dengan penuh damai.

Perlahan-lahan istilah seperti 'saling memaafkan' dan 'berita palsu' (hoax) mendapat tempat sentral dalam berita media (TV). Tiba-tiba muncul di TV seorang yang mengakui diri sebagai 'Ketua Keluarga Besar Papua di Surabaya' dan menyatakan bahwa memang berita mengenai insiden yang tidak dapat diterima di Surabaya adalah berita palsu, 'hoax'. Perkembangan demikian dibulatkan dengan tindakan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk mulai jam 19.00, 19 Agustus 2019 memblokir akses internet di Jayapura dan beberapa kota lainnya. Kebijakan demikian sangat memprihatinkan karena ternyata oleh "Jakarta" dinilai cocok untuk Papua.

Terdengar adanya beberapa berita dukungan terhadap aksi protes rasisme dari Papua, suatu pernyataan kesetiakawanan dari Maluku, pernyataan kelompok di Yogya dan Kupang. Pendek kata, insiden di Surabaya-Malang perlahan-lahan mulai diakui sebagai suatu masalah yang tidak boleh diremehkan.

Kecenderungan untuk meremehkan masalahnya masih dominan dalam media resmi, dan dengan demikian tidak dapat menyelesaikan apapun. Syukurlah masih ada cukup banyak suara, termasuk Wakil Presiden, yang memberitahukan bahwa kita (Indonesia) dihadapkan suatu masalah yang substantial, yang menuntut suatu pendekatan yang serius, dan malahan dapat menuntut pula suatu kebijakan yang nyata dan jelas dari pihak pimpinan tertinggi di Indonesia.

Aksi turun jalan menolak rasisme pada 19 Agustus 2019, ternyata mendapat dukungan (keamanan) dari pihak kepolisian di Jayapura; boleh jadi bahwa mereka (polisi) menyaksikan terlalu banyak orang, dengan tingkat emosi yang tinggi, maka pastilah sulit untuk dibubarkan.

Karena mereka (polisi) tidak mau mengambil risiko besar. Mungkin juga bahwa dalam penilaian polisi insiden di Surabaya/Malang begitu kontras dengan suasana perayaan ‘hari kemerdekaan nasional’ hingga menilai reaksinya di Papua wajar saja.

Adanya kesadaran bahwa apa yang terjadi di Surabaya dan Malang yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan bahwa peristiwa itu mudah dapat dimanfaatkan dalam advokasi Papua di tingkat nasional maupun internasional. Maka, akan memperkuat kesatuan politik serta perjuangan nasionalis di Papua sendiri. Dan soal perizinan dan koordinasi oleh polisi saat aksi demo di Jayapura mungkin juga dipengaruhi oleh kesadaran bahwa dewasa ini Indonesia cukup ditekan oleh komunitas internasional, secara khusus oleh Regio Pasifik, karena informasi mengenai adanya pelanggaran HAM yang sangat serius.

Dalam analisa konflik perhatian pokok persoalan semakin berpindah ke arah ‘peranan berita palsu’. Tidak jelas kesimpulan itu adalah hasil suatu uraian fakta atau hanya dipilih sebagai ‘jalan keluar yang dapat disambut baik’ kalangan luas. Faktanya bahwa peremehan konflik serta kecenderungan untuk menghilangkan perhatian akan kelakuan yang tidak benar dari pihak keamanan, dapat berkembang dengan sangat mudah ke arah pembungkaman suara yang meminta suatu penelitian terbuka yang serius dan mendalam. Pergeseran ke ‘hoax’ sebagai ‘penjahat besar’ akan disambut baik dalam konteks semacam itu.

Pengungkapan dan pesebaran informasi bahwa semuanya dinilai sebagai akibat dari “salah paham” tidak membantu atau menjadi dasar kalau kita mau suatu penelitian yang sungguh-sungguh dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang sama berlaku dengan ajakan supaya kita ‘cepat tinggalkan’ masalah ini, karena sikap demikian bertolak belakang dengan sumbangan pikiran Wakil-Presiden yang menggarisbawahi bahwa insiden ini perlu diteliti secara mendalam dan didukung oleh keterbukaan semua pihak.

Memprihatinkan juga bahwa pergeseran ke arah ‘hoax’ sebagai ‘penjahat utama’ menjadi dasar Kemeninfo untuk langsung – sebelum suatu penelitian manapun – memblokir internet di Papua. Kenapa? Dan

kenapa hanya dilakukan di Papua? Apakah dengan tindakan ini kita menghadapi suatu ‘uji coba’ pertama dari kementerian yang nanti akan memakai tindakan ‘menutupi komunikasi secara lokal’ sebagai tindakan rutin kapan saja ada suatu masalah? Pendek kata, tindakan dari Kemeninfo menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan menjadi sebuah keprihatinan di dalam konteks demokrasi sejati.

Dengan menggeser sebab utama ke arah ‘hoax’ serta cerita-cerita yang tidak jelas mengenai perjuangan kemerdekaan Papua, dengan sendirinya segala perhatian dipindahkan atau dihilangkan dari peranan inti suatu kumpulan ‘kelompok dan organisasi radikal’ di Surabaya dan Malang, yang menunjukkan suatu kelakuan serta tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Ternyata kelakuan mereka dibiarkan oleh pihak keamanan atau malahan kelakuan itu diadakan dalam hubungan kerjasama dengan pihak keamanan. Apakah kita masih dapat berharap bahwa fokus persoalannya akan kembali ke masalah sebenarnya: aksi kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat dan sikap pihak yang berwajib terhadap peranan kelompok demikian.

Insiden di Surabaya pastilah juga membangkitkan banyak warga di Indonesia yang kritis dan menjunjung tinggi nilai sosial. Mungkin dengan adanya peristiwa ini masyarakat luas sekarang dapat memahami bahwa di Papua terdapat suatu masalah lebih serius daripada “cerita mengenai sekelompok pengganggu separatis”. Dengan demikian, suatu diskusi lebih mendalam akan berkembang dan membantu kita semua untuk menciptakan ruang bagi kehidupan bersama, di mana keanekaragaman disyukuri dan perbedaan diakui sebagai kekayaan bersama dan saling menghargainya.

Jayapura, 21 Agustus 2019

BAB 2

DRAMA POLITIK DAN KEMARAHAN MASSA

Sesudah insiden rasis di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, aksi massa menggelar protes muncul di banyak tempat di Tanah Papua.

Aksi demo turun ke jalan memprotes insiden rasisme pada orang Papua berjalan tak sepenuhnya damai, sejumlah aksi diwarnai kericuhan, represif, dan kacau karena pembubaran paksa oleh aparat keamanan dan memicu perlawanan massa dan situasi berubah menjadi anarkis.

Bagian ini mencatat peristiwa protes dan 'drama' elit politik untuk meredam gejolak sesudah insiden rasis, yang hampir berjalan sekitar sepuluh hari, sejak pertengahan hingga akhir Agustus 2019. Upaya 'rekonsiliasi' dilakukan oleh elite pimpinan daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur yang menemui Gubernur Papua, namun cara ini tak sepenuhnya berhasil.

Upaya lain untuk mendinginkan situasi, Pemerintah memblokir internet di Tanah Papua, karena dinilai banyak berita hoaks yang beredar, yang dianggap turut memperluas konflik dan kericuhan. Pemblokiran ini memperlambat ruang gerak informasi, namun, sekali lagi, tak bisa meredam sepenuhnya kekacauan.



Massa aksi menolak rasisme duduk di halaman Kantor
Gubernur Papua, Jayapura, 19 Agustus 2019.
Foto: Dokumentasi SKPKC FP



Rekaman Peristiwa

Selama 10 hari terakhir ini, sejak insiden di Surabaya-Malang, hingga akhir Agustus 2019, terjadi aksi demo turun ke jalan di pelbagai daerah di Tanah Papua yang menolak dan mengutuk tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua. Aksi demo tersebut melibatkan massa yang jumlahnya cukup banyak, dan tak berlangsung dengan damai, melainkan disertai dengan tindakan kekerasan.

Aksi demo pada 21 Agustus 2019 di wilayah FakFak berlangsung ricuh. Demonstran nyaris terlibat bentrok dan terlibat aksi kekerasan dengan etnis non-Papua. Sempat terjadi kericuhan yang berdampak Gedung Dewan Adat dibakar oleh 'gerakan pro-Indonesia'. Kota FakFak saat itu berada di ambang bentrokan dan kekerasan antar etnis (*konflik horizontal*).

Di kota Timika, aksi demo digelar pada 22 Agustus 2019, yang dibubarkan paksa melalui kekerasan oleh pihak keamanan. Sekitar 37 orang ditangkap dan bermalam di markas kepolisian setempat. 10 di antara mereka dinyatakan tersangka dan ditahan.

Lalu daerah Mabilabol, Pegunungan Bintang, pada 26 Agustus 2019 ribuan warga menolak segala aksi rasis dan menuntut supaya para pelaku di Jawa Timur ditangkap. Massa ini juga menyerukan agar semua mahasiswa Papua pulang kampung. Mereka juga mengkritik habis-habisan segala 'kebijakan NKRI'.

Pada 28 Agustus 2019 di kota Deiyai masyarakat menggelar aksi demo dengan izin Bupati. Secara tradisional banyak warga yang datang membawa panah dan busur dan melakukan tarian tradisional *waitai* – suatu tarian yang sering dipertunjukkan secara khusus sewaktu masyarakat marah. Aksi turun jalan ini berujung pada penembakan yang sangat brutal. Akibatnya, sejumlah orang tewas; disebutkan tiga orang: dua sipil dan satu tentara, dan banyak yang terluka. Belum jelas apa dan siapa pemicu munculnya kekerasan: peserta demonstran, atau pihak keamanan, atau seorang yang disusupi dalam massa untuk membuat kacau. Sesudah kekacauan tersebut, pada 29 Agustus 2019 tiga unit militer dikirim ke Deiyai.

Setelah daerah Deiyai berkecamuk, barangkali masih ada aksi demo di

tempat lain, namun kurang diketahui karena komunikasi melalui internet ditutup di semua tempat di Papua. Sementara, terpantau aksi demo di luar Papua tetap dilakukan, seperti demo di depan Istana Presiden di Jakarta. Aksi demo itu menyerukan dukungan kepada mahasiswa Papua dan juga menyampaikan pesan, *“berikan kami referendum, karena itulah satu-satunya solusi dan jalan keluar yang bermartabat”*.

Sejalan dengan aksi turun jalan menolak rasisme, Negara mengirimkan pasukan gabungan Polri dan TNI ke Papua. Terpantau jumlah pasukan yang dikirim hingga pada 26 Agustus sekitar 1.200 personil, namun jumlah tersebut kemungkinan besar bertambah lebih banyak lagi. Kota Manokwari dan Sorong adalah daerah yang pertama untuk menerima tambahan personel keamanan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memilih untuk mengambil suatu pendekatan ‘pengamanan’, dan masih sangat sedikit ruangnya bagi pemahaman dan dialog. Semakin luas ruang represif dan agresi tambahan, itulah kesan umum yang diperoleh. Situasi di Manokwari, Sorong dan Timika sudah dinyatakan “aman dan kondusif” oleh pihak keamanan pada 26 Agustus 2019.

Sementara itu terdengar pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengubah sedikit sikapnya dengan mengurangi ungkapan mengenai ‘saling memaafkan’ dan menekankan perlunya suatu penelitian dan pengadilan terhadap para pelaku tindakan rasis. Di samping itu Jokowi juga mengumumkan bahwa kunjungan yang telah direncanakannya minggu ini akhirnya dibatalkan. Sebagai alternatif Jokowi mengundang sejumlah warga Papua datang ke Jakarta untuk berunding mengenai ‘peningkatan kesejahteraan’ di Papua. Faktanya bahwa Presiden dengan begitu eksplisit menyebutkan topik pembahasan pada pertemuan itu menunjukkan bahwa Presiden masih tetap berpendapat bahwa solusi di Papua letaknya pada peningkatan ekonomi dan tidak akan ada ruang untuk suatu “diskusi politik”. Maka, tidak mengherankan bahwa Dewan Adat Papua menolak undangan Presiden.

Selain ungkapan sikap dari petinggi negara, ada sejumlah ‘pertemuan tertutup’ (dialog tertutup) yang diadakan; pertemuan-pertemuan itu antara lain diselenggarakan oleh Kapolri bersama Panglima TNI.

Mereka menghadirkan sejumlah pejabat polisi dan tentara setempat bersama sejumlah tokoh masyarakat yang diseleksi dan diundang. Sejauh diketahui pertemuan seperti itu diadakan di Sorong pada 23 Agustus 2019, di Biak pada 27 Agustus 2019, dan Timika dilakukan pada 28 Agustus 2019.

Di samping bagian seremonial, para peserta dalam pertemuan-pertemuan itu diseleksi ketat dan kebutuhan para petinggi keamanan untuk menjelaskan kebijakannya. Unsur ‘dialog’ dapat dipertanyakan. Di Sorong pertemuan tertutup sempat dikritik secara nyata. Sejumlah aktivis mengundang masyarakat agar dapat menjelaskan (kepada para petinggi pusat) apa sebenarnya aspirasi ‘bangsa monyet’, orang Papua ini.

Secara umum pendekatan operasional pengamanan yang sangat dominan di Papua dinilai kontras dengan “gaya non-aksi” pihak polisi untuk menangkap para pelaku pemicu konflik rasis di Malang, Surabaya dan Semarang. Para pelaku kejahatan di Jawa Timur sementara waktu tidak dikejar dan seluruh perhatian diarahkan ke Papua, seakan-akan para pemicu konflik ada di Papua. Gejala ini sangat aneh karena ada pergeseran perhatian.

Pada 27 Agustus 2019, akhirnya ada berita bahwa atasan tentara telah menonaktifkan lima anggota TNI karena keterlibatan mereka dalam aksi rasis di Jawa Timur. Dinonaktifkan untuk berapa lama tidak dijelaskan; juga tidak jelas apa isinya ‘dininaktifkan’. Kelak masih ada berita bahwa dua pelaku lainnya juga ditangkap, dan esok harinya dicatat bahwa salah satu sudah dinyatakan tersangka sebagai pelaku aksi rasis. Pada saat yang sama di Timika sedang disiapkan proses hukum mengadili 10 orang Papua yang dinyatakan tersangka terkait aksi demo beberapa hari sebelumnya.

Pertemuan-pertemuan tertutup juga diselenggarakan di luar Papua. Di Jakarta, Gubernur Papua bertemu dengan Presiden. Tidak diketahui banyak mengenai isi pertemuan itu. Lebih menonjol adalah kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 27 Agustus 2019. Sama saatnya sejumlah pendeta memberikan predikat “Mama Papua” kepada Gubernur Jawa Timur, suatu tindakan yang kurang dihargai oleh banyak orang Papua. Pertemuan di Jawa Timur disiarkan oleh TV nasional dan mencerminkan suatu suasana

penuh damai dan keramahan. Memang semuanya sangat seremonial sifatnya, dan sudah tentu tidak akan mengakhiri masalahnya.

Selama kunjungan itu terdapat juga saat yang sangat menyakiti hati Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal itu terjadi ketika Lukas ingin mengunjungi mahasiswa yang berdomisili di asrama yang menjadi tempat kejadian aksi rasis pada 16-17 Agustus 2019. Para mahasiswa, sekitar 40 orang, menolak membuka pintu buat Gubernur beserta rombongannya, dan menyatakan dengan jelas bahwa mereka minta Gubernur untuk membuka dulu 'garuda'-nya (lambang nasionalis para pejabat pemerintah) dari pakaiannya kalau dia mau diterima.

Penolakan terhadap Gubernur serta rombongannya memang cukup mengagetkan dan sekaligus penuh arti (signifikan). Dalam tindakan para mahasiswa tercermin suatu 'strategi baru' dalam protes orang Papua. Kesannya, ruang untuk bicara mau dibatasi dan tekanan lebih besar diberikan pada tuntutan referendum saja, dan para mahasiswa sudah kehilangan kepercayaan dalam segala bentuk penyelesaian lainnya. Suatu radikalisasi, kesan kami, yang tidak terbatas pada kalangan mahasiswa di Surabaya saja, namun kemungkinan besar akan mewarnai setiap aksi protes di manapun juga.

Suatu 'gaya baru' juga diperlihatkan oleh aksi demo massa pada 29 Agustus 2019 di Waena-Abepura-Jayapura. Demo dengan long march tertanggal 19 Agustus 2019 masih berjalan dengan penuh damai dan terkoordinir. Sementara itu aksi demo yang juga dengan long march pada 29 Agustus 2019 ditandai perusakan, termasuk membakar gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Raja, Jayapura. Lalu pelemparan batu oleh peserta aksi demo pada sejumlah gedung, termasuk toko-toko yang dilewati. Secara khusus di sekitar Entrop, Jayapura terjadi perusakan besar-besaran: sejumlah fasilitas umum serta kios-kios dibakar hancur; juga di Kota Jayapura sejumlah gedung mengalami nasib yang sama.

Tujuan akhirnya adalah Kantor Gubernur di mana bendera Papua, Bintang Kejora, dikibarkan. Semalam kantor Gubernur diduduki para demonstran, sekitar 2.000 orang, sedang esok harinya sekitar jam sepuluh pagi sisanya masih sekitar 500 orang, yang kemudian diangkut dengan

kendaraan TNI untuk diantar pulang ke rumahnya. Bantuan kendaraan militer ini bagian dari perlindungan militer yang dibutuhkan karena sementara waktu ada kelompok etnis tertentu lainnya (lazimnya disebut Kelompok Nusantara) yang berjaga di beberapa lokasi untuk menyerang balik 'semua orang gunung' itu.

Sementara waktu seluruh Jayapura diduduki pihak keamanan bersenjata lengkap dan komunikasi internet diputuskan atau ditutup. Setelah akses internet diputus, sejak jam empat sore waktu Papua, saluran telepon dan SMS diblokir. Lalu setelah jam lima sore, Kota Jayapura menjadi gelap karena pemadaman listrik oleh PLN. Pada pagi hari, 30 Agustus 2019, telepon serta SMS dapat diakses lagi, sedangkan internet tetap diblokir.

Kerugian materiil memang sangat kelihatan dan besar, dan perlahan-lahan juga tersebar berita mengenai aspek lainnya, yakni bahayanya terjadi konflik antar etnis. Selama aksi demo 29 Agustus 2019 banyak pedagang yang berasal dari, antara lain, Makasar dan Bugis mengalami kehilangan fasilitas dan barang dagangannya. Maka, mereka menuntut balasan. Pada sore hari itu seorang pelajar SMU telah menjadi korban, ditusuk sampai mati. Pada 30 Agustus 2019 mereka lebih mengorganisir diri dan mencari "orang Papua dari pegunungan". Beberapa berita menyatakan bahwa sudah ada korban. Sulit untuk diverifikasi, namun ada seruan bagi para warga sebaiknya tinggal di rumah. Jayapura menjadi 'wilayah yang diduduki' baik karena kehadiran sekian banyak personel keamanan yang bersenjata lengkap, maupun karena terancam oleh kekerasan antar etnis.

Sebaiknya juga dicatat bahwa aksi turun jalan pada 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura sebenarnya berjalan dengan sangat terkoordinir dan penuh damai, sampai suatu ketika kekerasan dan pembakaran mengacaukan aksi demo ini. Dimulai atau diajak oleh siapa? Itulah pertanyaan besar yang belum terjawab. Perlu dicatat juga bahwa demo pada 29 Agustus 2019, ternyata polisi memutuskan untuk tidak turut mendampingi atau melakukan pengamanan kepada para demonstran. Pihak kepolisian membiarkan saja aksi demo yang berjalan semakin kacau dan anarkis.

Mengapa aksi demo di Jayapura pada 29 Agustus tidak dikawal atau tidak turut didampingi oleh polisi seperti aksi demo pada 19 Agustus

2019? Di mana mereka semua saat itu? Pertanyaan ini semakin mendesak ketika kami memantau lokasi-lokasi di mana kerusakan dilakukan secara besar-besaran (pembakaran, penghancuran gedung). Beberapa lokasi itu sangat berdekatan dengan suatu kompleks pengamanan, seperti kompleks Angkatan Laut di Hamadi, atau kompleks militer di pelabuhan Jayapura. Apakah tidak ada yang dapat dikerahkan untuk menghindari perusakan-perusakan yang sudah diketahui akan terjadi? Mengapa tidak ada polisi yang dikerahkan -kalau perlu dibantu oleh tentara- ketika sudah diketahui bahwa gedung MRP di Kota Raja dibakar dan perusakan oleh massa di bagian Entrop, sedangkan para pendemo masih dalam perjalanan panjang, sekitar 10 kilometer, menuju kantor Gubernur di Jayapura? Pertanyaan ini belum terjawab!

Catatan dan Uraian Sepintas

Ternyata pimpinan Negara, melalui instansi-instansi keamanannya, memilih suatu pendekatan keamanan yang sangat nyata di Papua, sedangkan para pelaku aksi rasis di Jawa Timur dibiarkan tenang saja. Sikap itu turut meningkatkan animositas di Papua sekaligus menguatkan persatuan di antara orang asli Papua untuk mengangkat suaranya dan mempertajam tuntutan mereka, yakni referendum sebagai satu-satunya solusi yang bermartabat.

Aksi oleh Kemeninfo yang memblokir internet – terlepas dari fakta bahwa ini merupakan suatu pelanggaran hak pribadi orang – juga turut memanaskan situasi di Papua. Pemblokiran menghilangkan salah satu sarana untuk melampiaskan kemarahan, frustrasi dan protes, maka perlu dicari jalan keluar lainnya.

Menurut kami, pengangkatan 'hoaks' sebagai salah satu faktor utama di belakang protes saat ini merupakan suatu strategi untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Inti protes sekarang tidak lain daripada protes yang sudah bertahun-tahun terdengar dan hanya diperkuat karena terjadi aksi rasis yang begitu nyata di Jawa Timur. Seluruh kerepotan seputar 'hoaks' merupakan suatu cara untuk membelokkan perhatian demi

perlindungan pihak-pihak kepentingan tertentu. Dan, kemungkinan besar, untuk menghindari informasi sebenarnya yang keluar dari Papua dan sampai pada forum internasional, mengingat, misalkan, Sidang Umum PBB pada awal September 2019.

Hal lain yang sangat dominan adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 31 Agustus. Kapolri Tito tidak terlalu menekankan bahaya 'hoaks' sebagai alasan untuk memblokir internet, namun sebagai kemungkinan menjaga pihak yang melakukan 'provokasi'. Argumentasi Kapolri ini menurut kami tidak terlalu tepat karena provokasi yang dilakukan oleh 'pihak yang tidak dikenal' yang mengakibatkan aksi anarkis selama demo pada 29 Agustus 2019 ternyata tidak membutuhkan internet.

Selama rentan waktu sesudah aksi demo pada 29 Agustus 2019 itu, warga berulang kali mendapat pesan bahwa ada bahaya besar akan ada ketegangan menuju konflik horizontal antar etnis dan mungkin antar agama. Pada 30 Agustus 2019 kenyataan demikian sangat terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok dengan secara terbuka mengancam kelompok etnis tertentu dan tidak malu bertindak tanpa ampun, sampai orang mati di tangannya. Kalau gejala ini tidak dikendalikan dengan cepat dan efektif, kehidupan dan masa depan banyak orang menjadi hancur atau gelap. Sudah tentu bahwa mulai hari ini hanya perlu pemicu kecil untuk meledakan kebencian yang tersimpan hingga terjadi konflik horizontal.

Jayapura, 31 Agustus 2019

BAB 3

REAKSI SETELAH DEMO ANTIRASISME

Pekan pertama September 2019 di Tanah Papua seakan dalam kabut kelam, sesudah minggu-minggu akhir Agustus 2019 rakyat Papua turun ke jalan melakukan aksi protes menolak rasisme yang dialami mahasiswa Papua. Aksi protes di berbagai kota di Tanah Papua, juga di luar Papua, berujung kericuhan dan anarkis.

Tanah Papua semakin mencekam saat situasi berbalik arah, dimana orang Papua – terutama orang Papua dari Pegunungan – menjadi sasaran dari kelompok migran yang menamakan dirinya “Kelompok Nusantara”.

Kelompok ini turun ke jalan dengan melakukan aksi intimidatif dan kekerasan kepada orang Papua dari Pegunungan.

Kemudian banyak personil tentara dan polisi terus memenuhi kota-kota di Tanah Papua. Di Jayapura, misalnya, para personil tentara dan polisi berjaga-jaga di jalan-jalan lengkap dengan senjata. Kondisi ini membuat orang Papua tak nyaman dan trauma.

Keberadaan aparat keamanan itu rupanya tak semata menciptakan kondisi aman, namun bagian mengamankan dan menangkap demonstran dan para aktor penggerak, yang merupakan para aktivis Papua.



Spanduk aksi menolak rasisme di Jayapura, 19 Agustus 2019.

Foto: Dokumentasi SKPKC FP

Rekaman Peristiwa

Pada 1 September 2019, serangan diadakan oleh “kelompok Nusantara” dengan sasaran “orang Papua dari Pegunungan”. Pagi hari, jam dua waktu Papua, insiden ini terjadi di Kamp Kei (Abepura) dan di Asrama Mahasiswa Nayak I (Balim). Ada satu orang mati dan puluhan terluka.

Beberapa jam sebelum serangan itu terjadi, mahasiswa Balim telah menghubungi dan menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa akan terjadi serangan. Polisi berjanji untuk menjaga di beberapa lokasi yang strategis. Ketika serangan terjadi tidak ada anggota polisi sama sekali. Kemudian setelah beberapa jam, pasca serangan tersebut barulah kepolisian hadir di tempat kejadian. Tidak mengherankan, langkah-langkah pihak kepolisian dipertanyakan dalam peristiwa ini.

Ketika aksi demo dilakukan oleh ‘Kelompok Nusantara’ pada 2 September 2019, sekitar 300 partisipan Kelompok Nusantara diangkut oleh tentara dan dibawa ke markasnya untuk diberikan pengarahan.

Isi pengarahan itu mereka perlu menghentikan aksi demo dan harus bekerjasama baik untuk membangun suatu harmoni etnis di Papua. Setelah diberikan nasihat demikian, mereka semua diperbolehkan pulang ke rumah.

Selanjutnya pemberitaan muncul bahwa Kapolri dan Panglima akan datang ke Papua pada 3 September 2019. Kedua petinggi alat Negara ini (TNI dan Kepolisian) akan berkantor di Jayapura, Papua selama seminggu, atau lebih lama. Di kesempatan yang sama, Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat yang isinya melarang dan menutup ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan aksi demo dan aktivitas berkumpul. Teks resmi maklumat itu diumumkan pada 2 September 2019, sementara itu beberapa rencana aksi demo telah dirancang dan dilakukan pada 3 September 2019 di Manokwari dan Jayapura. Aksi demo atau aksi turun ke jalan itu dalam rangka melawan dan menolak rasisme. Aksi long march di Manokwari dihalangi oleh pasukan Brimob yang jumlahnya cukup besar dan membawa senjata lengkap. Situasi aksi demonstrasi di Manokwari itu disaksikan dengan jelas oleh publik karena disiarkan oleh televisi nasional pada siang hari.

Yang mulai minta perhatian adalah berita selama hari-hari terakhir ini bahwa ‘unsur luar negeri’ terlibat dalam kerusuhan di Papua. Ternyata empat wisatawan Australia dideportasi keluar dari Sorong karena menghadiri salah satu aksi demo di Sorong. Media nasional (termasuk TV) menyajikan pernyataan-pernyataan dari elit pemerintahan, seperti Menkopolkam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Sekretariat Presiden Moeldoko, mengenai indikasi-indikasi kuat keterlibatan unsur-unsur luar negeri – bahasa lain “ada suatu konspirasi” – dalam protes-protes di Papua. Mereka juga menyebutkan peranan NGO-NGO asing dengan jaringan kerjanya di Papua, namun nama NGO-NGO itu tidak disebutkan.

Orang atau pihak yang mereka sebut dengan jelas adalah Benny Wenda – pejuang Papua yang bersuaka politik di Inggris, yang dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa dia memberikan saran kepada teman-teman di Papua untuk tidak mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2019. Sekaligus Benny menekankan bahwa

dia tidak ada urusan apapun dengan aksi protes melawan aksi rasis di Jawa Timur. “Menegenai hal itu masyarakat Papua sendiri memberikan suatu reaksi spontan saja”, kata Benny Wenda.

Dalam suatu wawancara dengan *‘Indonesian Lawyers Club’*, yang disiarkan oleh TV One pada 3 September 2019, Wiranto sekali lagi menggarisbawahi bahwa insiden di Surabaya sebenarnya ‘suatu perkara kecil saja’ namun dimanfaatkan oleh unsur-unsur asing sebagai momentum untuk membangkitkan secara khusus perlawanan atau separatisme di Papua.

Akhirnya pengumuman mengenai ‘campur tangan dari luar negeri’ juga dilengkapi dengan pernyataan bahwa pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan supaya Papua tertutup untuk orang asing; tidak akan ada akses, dan ini ‘sementara waktu’ sampai keadaan kembali normal dan tenang. Pernyataan ini disampaikan oleh Wiranto.

Patut dicatat juga bahwa sejumlah penangkapan tidak diadakan saja di kedua provinsi di Papua (Papua 48 orang, Papua Barat 20 orang), tetapi juga di Jawa, yakni sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam protes di Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah memprotes penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada asrama-asrama mahasiswa Papua. Protes oleh LBH ini dijawab dengan ancaman dari kelompok ‘haluan kanan’ (kelompok Merah Putih dan Kompak) yang melakukan aksi demo di depan Kantor LBH Jakarta.

Di Tanah Papua sekitar 48 tahanan ada kaitan dengan insiden berdarah di Deiyai, 28 Agustus 2019. Sampai saat ini diberitakan bahwa ada tiga orang mati (2 sipil, 1 tentara), namun berdasarkan suatu laporan oleh Keuskupan Timika, ternyata jumlah orang tewas jauh lebih tinggi, yaitu ada 8 orang sipil mati.³ Tidak jelas berapa banyak diantara 48 orang yang ditahan adalah anggota pihak keamanan.

Intensitas aksi protes antirasisme masih tinggi dan dilakukan sejumlah tempat di Tanah Papua. Lagi-lagi, pemerintah melakukan pemblokiran dan penutupan koneksi internet. Di Jayapura, akses internet sangat

3 Lihat laporan dari International Coalition for Papua (ICP).

terbatas. Pada 3 September 2019 di Sorong masyarakat Papua melakukan aksi demo terkait pemblokiran internet, khususnya ditujukan kepada Telkom. Sementara itu, aksi demo serupa telah dilakukan di Jayapura pada 29 Agustus 2019, yang berujung pada pembakaran Gedung Telkom di Jayapura. Sesudah protes-protes terkait pemblokiran internet, pihak keamanan telah memberitahukan bahwa internet akan dibuka kembali secara ‘bertahap’. Beberapa hari kemudian, muncul berita bahwa akses internet akan kembali dibuka pada 5 September 2019.

Media nasional cukup aktif melaporkan perkembangan di Papua dan menyelenggarakan sejumlah diskusi di TV guna menjelaskan permasalahan di Papua. Namun, diskusi itu memberi kesan ada seleksi terhadap para peserta diskusi, yang umumnya bersuara dan berpendapat mendukung pesan-pesan dari pemerintah pusat. Namun, ada suara pengecualian, yang cukup menyegarkan seperti pada diskusi dalam acara *Indonesia Lawyers Club* pada 3 September 2019. Namun, secara keseluruhan, suara-suara dan opini yang disiarkan televisi masih sangat dominan dari suara para petinggi pihak keamanan.

Catatan dan Uraian Sepintas

Keputusan Kapolri bersama Panglima untuk ‘berkantor’ di Jayapura, Provinsi Papua memang mengagetkan karena tidak pernah terjadi demikian. Mengapa mereka mengambil langkah ini? Sulit untuk ditafsir. Mungkin ada gabungan sejumlah unsur pertimbangan seperti: [a] penambahan jumlah personel keamanan yang begitu besar (sekitar 6.000 orang) guna mengendalikan situasi di Tanah Papua; [b] maklumat polisi yang baru yang tidak memberikan ruang untuk protes; [c] kebutuhan untuk menyampaikan ‘pesan kepada dunia luar atau internasional’ bahwa di Papua keadaan sudah normal dan bahwa tidak terjadi hal-hal yang kurang tepat (sekurang-kurangnya menghindari berita keluar mengenai keadaan demikian); [d] peranan yang sangat lemah dari pemerintah sipil serta instansinya di Tanah Papua; bandingkan komentar-komentar awal di TV yang bisa dicatat bahwa pemerintah setempat serta sejumlah tokoh

masyarakat yang penting tidak berperan secara berarti, dan bahwa terdapat suatu kesenjangan besar antara orang Papua ‘biasa’ dan orang Papua ‘elit’⁴; [e] penambahan jumlah tersangka yang dikaitkan dengan aksi anarkis di Manokwari (20 orang ditahan), Jayapura (20 orang) dan Timika (10 orang); dan [f] ancaman terjadi konflik horizontal antar kelompok etnis.

Apakah semuanya ini merupakan tanda bahwa kita perlahan-lahan sudah memasuki status DOM (Daerah Operasi Militer) tanpa nama itu dipakai secara eksplisit? Sudah tentu pesan dari pihak yang berkepentingan (polisi dan tentara) berbunyi lain: mereka ingin menciptakan ketenangan, keteraturan dan rekonsiliasi; namun kalau itu benar, kenapa pada 4 September dilakukan pendropan pasukan dengan parasut terjun payung (parachutis)? Aksi pasukan yang diterjunkan dari udara itu cukup jelas disaksikan oleh penduduk di sekitar Sentani, Jayapura dan Wamena.

Segala pemberitaan yang mengatakan bahwa ‘campur tangan luar negeri’ terkesan dibuat-buat; apalagi data-data yang jelas tidak diberikan untuk mendukung pengandaian ‘campur tangan’ itu. Orang seperti Benny Wenda sudah lama aktif, maka tidak menjadi berita baru. Empat orang Australia yang dideportasi dari Sorong memberikan kesan di TV bahwa memang mereka wisatawan biasa saja dan hanya kebetulan saja menjadi saksi mata kejadian-kejadian yang tidak bagus di Sorong. Mengingat juga bahwa akhirnya Papua dinyatakan tertutup bagi orang asing, boleh jadi memberikan kesan kuat bahwa yang mau dicapai adalah supaya sementara waktu tidak akan ada ‘mata-mata’ di Papua.

Terkesan gejala rasisme di Indonesia, digeser ke belakang, dan sejumlah langkah konstruktif untuk mengendalikan gejala rasisme ini tetap tertunda.

Jayapura, 4 September 2019

4 TV One, 3 September 2019.

BAB 4

KRIMINALISASI

VERONICA KOMAN

Kemenkopolhukam Wiranto yang menjadi perwakilan Pemerintah untuk berbicara soal Papua di berbagai acara berulang kali menekankan perlunya pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua. Bahkan Wiranto menyatakan situasi ketegangan Papua yang terjadi belakangan ini muncul adanya 'konspirasi politik' dengan pihak asing.

Di tengah dominannya pendekatan keamanan yang dipakai pemerintah di Jakarta, muncul desakan agar menempuh jalan dialog dalam penyelesaian masalah Papua. Bahkan, pemerintah didesak untuk berdialog secara terbuka dengan organisasi di Papua yang berseberangan dengan pemerintah. Tetapi, pemerintah masih menutup diri dengan pendekatan non-keamanan itu.

Dalam hiruk-pikuk kasus rasisme, kabar tak diduga muncul dari kepolisian di Jawa Timur. Veronica Koman, Pengacara Hak Asasi Manusia yang mendampingi para aktivis Papua ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan provokasi melalui cuitan di Twitter.



Sejumlah peserta dari massa aksi menolak rasisme di Deiayi ditahan di dalam penjara.

Foto: KOMASI Papua

Rekaman Peristiwa

Kabar mengejutkan terdengar pada 4 September 2019. Veronica Koman, seorang Pengacara (Lawyer) yang membela kasus-kasus aktivis Papua dinyatakan tersangka oleh kepolisian daerah di Jawa Timur. Veronica dinilai telah menghasut orang untuk berontak. Veronica Koman adalah seorang pengacara HAM yang sangat dihormati karena dia bersedia untuk membela orang Papua yang berurusan dengan pengadilan, dan dia lazimnya juga aktif untuk menyiapkan informasi yang terdokumentasi baik mengenai pelanggaran HAM di Papua.

Berita yang dia muat di media sosial mengenai insiden di Surabaya dinilai oleh polisi di Jawa Timur sebagai 'berita palsu' hingga dituduh berbuat provokasi, mendorong adanya kerusuhan secara luas di provinsi

Papua dan Papua Barat [...*the lawyer provoked and inflamed anti-racist riots that have swept across West Papua in the recent weeks*].⁵

Ternyata Veronica sekarang berada di luar negeri maka polisi mencari hubungan kerjasama dengan Interpol (polisi internasional). Veronica adalah orang yang kedua yang ditetapkan sebagai tersangka. Pihak lain yang ditetapkan tersangka adalah Tri Susanti. Dia disangka melakukan aksi rasis di Surabaya, maka, akhirnya polisi menilainya sebagai ‘provokator aksi rasis’. Untuk kasus Veronica, LBH Surabaya menawarkan untuk menangani pembelaan terhadap Veronica.

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menanggapi soal ketersangkaan Veronica. Dia menekankan bahwa tindakan polisi ini sangat menyesatkan orang, karena akar masalah yang sebenarnya adalah aksi rasis oleh beberapa anggota tentara Indonesia dan pemakaian kekerasan berlebihan oleh polisi sewaktu memasuki asrama mahasiswa di Surabaya [*“the root of the real problem is the act of racism by some members of the TNI [Indonesian army] and the excessive use of force by the police in the student dormitory in Surabaya”*].⁶

Selama hari-hari terakhir pada pekan pertama September 2019, berita mengenai ‘konspirasi luar negeri’ masih tetap mendominasi. Nama Benny Wenda terus disebutkan oleh pihak keamanan sebagai penjahat besar, walau disadari bahwa dia tidak dapat diapa-apakan karena dia adalah warga negara Inggris. Seperti sudah pernah kami catat, peranan Benny memang sangat terbuka hingga semua yang mengikuti perkembangan di Papua sudah lama tahu kegiatannya. Mungkin lebih penting untuk mengarahkan perhatian pada apa yang disampaikan oleh Wiranto pada 5 September 2019 yakni bahwa ada bukti-bukti nyata – informasi lanjut mengenai fakta-fakta itu sebenarnya tidak diberikannya – keterlibatan dua organisasi setempat dalam ‘konspirasi luar negeri’ itu karena mereka bekerja sama dengan Benny Wenda, yakni ULMWP (United Liberation

5 Email Joe Collins, 5 September 2019.

6 idem.

Movement West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat).⁷ Maka, pemerintah menganggap bahwa organisasi itu ada di belakang kerusuhan anarkis di Papua dan Papua Barat.

Berita mengenai hubungan struktural antara Benny Wenda dan ULMWP dan KNPB bukanlah suatu berita baru. Sudah bertahun-tahun mereka sendiri menyampaikan kenyataan itu secara publik. Benny Wenda adalah Ketua ULMWP dan KNPB adalah anggota ULMWP. Organisasi ULMWP dibentuk supaya sejumlah faksi politik yang berbeda di Papua dapat bersatu dan bersama dapat mengambil langkah untuk memperjuangkan ‘pelurusan sejarah di Papua’, antara lain dengan secara terbuka menuntut haknya untuk menentukan status politiknya melalui suatu referendum. Karena persatuan organisatoris ini terciptalah suatu ‘juru-bicara’ untuk bangsa Papua sebagai mitra dalam dialog yang dikehendaki bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Sampai saat ini kedua organisasi itu, ULMWP dan KNPB, cukup membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya pada pemakaian kekerasan untuk mencapai tujuannya, namun ingin mengangkat suaranya dengan penuh damai. Karena keduanya menunjukkan diri sebagai ‘organisasi yang menuntut referendum sebagai satu-satunya jalan demi pengakuan hak serta martabatnya’, Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai separatis. Hal yang sama terus-menerus digarisbawahi oleh Wiranto selama hari-hari terakhir ini, yang menyatakan dengan jelas: “referendum bukan opsi”.

Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah Indonesia juga berfrustrasi besar karena mereka tidak berhasil untuk memenangkan hati para pemimpin kedua organisasi ini. Hal itu juga disebabkan karena kedua organisasi memiliki dukungan luas di segala lapisan masyarakat Papua.

Catatan dan Uraian Sepintas

Di antara hiruk-pikuk politik yang masih memanas, pihak keamanan telah memberitahukan bahwa situasi di Papua Barat sudah kondusif,

7 Perlu diketahui bahwa KNPB adalah salah satu anggota ULMWP.

sedangkan di provinsi Papua belum kondusif. Namun di situ pun perlahan-lahan kehidupan biasa mulai berjalan lagi, sekolah-sekolah mulai berjalan dan toko-toko mulai dibuka. Lalu lintas jalan juga mulai terlihat seperti biasa atau normal. Di Jayapura dengan kehadiran 4.000 personil keamanan tambahan, suasana tampak tenang. Lalu reruntuhan gedung akibat perusakan pada 29 Agustus lalu mulai dibersihkan, sejumlah gedung penting dijaga ketat oleh polisi dan tentara bersenjata lengkap, sementara terlihat sejumlah truk pembawa bahan bakar dikawal oleh pengaman bersenjata lengkap.

Janji pembukaan akses internet akan dilakukan pada 5 September 2019 telah berubah dalam realisasinya, yaitu pembukaan akses internet dilakukan secara bertahap. Hingga pada 6 September 2019, akses internet di Jayapura masih sangat terbatas. Telkom telah memberitahukan bahwa tidak akan menyediakan kompensasi bagi kerugian yang dialami masyarakat karena pembatasan akses internet selama ini.

Sementara itu Wiranto tetap ramai mengangkat soal 'berita hoaks' di mana semakin tidak jelas arti dari pengangkatan persoalan itu. Wiranto juga tidak segan menekankan bahwa dialah atau instansi keamanan adalah sumber informasi yang dapat dipercayai, karena informasi ini mereka terima langsung dari lapangan.⁸

Perkembangan lainnya, bahwa dalam sejumlah wawancara yang melibatkan warga sipil, semakin diminta supaya suatu pendekatan lain daripada pendekatan pengamanan dicari demi penyelesaian masalah konflik di Papua. Contohnya dalam diskusi TV dalam program *Mata Najwa*, "Masa Depan Papua" pada 4 September 2019. Lalu tabloid *JUBI* dan mingguan *TEMPO* (versi inggris)⁹ mengangkat masalah Papua dan menekankan agar pemerintah pusat terbuka untuk 'dialog' dan 'mendengar apa yang orang Papua mau sampaikan'; sekaligus menyatakan dengan jelas penolakannya terhadap pendekatan keamanan oleh tentara dan kepolisian.

8 Dia menyatakan demikian sewaktu dia ditanyakan oleh 'Mata Najwa' (TV 4 Sept) kenapa jumlah orang tewas yang dia berikan begitu berbeda – lebih rendah – dengan angka yang disebutkan dalam laporan mendetil Keuskupan Timika di Papua.

9 Koran *JUBI*, 6-7 September 2019; <https://en.tempo.co/read/1244194/a-fair-deal-with-papua>.

Pesan yang disuarakan media yang menekankan cara dialog dalam penyelesaian persoalan Papua sesungguhnya memberikan peluang harapan, meski kecil, bagi perubahan nyata. Namun, tampaknya ‘dialog’ menjadi ‘alergi’ bagi pemerintah yang memilih penggunaan keamanan dalam menyelesaikan persoalan dan meredam situasi di Papua. Selama beberapa hari, kekuatan keamanan, dikemukakan oleh Wiranto, Ryamizard (Menteri Pertahanan) dan Hendropriyono (mantan Kepala Badan Intelijen Negara). Dengan sangat jelas bahwa Wiranto tetap menunggalkan pendekatan militer, dan dalam hal ini terus bekerjasama dengan Kapolri Tito Karnavian. Ryamizard memberitahukan dengan jelas “kalau tentara ditarik keluar dari Papua, esok harinya Papua akan menyatakan kemerdekaannya”.

Hendropriyono menyampaikan bahwa dalam pembicaraan dengan Prabowo di mana ‘Papua’ menjadi topik utama bersama dengan pertanyaan ‘Bagaimana menyatukan Negara guna menangani masalah di Papua secara kolektif’, mereka menyimpulkan: *“no more criticism, check and balance, that’s acceptable in a normal situation. This is no longer a normal situation and everyone must unite”*¹⁰ (Jangan ada kritik, pemeriksaan serta penyeimbangan lagi, itulah dapat diterima dalam keadaan normal. Ini bukan lagi keadaan normal dan semua mesti bersatu).

Maka, suara ‘bersatu’ dan senada di antara para pimpinan di pemerintahan, yang didukung oleh aparat keamanan, bergerak untuk meredam dan ‘menghilangkan’ suara-suara yang mengganggu. Ternyata suara yang dinilai ‘mengganggu’ adalah suara ULMWP, KNPB, dan orang seperti Veronica Koman, yang dianggap membela gerakan demokrasi di Papua dan yang menyuarakan suara pro-kemerdekaan. Bahkan, pemerintah seakan menunjukkan pihak untuk ‘dikambinghitamkan’, untuk menangani masalah rasisme, yang sesungguhnya dipicu peristiwa di Surabaya. Dalam konteks ‘insiden Surabaya’ belum ada kelompok yang ditangkap, dan itulah suatu pratanda yang tidak baik. Apalagi kalau disadari bahwa misalkan aksi oleh LBH di Jakarta – protes berkaitan dengan penyisiran asrama mahasiswa oleh polisi – dijawab dengan intimidasi oleh kelompok tertentu.

¹⁰ Email Joe Collins 6 September 2019.

Hal penting yang patut dicatat bahwa dari kalangan PBB (Geneva), Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi HAM di PBB mengangkat suaranya. Dia menyatakan bahwa dia mengikuti perkembangan di Papua dengan sangat prihatin dan sangat menyesal bahwa sekali lagi ada korban baik di pihak keamanan maupun di pihak warga sipil.¹¹ Dia mengajak pemerintah Indonesia untuk [a] memilih jalan dialog dan mendengar aspirasi-aspirasi serta keprihatinan orang Papua, [b] membuka akses internet dan [c] menjauhkan diri dari segala pemakaian kekerasan secara berlebihan. Lalu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menanggapiinya dengan menyatakan bahwa pemerintah memang juga prihatin dan ‘akan mengadakan dialog’. Dan beliau bertambah bahwa komentar lebih lanjut akan disampaikan oleh Wiranto, “karena dialah diberikan wewenang untuk memberikan komentar mengenai Papua”.

Maka, suara yang begitu terang untuk meminta perubahan pendekatan dalam menangani persoalan Papua, dari pendekatan keamanan ke pendekatan dialog, tidak didengar oleh pemerintahan di Jakarta. Bahkan, Presiden Jokowi semakin bergerak ke belakang dan perlahan-lahan keluar dari kerumitan persoalan Papua, sedangkan panggung semakin diduduki oleh pensiunan militer: Moeldoko, Ryamizard, Hendropriyono, Prabowo, dan Wiranto. Dan, hal ini bukan berita baik bagi Papua.

Jayapura, 6 September 2019

11 “disturbed by escalating violence”: email ETAN 4 September 2019.

BAB 5

MEREDAM GEJOLAK: DARI KEAMANAN HINGGA LOBI

Pekan kedua September 2019 situasi di Tanah Papua masih terus diwarnai polemik dan ekses persoalan rasisme. Dampak kericuhan aksi demonstrasi yang berujung anarkis pada 29 Agustus 2019 lalu, berkembang pada upaya penangkapan aktor-aktor demonstran, dan juga menyasar pada organisasi yang dituduh oleh kepolisian di balik aksi demonstrasi: ULMWP dan KNPB.

Pendekatan keamanan yang diterapkan dalam menyelesaikan gejolak ini mendapatkan sorotan kurang positif di kalangan masyarakat. Kebijakan dan langkah yang diambil di lapangan dinilai tidak tepat dan menjauhkan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik.

Berbagai upaya petinggi pemerintahan, dari menteri, Kepala BIN, hingga Presiden Joko Widodo mendapatkan ekspos besar media yang menunjukkan bahwa pemerintah tak diam dalam penyelesaian persoalan rasisme, namun langkah-langkah itu kurang menyentuh persoalan mendasar yang dialami orang Papua.

Pemerintah di Jakarta, dengan pendekatan keamanan, memfasilitasi orang-orang Papua yang dianggap 'mewakili' namun justru mendapatkan banyak penolakan di kalangan masyarakat Papua. Pertemuan-pertemuan di Istana Negara justru tak menyentuh masalah rasisme, melainkan isu pemekaran yang telah dimoratorium.

Rekaman Peristiwa

Pemberitaan mengenai ‘provokator’ masih tetap ramai di media massa. Pada 8 September 2019 Kapolri Tito Karnavian memberitahukan bahwa ia telah mengantongi nama-nama orang yang berperan dalam kericuhan saat demonstrasi. Ia menyampaikan saat untuk menunggu penangkapan mereka. Pada 9 September 2019 media nasional memberitahu bahwa “otak intelektual di belakang aksi anarkis” bernama Ferry Kombo telah ditangkap. Kemudian, pada larut malam diberitakan bahwa Buchtar Tabuni, Wakil Ketua ULMWP di Papua, sudah ditangkap dan ditahan di Markas Brimob di Kota Raja, Jayapura.

Beberapa hari kemudian, pada Rabu, 11 September 2019, polisi menangkap salah satu pimpinan KNPB, Steven Itlay. Sebelumnya, pada hari Senin, 9 September 2019, salah satu pimpinan KNPB Agus Kossai juga telah ditangkap oleh polisi.

Dalam keterangan mengenai provokator-provokator segala aksi anarkis 29 Agustus 2019 Kapolri juga memberitahukan secara sepintas lalu bahwa terdapat sekelompok ISIS yang aktif di Hinterland Jayapura, yakni di Keerom. Sebenarnya ini bukan berita baru karena beberapa bulan lalu pernyataan yang sama juga dibuat, bukan saja untuk Keerom, namun juga menyangkut wilayah Merauke. Kapolri tidak menerangkan apakah anggota kelompok itu juga ada di belakang aksi anarkis. Ketidakjelasan dalam hal ini cukup mengganggu karena membingungkan publik.

Kabar keresahan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya kembali terdengar. Kali ini mahasiswa menerima teror. Pada 9 September 2019 sekarang berisi ular (antara lain, salah satu jenis piton dan mungkin ular berbisa lainnya) dilempar oleh empat orang ke dalam halaman asrama di Surabaya. Polisi setempat berupaya supaya insiden tidak masuk media, namun kurang berhasil karena masih ada media yang tidak ingin turut menyembunyikan insiden ini. Dalam komentarnya di TV nasional Wiranto menyampaikan bahwa dia meragukan insiden ini.

Pada 9 September 2019 dalam ‘update harian’ oleh Wiranto pokok utama masih ‘konspirasi politik’ dikaitkan dengan peranan orang asing.

Dalam kerangka ini dia juga bereaksi atas surat dari Komisaris Tinggi PBB untuk HAM di Geneva. Inti komentarnya: “dapat disesali bahwa orang di Geneva tidak memiliki informasi yang tepat; mereka lazimnya diberikan informasi oleh orang-orang tertentu mengenai pelanggaran HAM terus-menerus yang sama sekali tidak ada. Dia akan mengutus seorang khusus pada Komisaris untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya.”

Suatu inisiatif yang memberikan harapan adalah pernyataan bersama para pemimpin agama di tingkat nasional, di mana mereka tekankan bahwa masalah di Papua bukan ‘masalah agama’. Dengan demikian mereka berupaya untuk menghindari bahwa seluruh permasalahan digeser menjadi suatu konflik horizontal antar agama.

Setelah suatu pernyataan pastoral diterbitkan oleh empat gereja gabungan (GKI, Kingmi, GIDI dan Baptis) pada 11 September 2019, selanjutnya pimpinan gereja katolik mengangkat suaranya.¹² Dalam suatu pesan yang cukup panjang Mgr Leo Laba Ladjar OFM menganalisa kejadian-kejadian akhir ini. Dalam rekomendasinya Bapak Uskup meminta perhatian khusus para petugas pastoral untuk saling mempertemukan komunitas-komunitas yang berbeda etnis dan agama di wilayah pastoralnya untuk berdialog, sehingga suasana ‘membagi hati dan pikiran’ akan terjadi di tingkat komunitas akar rumput. Di samping itu beliau meminta dengan sangat supaya suatu evaluasi diadakan mengenai kegiatan pihak keamanan, karena ada muncul pertanyaan mengenai netralitas dalam tindakan polisi.¹³

Sementara waktu JDP (Jaringan Damai Papua) mengangkat suaranya dan berseru supaya suatu ‘dialog sejati’ dimulai sebagaimana JDP sudah perjuangkan bertahun-tahun. Diminta supaya dialog diadakan di tingkat ‘masyarakat’ dan bukan suatu dialog antara pejabat “Jakarta” dan pejabat “Jayapura”, betapa tinggi pun mereka. Secara tradisi orang Papua mencari solusi melalui duduk bersama dan bicara (para-para).¹⁴

¹² <https://www.fransiskanpapua.org/2019/09/11/seruan-pastoral-keuskupan-jayapura/>.

¹³ Koran JUBI, 13-14 September 2019; <https://www.jubi.co.id/uskup-jayapura-tegaskan-peranan-aparat-keamanan-patut-dievaluasi/>.

¹⁴ ‘Para-para’ menunjuk pada suatu tempat duduk sederhana dekat hampir setiap rumah di kampung, di mana orang dapat duduk bersama dan ngobrol serta bercerita.

Pemerintah dan pihak keamanan suka menyatakan bahwa mereka sudah berdialog; namun ‘dialog itu’ sangat berbeda isinya dengan apa yang diharapkan orang Papua. Dalam suatu pelaporan kejadian sebelumnya kami sudah pernah membuat referensi pada ‘pertemuan dialog tertutup’ yang diselenggarakan oleh Polisi dan TNI. Karena ‘tertutup’ sudah tentu ada sesuatu yang tidak mau dibuka, seakan-akan ada sesuatu yang mau disembunyikan.

JDP juga menggarisbawahi bahwa dia tidak melihat perspektif positif dalam strategi ‘pendekatan pengamanan’; tidak ada apa-apa yang diselesaikan dengan menangkap para ‘terdakwa’. Suara yang sama didengar dari pihak ELSHAM, salah satu organisasi HAM yang paling tua di Papua.¹⁵ Perlu disebutkan juga inisiatif dari “Koalisi Masyarakat Sipil Papua” (KMSP) yang beranggotakan sejumlah LSM serta denominasi keagamaan. KMSP telah membuka suatu posko di mana setiap orang (tanpa memandang etnis atau agamanya) dapat melaporkan diri karena sudah menjadi korban dari perkembangan-perkembangan akhir ini. Kasus mereka akan ditangani sedapat mungkin.¹⁶ Memang menyegarkan mendengar beberapa inisiatif dan suara dari masyarakat sipil.

Sementara juga ada suatu unsur yang, kemungkinan besar, akan mempersulit lagi situasi di Papua, yakni pulang kampungnya sejumlah besar mahasiswa. Sampai saat itu jumlahnya antara 700 hingga 1000 orang yang pulang dari Sulawesi. Pada umumnya mereka pulang karena tidak merasa aman lagi di luar Papua. Ada cukup banyak cerita faktual mengenai intimidasi serta ancaman yang membenarkan perasaan itu. Arus ‘pulang kampung’ mungkin juga berkaitan dengan pernyataan awal Gubernur dan MRP di mana mereka menyatakan bahwa para mahasiswa sebaiknya pulang kampung saja.

Wiranto sama sekali tidak senang dengan perkembangan ini (komentarnya pada 9 September 2019), begitu juga dengan Kapolda Papua. Mereka meminta agar para mahasiswa segera kembali ke tempat studinya. Panglima sudah menyatakan bersedia menyediakan dua buah Hercules

¹⁵ Cepos, 13 September 2019, hal. 2.

¹⁶ Koran JUBI, 11-12 Sept 2019, hal.4.

(pesawat angkutan besar) untuk memindahkan kembali para mahasiswa itu ke tempat studinya. Gubernur menyatakan bahwa dia akan berunding dengan para pimpinan di dunia universitas dan pimpinan pemerintahan di Papua dan Papua Barat untuk mencari peluang penerimaan para mahasiswa.

Veronica Koman masih merupakan salah satu butir dalam pemberitaan. Dia sudah diketahui keberadaannya dan diharapkan dia akan melaporkan diri di Surabaya pada 13 September 2019. Kemudian juga ditambah bahwa polisi di Surabaya akan menerima kalau dia beberapa hari terlambat karena mesti datang dari luar negeri. Di samping itu dinyatakan bahwa polisi sedang mengadakan penelitian mengenai transaksi keuangan oleh Veronica dan beberapa rekeningnya. Juga ditambah bahwa polisi tidak berkeberatan kalau Veronica atau pihak-pihak yang mendukungnya ingin memulai suatu proses prapengadilan. Sementara waktu jumlah pernyataan dukungan bagi Veronica bertambah terus, baik di Indonesia maupun di luar negeri; pastilah polisi juga telah menyadari hal demikian.

Akhir-akhir ini mulai muncul suara kritis mengenai sikap dari aparat keamanan yang berpikir bahwa dapat menyelesaikan masalah-masalah secara mudah saja, yakni dengan misalnya mengadakan ‘acara bakar batu’. Baru ini ‘acara bakar batu’ diselenggarakan dalam kerjasama dengan pemerintahan lokal di PTC-Jayapura pada 5 September 2019. Kegiatan-kegiatan semacam ini, menurut para kritisi, hanya membuat jelas bahwa mereka tidak memahami arti sebenarnya ‘bakar batu’ sebagai pembulatan suatu konflik. Acara demikian hanya diadakan kalau masalah yang benar sudah diselesaikan tuntas, dan penyelesaian itu hanya bisa jadi kalau secara terbuka masalahnya dibicarakan secara luas dan intensif bersama.

Salah satu pertemuan yang mendapatkan kritikan adalah pertemuan Presiden dengan 61 orang Papua yang diundang pada 10 September 2019 di Istana Presiden, Jakarta. Kelompok ini terdiri dari tokoh adat, wakil masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan mungkin masih ada ‘kategori’ lainnya. Ada berita bahwa para undangan diseleksi oleh BIN. Dalam pertemuan Presiden didampingi oleh Menkopolkam Wiranto, Menlu Retno Marsudi dan Kepala BIN Budi Gunawan. Semua, kecuali Presiden

sendiri, memakai suatu hiasan kepala tradisional Papua, dan para undangan memakai batik Papua. Tempat pertemuan dihias dengan puluhan bendera Merah Putih. Presiden mengajak para undangan untuk menyampaikan aspirasinya. Ada 9 hal yang diminta.¹⁷ Sebagian besar permintaan tersebut diterima dengan baik oleh Presiden. Sebagian pertemuan disiarkan berulang kali pada setiap kanal TV nasional.

Sangat menonjol sekaligus sangat menyedihkan bahwa dalam 9 aspirasi itu tidak ada hal-hal mengenai situasi yang menyedihkan di Papua dewasa ini; tidak ada persoalan diskriminasi atau rasisme, tidak ada masalah “Papua yang diduduki” dan jumlah korban, satu dari pihak keamanan dan 13 dari masyarakat sipil. Dan Koran JUBI mengangkat kenyataan itu. Tanggapan yang sangat jelas dalam komentar redaksinya yang diakhiri dengan kesimpulan: “Apa yang mau dikata. Selalu ada penumpang gelap dalam perjalanan. Demikian juga hari ini. Korban meninggal, luka, bahkan ribuan pulang ke Tanah Papua mereka abaikan. Hanya untuk kepentingan sendiri”.¹⁸

Catatan dan Uraian Sepintas

Ruang bicara bagi Wiranto di TV nasional ternyata bertujuan untuk menerangkan dan ‘memasyarakatkan’ pada publik Indonesia kebijakan pemerintah dan pilihan strategi ‘pendekatan pengamanan’ oleh aparat keamanan. Di samping itu kesempatan tersebut dipakai untuk menyangkal atau meragukan sejumlah berita (misalnya karung berisi ular di Surabaya; info di Komisi HAM di PBB). Walau sekali-kali pendapat-pendapat berlainan dikemukakan sejumlah ahli komentar, tetapi berita yang dominan adalah berita versi Wiranto.

¹⁷ [1] pemekaran wilayah provinsi; [2] badan nasional buat pengurusan tanah di Papua; [3] jabatan di kementerian; [4] pembangunan asrama ‘Nusantara’ buat mahasiswa; [5] revisi Undang-Undang Otonomi; [6] pengangkatan 1000 tenaga honorer menjadi pegawai tetap; [7] percepatan lingkaran Palapa/internet; [8] Lembaga Adat buat Perempuan dan Anak; [9] pembangunan Istana Presiden di Jayapura.

¹⁸ Koran JUBI, 11-12 Sept 2019, p.2.

Kami tidak membayangkan sampai kapan masyarakat luas akan mengerti tentang Papua yang diinformasikan secara relatif berat sebelah oleh para petinggi aparat keamanan. Sementara waktu itu tidak ada penginformasian yang seimbang. Padahal masyarakat Papua membutuhkan suara-suara yang dapat menyumbang keseimbangan informasi bagi publik luas, dan masyarakat berhak mendapatkannya.

Di sisi lain, tampak semakin jelas adanya ketakutan yang berhubungan dengan ‘internasionalisasi’. Dalam sidang DPR RI telah terdengar keprihatinan mengenai ‘internasionalisasi Papua’, karena dengan demikian diperkecilnya peluang bagi Indonesia untuk dipilih sebagai anggota Komisi HAM PBB periode 2020-2022 pada 16 Oktober 2019. Selama diskusi mengenai hal itu, Menlu Retno Marsudi menyarankan untuk melanjutkan diskusi di belakang pintu tertutup.¹⁹ Mengapa begitu merahasiakan diskusi ini?

Bahaya cukup besar akan terjadi konflik horizontal dan hal itu sudah menjadi kentara dalam reaksi atas perusakan pada 29 Agustus 2019 di Jayapura; ancaman ‘kelompok Nusantara’ mampu membuat seluruh wilayah tidak aman karena ternyata kelompok itu bersedia beraksi mematikan di Jayapura dan Abepura. Faktanya bahwa kelompok etnis ini sekaligus dominan beragama Muslim, dapat memudahkan suatu pergeseran menuju suatu konflik antar agama (bandingkan juga pengalaman di Ambon pada puluhan tahun lalu) cukup disadari banyak orang. Oleh karena itu merupakan berkat bahwa gabungan para pemimpin agama di Indonesia menyadari ancaman itu dan telah berupaya untuk meredakan ketegangan sampai menghindari konflik antar agama.

Suatu masalah serba baru dan cukup berat adalah ‘pulang kampungnya’ para mahasiswa Papua. Menarik untuk melihat bahwa ada perbedaan pendapat serta kebijakan mengenai nasibnya para ‘mahasiswa eksodus’ ini. Wiranto menginginkan mereka untuk kembali ke tempat studinya di Indonesia, sedangkan Gubernur mencari suatu solusi di Papua dan mungkin di luar negeri. Juga penting untuk melihat siapa

¹⁹ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/lawmakers-concerned-about-international-ization-papua-unrest.html>.

saja yang bertindak secara konkrit. Pada 10 September lalu diadakan suatu pertemuan besar antara ‘mahasiswa eksodus’, beberapa pimpinan dunia universitas’ di markas Kapolda, bukan di kantor Gubernur. Seusai pertemuan Kapolda menyatakan bahwa mahasiswa adalah ‘korban dari para elit serta kepentingannya’²⁰; boleh jadi bahwa dia bereferensi pada pernyataan Gubernur serta Maklumat dari MRP. Terlepas dari semuanya itu tetap sangat menyakitkan hati bahwa para petinggi pihak keamanan – seperti sekarang berhubungan dengan eksodus para mahasiswa – menyangkal secara bulat segala fakta yang nyata mengenai intimidasi dan ancaman terhadap para mahasiswa Papua. Sementara waktu masih suatu teka-teki ke arah mana semuanya ini akan berkembang.

Makin hari makin sering ‘acara-acara tradisional’ diandalkan guna menciptakan suatu pendekatan yang mengundang. Pada prinsipnya baik, namun hanya dapat diterima kalau unsur-unsur tradisional ini tidak dikosongkan artinya yang padat dan benar, hingga menjadi suatu ‘ritual kosong’ (seremonial melulu). Sikap yang memprihatinkan dapat dibaca juga dalam kemudahan dari tokoh-tokoh resmi dari luar Papua untuk menghiaskan diri dengan hiasan kepala tradisional, seperti misalnya dalam pertemuan 61 orang Papua dengan Presiden (Presiden sendiri, syukurlah, tidak memakainya). Kami memandang bahwa pemakaian ‘warisan tradisional’ dengan begitu mudah menunjukkan suatu sikap ‘kurang memahami serta menghargai’ masyarakat yang mewarisi tradisinya yang penuh arti dan nilai.

Yang masih perlu dipertanyakan secara khusus juga adalah penyisiran oleh aparat keamanan di wilayah Deiyai dan sekitarnya. Di berbagai tempat mereka menyita busur dan panah dari rumah para warga lokal (tidak jelas apakah mereka juga memusnahkannya). Alasannya: ini adalah senjata. Boleh jadi, namun bertahun-tahun sampai saat ini busur dan panah merupakan perlengkapan yang tak terpisahkan bagi setiap laki-laki, menjadi budaya kalau dia ingin menghargai diri dan mau dihargai orang lain. Kalau begitu mudah nilai demikian diabaikan, disangkal,

20 <https://www.en.antaranews.com/132596/ensuring-no-more-exodus-of-native-papuan-students>.

jangan heran bahwa orang akan berontak.

Perhatian khusus patut diberikan kepada segala pertemuan yang mengklaim mewakili masyarakat Papua. Ini berlaku untuk pertemuan Kapolri bersama Panglima dengan masyarakat di Wamena²¹ dan juga untuk pertemuan 61 orang Papua dengan Presiden. Kata “perwakilan” mendapat suatu ‘bau tidak enak’ kalau kita menyadari bahwa selama pertemuan-pertemuan semacam itu ‘aspirasi-aspirasi masyarakat’ ditawarkan. Katanya di Wamena para ‘wakil masyarakat’ menginginkan pembangunan suatu markas Brimob dan suatu markas Korem. Setahu kami kedua proyek ini sudah cukup lama sangat diprotes oleh masyarakat setempat dan masih sampai pada hari ini! Bagaimana tiba-tiba ini bisa menjadi ‘aspirasi masyarakat’?

Memang sangat memudahkan bagi Kapolri dan Panglima untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi ini kepada Presiden. Sama saja dalam pertemuan Presiden dengan ‘61 wakil masyarakat Papua’; mereka meminta suatu pemekaran provinsi sesuai dengan tujuh wilayah kultural. Kelihatan Presiden sangat senang mengiyakan permintaan itu dan esok harinya menteri yang bersangkutan telah menyampaikan bahwa ‘moratorium yang sedang berlaku buat seluruh Indonesia’ (melarang segala pemekaran sementara ini) tidak akan diberlakukan buat Papua.

Semua tahu bahwa pemekaran di masa lalu mengakibatkan suatu marginalisasi yang sangat signifikan buat masyarakat asli Papua, dan juga memunculkan konflik-konflik internal sambil menghancurkan hubungan sosial tradisional dan harmoni dalam banyak komunitas orang asli Papua. Terutama perebutan ‘kursi’ kekuasaan menjadi alasan perpecahan dan banyak kerusakan intern masyarakat Papua. Pemekaran mempunyai ‘*track-record*’ yang sangat buruk, dan bukan di Papua saja, melainkan juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia, maka ‘moratorium pemekaran’ diberlakukan sejak 2014.

Mengapa tiba-tiba moratorium itu tidak diberlakukan di Papua? Apalagi kalau sadar bahwa dari Papua dengan sangat jelas diberitahukan bahwa 61

21 Lihat Koran JUBI, 9-10 September 2019.

orang Papua yang bertemu dengan Presiden tidak mewakili masyarakat Papua, namun hanya mewakili diri sendiri serta kepentingannya, atau mungkin hanya menyampaikan ‘pesan sponsor’, yakni pesan dari pihak penyelenggara pertemuan.

Kelihatan bahwa ‘formula perwakilan yang dimanipulasi’ sangat mudah dipakai; orang yang kurang tahu mudah dapat disesatkan. Sekaligus membawa ketegangan intern di kalangan masyarakat tradisional setempat. Sering formula ini dipakai untuk kepentingan yang lebih tinggi dan dirahasiakan seperti misalnya dalam pertemuan-pertemuan di belakang ‘pintu tertutup’; ini juga jelas dari pernyataan Gubernur (serta pejabat tinggi lainnya di Papua) bahwa beliau sama sekali tidak tahu bahwa ada utusan 61 pria/perempuan ke Presiden. Dengan kata lain: ‘perwakilan yang termanipulasi’ punyai dampak mengacaukan, atau malahan dampak destruktif di segala tingkat (namanya: ‘divide et impera’ artinya ‘memecahkan dan menguasai’).

Bagi setiap orang Papua yang berakal sehat seluruh sandiwara dalam pertemuan dengan Presiden merupakan suatu penghinaan buat Papua. Pada publik yang luas di Indonesia sekali lagi dijelaskan melalui media nasional bahwa pemerintah pusat menerima masyarakat Papua dengan begitu baik saja, maka sekali lagi mereka disesatkan. Tanggapan di Papua sendiri sangat keras dan sampai dengan Gubernur bergabung dalam protes.

Menurut pernyataan Kapolda pada 12 September 2019, Jayapura sudah ‘kondusif’. Namun ternyata belum ‘cukup normal’ untuk membuka akses pada internet. Pemblokiran akses internet selain terjadi di Jayapura, juga di Manokwari dan Sorong. Memang sepintas lalu Jayapura kelihatan tenang, namun kami mesti mengakui juga bahwa masih merasa kurang tenang dalam suatu kota yang didominasi anggota-anggota keamanan yang bersenjata lengkap. Memang tidak normal! Dan lebih memprihatinkan ternyata masalah yang sebenarnya (rasisme), hingga laporan ini ditulis, belum ditangani.

Jayapura, 12 September 2019

BAB 6

EKSODUS MAHASISWA DAN ABSENNYA PERAN PEMERINTAH SIPIL

Dalam catatan sepekan ini, 13-20 September 2019, eksodus mahasiswa Papua dari Jawa ke Papua mulai memperlihatkan persoalan yang kompleks. Jumlah mahasiswa yang eksodus ke Papua terus membesar, jumlahnya mencapai sekitar dua ribu orang.

Dampak sosial semakin terasa, adanya tuntutan peralihan studi di wilayah Papua hingga kota-kota di negara tetangga, Papua New Guinea (PNG). Persoalan lain yang berdampak pada situasi keamanan, ketika para mahasiswa itu menggelar aksi demonstrasi menuntut nasib mereka diperhatikan.

Aktivitas dan keberadaan mahasiswa eksodus ini mendapatkan tanggapan yang kontraproduktif, karena diberikan reaksi yang cukup keras oleh aparat keamanan, dengan membubarkan paksa para mahasiswa yang berkumpul dan mengungkapkan aspirasinya.

Dalam situasi itu, tak tampak peran pemerintah sipil di Tanah Papua dalam menyelesaikan persoalan eksodus mahasiswa Papua. Masalah semakin rumit karena pemerintah Papua sempat tak memberikan respon yang cepat dan tepat. Akhirnya hal ini disadari oleh pemerintah Papua dan Majelis Rakyat Papua.



Eksodus mahasiswa menjadi *headline* di media lokal Jubi.

Foto: Repro SKPKC FP

Rekaman Peristiwa

Terkait persoalan diskriminasi, dalam tabloid JUBI sepanjang minggu ini (13-20 September 2019) menurunkan berita mengenai diskriminasi pada kasus rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur. Dalam publikasi itu, terlihat praktik diskriminasi bukan hanya kasus (ujaran) rasisme, namun juga pemberlakuan hukum antara orang Papua dan para 'provokator' dari kalangan non-Papua, seperti Kelompok Nusantara dan Barisan Merah Putih. Di samping itu perhatian media (JUBI) juga pada cara penangkapan puluhan orang Papua (secara khusus aktivis-aktivis) yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi dan sering tanpa bukti bahwa orang yang bersangkutan telah membuat sesuatu yang 'tidak legal'. Tidak kalah memprihatinkan adalah berita-berita bahwa para tahanan masih

juga menjadi korban penganiayaan fisik oleh oknum polisi dan tentara. Hal ini terungkap dalam suatu laporan yang diluncurkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Papua (KMSP) berjudul: *Lembaran Fakta – Mengungkap Fakta Pelanggaran Hukum dan HAM Pasca Anti Rasisme di Tanah Papua*²²; juga dalam konferensi pers KMSP yang merangkum dengan jelas mengenai segala masalah itu.²³

Tentang mahasiswa yang pulang kampung, menurut berita terakhir dari Kantor Gubernur jumlah mereka sudah naik menjadi 2.000. Sudah tentu masalah ini bikin pusing banyak instansi. Secara khusus Gubernur dan MRP karena mereka pernah – waktu suasana paling panas – mengajak mahasiswa semua untuk pulang ke Papua saja. Sekarang para mahasiswa menuntut dari mereka supaya diberikan suatu atap di atas kepalanya dan peluang untuk membulatkan studinya. Gubernur Papua Barat dalam persoalan ini sedikit lebih enak karena tidak pernah menjanjikan sesuatu.

Namun demikian, mereka semua mengalami permasalahan yang sama: mereka di kemanakan? Apakah ada jurusan-jurusan studi yang cocok dan diperlukan di Papua? Apakah segala universitas bersedia untuk menerima mereka? Di berbagai tempat diadakan rapat namun sementara waktu belum ada banyak titik terang. Sekaligus pimpinan nasional, diwakili oleh instansi-instansi pengamanan, ingin supaya mereka semua kembali ke tempat studi awal. Boleh jadi bahwa pimpinan nasional menyadari bahwa kelompok besar mahasiswa ini merupakan penambahan sangat berarti kelompok di Papua yang meminta suatu referendum. Tidak dapat disangkal juga bahwa di tempat studi di luar Papua, banyak mahasiswa telah mengalami tindakan-tindakan diskriminasi yang sangat nyata, maka sulit untuk dapat diajak kembali ke lokasi itu. Pendek kata, eksodus mahasiswa ini merupakan suatu masalah yang cukup rumit.

Lalu hal lain yang meningkatkan rasa keprihatinan adalah berita²⁴ mengenai pembubaran paksa beberapa pertemuan yang sebenarnya

22 Lihat <https://tirto.id/usai-demo-papua-koalisi-rilis-data-korban-dugaan-pelanggaran-ham-eifk>.

23 Bdk. <https://www.disq.us/t/3ibrolu> dan juga: https://www.youtube.com/watch?v=ZS4_j-eC_c.

24 Koran JUBI, ed. 20-21 September 2019.

dilakukan dengan damai, masing-masing di Timika dan Manokwari pada 19 September 2019. Di Timika, acara 'bakar batu' diselenggarakan di halaman kompleks organisasi adat LEMASA. Yang diundang: sejumlah mahasiswa, orang tua serta instansi yang terkait dengan penerimaan para mahasiswa eksodus. Makan bersama sebagai tanda selamat datang dan kesempatan untuk menukar pikiran mengenai pertanyaan: "bagaimana kelanjutan nasib studinya?" Pertemuan itu diselenggarakan di halaman kompleks pribadi dan tidak terjadi sesuatu pun yang dapat dinilai melawan hukum. Namun, pertemuan ini dibubarkan polisi dan 22 mahasiswa dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi.

Di Manokwari suatu long-march direncanakan sebagai bentuk protes melawan rasisme, melawan kriminalisasi para aktivis dan supaya kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan. Di sini pun pertemuan dipaksa bubar karena polisi takut bahwa mungkin akan ada kerusuhan. Menarik untuk mencatat bahwa pada saat yang sama perwakilan Indonesia di PBB menyatakan di Sidang Komisi HAM PBB bahwa di Papua ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan untuk berkumpul!

Catatan dan Uraian Sepintas

Akhirnya satu catatan mengenai peranan pemerintah sipil yang kurang nyata. Kesan sampai saat ini bahwa pemerintah sipil berdiri di pinggir jalan saja; karena kemauan demikian atau karena didorong ke arah itu, itulah kurang jelas. Mungkin akan ada perubahan sedikit mengingat bahwa Gubernur Papua menyampaikan rasa frustrasinya saat pertemuan berhubungan dengan penggantian Pangdam di Papua pada 18 September 2019. Dia membuat jelas bahwa tentara maupun polisi perlu berhenti mencurigai pemerintah sipil, dan bahwa pemerintah sipil berhak penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua MRP beberapa hari sebelumnya di mana dia menekankan bahwa MRP memiliki misi untuk 'memberikan suara kepada hak-hak orang Papua', dan bahwa peranan demikian perlu dihargai. Mungkin saja disini kelihatan tanda-tanda awal

rasa bosan dengan ‘pendudukan polisi dan tentara’.

Hal yang menyegarkan kalau akhirnya pemerintah sipil lebih menuntut untuk menyelesaikan masalahnya dan bukan tentara. Boleh jadi bahwa diskusi mengenai nasibnya para mahasiswa eksodus selama hari-hari terakhir membuat pemerintah sipil lebih sadar bahwa sampai saat ini, sejak peristiwa ini terjadi sebulan lalu, mereka hanya menjadi penonton saja. Sekarang pemerintah perlu memulai dengan tindakan nyata, karena para mahasiswa menuntutnya berdasarkan janji awal dari Gubernur dan MRP. Gubernur dengan pejabat-pejabatnya diharapkan akan menemukan kreativitasnya dan menentukan kebijakan yang jelas disertai tindakan dan aksi konkrit.

Cerita dan fakta mengenai diskriminasi yang cenderung makin meningkat dalam perlakuan hukum di Papua menjadi hal yang sangat memprihatinkan; penangkapan diadakan tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku, aktivis dikriminalisasi, yang ditahan dianiaya, akses kepada para tahanan buat keluarga serta pengacara hukum ditolak. Dari segi lain investigasi mengenai pemakaian kekerasan seperti dalam kasus Deiyai tetap terjadi; maka, tetap tidak ada tindakan terhadap para pelaku yang mengakibatkan kematian minimal 10 orang dengan kekerasan.

Peristiwa yang tidak kalah memprihatinkan adalah operasi militer di pedalaman dan pegunungan di mana akses buat siapa pun ditolak kecuali tentara sendiri. Sementara waktu jumlah personil keamanan sudah bertambah 6.000 orang; kebanyakan tidak ada bayangan atau pemahaman mengenai apa dan siapa Papua ini. Apalagi tanda-tanda bahwa ‘insiden-insiden rasis di Jawa Timur’ akhirnya diabaikan saja oleh pemerintah nasional, atau mungkin lebih tepat momentum insiden rasis ini dengan sengaja dipakai oleh instansi keamanan (polisi/tentara) untuk menghentikan segala perlawanan di Papua dalam bentuk apa pun. Kesan demikian secara tidak langsung dibenarkan oleh pernyataan-pernyataan yang sangat jelas oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 19 September 2019, yang menyatakan bahwa tidak boleh menarik pasukan dari Papua, “karena masih ada separatist yang bersenjata di Papua yang menembak personil keamanan”, dan selanjutnya “seandainya pasukan

ditarik (dari Papua), besok Papua akan memisahkan diri (dari Indonesia)".²⁵ Pendek kata, masa depan orang Papua terlihat sangat suram.

Sementara itu, hal yang sangat menyedihkan bahwa Indonesia tetap memberikan informasi yang 'terputar' di forum internasional seperti PBB. Semua sadar apa yang terjadi, namun ternyata polanya tidak dapat dibongkar. Mungkin terlalu sinis, namun jangan heran kalau nanti, pada 16 Oktober 2019, Indonesia dipilih untuk mengisi salah satu kursi kosong di Dewan HAM PBB periode 2020-2022.²⁶

Jayapura, 20 September 2019

25 Lihat, <https://en.antaranews.com/news/133120/indonesian-troops-will-remain-in-papua-defense-minister>.

26 Sesudah penulisan bagian ini selesai, pada 17 Oktober 2019, muncul berita Indonesia terpilih sebagai satu dari 13 anggota Dewan HAM PBB yang baru, periode 2020-2022, dalam pemilihan di New York, Amerika Serikat. Lihat, <https://dunia.tempo.co/read/1261153/ri-terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-dengan-suara-terbanyak/full&view=ok>.

BAB 7

BARA RASISME DI WAMENA

Pada minggu terakhir September 2019, situasi di Tanah Papua kembali memanas. Kericuhan hebat terjadi di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Bermula pada aksi demo damai siswa-siswi SMU yang memprotes ungkapan rasis seorang guru. Dalam aksi damai itu kemudian muncul kericuhan yang berubah dengan tindakan anarkis.

Aksi anarkis ini tak biasa, karena dalam waktu cepat kota Wamena terbakar. Kios-kios, kendaraan mobil dan motor, rumah-rumah penduduk, dan kantor pemerintah menjadi sasaran amukan massa, yang bukan saja dari kalangan pelajar SMU. Bahkan, kerusuhan ini memakan korban nyawa.

Sejak peristiwa demo dan kerusuhan pada 23 September 2019, berita-berita tentang kekerasan tersebar, informasi yang beredar tak sepenuhnya akurat, bahkan bias. Disebutkan bahwa kios-kios yang dibakar itu milik para migran atau pendatang, namun fakta di lapangan ada banyak kios yang dimiliki orang Papua juga terbakar.

Jelang akhir September, ketegangan politik masalah Papua semakin tinggi. Pimpinan keamanan dan pemerintah mengkaitkan situasi di Papua dengan agenda Sidang Umum di PBB di Amerika Serikat dan Sidang Komisi HAM PBB di Genewa. Hal ini justru tak memberikan titik terang untuk memahami rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.



Massa siswa-siswi SMA Kota Wamena yang melakukan aksi tolak rasisme ke Kantor Bupati,
23 September 2019.
Dok: Rizal Lany_SKPKC FP



BERHENTI RASISME
DI PAPUA



KAMI BUKAN M...

Rekaman Peristiwa

Peristiwa yang paling dibicarakan pada minggu jelang akhir September 2019 adalah kejadian penuh kekerasan di Wamena pada 23 September 2019. Awalnya berita-berita yang terpublikasi memberikan kesan adanya suatu demo yang damai dan tenang saja sebagai reaksi atas ungkapan rasis seorang guru di SMU. Mereka ingin membawa protesnya kepada Bupati. Saat di jalan dan di halaman kantor Bupati berita-berita berubah nadanya: menjadi kurang jelas dan ada indikasi kekerasan yang mematikan. Sudah jelas bahwa sekitar waktu siang korban-korban pertama mulai dihitung; kelak menjadi jelas bahwa akhirnya terdapat tidak kurang dari 32 orang mati (50% orang Papua, 50% orang migran, katanya) dan sekitar 70 orang mengalami luka. Kemungkinan besar bahwa jumlah korban lebih tinggi karena ada korban yang langsung dibawa oleh keluarganya ke kampung; juga penjagaan ketat oleh tentara di rumah sakit mempersulit akses kepada para pasien termasuk bagi keluarga yang mencari saudara dan anggota keluarganya yang hilang. Pendek kata: jumlah korban sangat tinggi; hari yang buruk, khususnya bagi masyarakat di Balim, namun juga bagi Papua dan Indonesia pada umumnya.

Di samping para korban terdapat kehancuran dari rumah-rumah yang dibakar, mobil, motor, kios-kios – informasi beredar sekitar 100 kios, dan 5 kantor pemerintahan. Juga bandara ditutup mulai jam 12.30 dan akses internet diblokir oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah melakukan perundingan dengan instansi-instansi keamanan. Kemudian pasukan tambahan didrop di wilayah ini yang berjumlah sekitar 1.500 personil.

Suatu kategori korban lain: ‘korban ketakutan’; sudah tentu segala peristiwa dialami secara tiba-tiba dan tak terduga. Akibatnya: terjadi kepanikan dan kekacauan di mana semua orang tiba-tiba terasa dalam bahaya dan terancam, bisa takut mati dan ketakutan kehilangan harta. Maka, banyak orang mau keluar dari situasi tersebut. Minimal 5.000 migran minta dievakuasi dan mencari tempat aman sementara, sebagian besar berada di kompleks pihak keamanan dan gereja. Juga terdapat berita

bahwa masyarakat asli lokal mengungsi keluar dari Wamena kembali ke kampung asalnya, jauh dari tempat ancaman dan ketakutan.

Bagaimana semua ini dapat terjadi? Berita-berita pada hari itu hampir tidak dapat ditafsirkan dengan baik, sedangkan polisi memberitahukan bahwa kekacauan atau chaos terencana itu karena ada suatu berita palsu (hoaks). Nada berita itu mengandung unsur tuduhan pada kelompok tertentu yang lazimnya dituding akhir-akhir ini, yakni organisasi KNPB. Yang jelas bahwa kelompok siswa-siswi disusupi oknum-oknum tertentu; dengan kata lain terdapat suatu kelompok yang mengerahkan baik massa maupun mengambil inisiatif untuk mulai membakar, memakai kekerasan dan menciptakan chaos.

Siapa sesungguhnya para pelaku di balik kekerasan dan kerusakan itu? Pada berita terakhir, 30 September dan 1 Oktober 2019, polisi menyatakan secara resmi bahwa 'bukan orang asli lokal' yang membuat kekacauan ini. Lalu siapa sebenarnya pelaku tidak diterangkan oleh polisi, namun berita muncul pada 1 Oktober 2019 bahwa tujuh orang sudah ditangkap dan dinyatakan tersangka. Namun, nama-nama ketujuh orang ini tidak diumumkan.

Secara khusus kami mencatat bahwa di antara para korban dalam peristiwa itu terdapat seorang dokter, namanya dr Soek Marsetiyo, yang tempat pelayanannya di pedalaman, Tolikara. Cerita peristiwa kekerasan yang menyebabkan kematian dokter Soek Marsetiyo masih kabur. Namun, diungkapkan ia dianiaya oleh sekelompok orang, hingga terluka parah dan meninggal dunia. Para pelaku itu tidak dapat diidentifikasi. Sangat jarang dalam sejarah kekerasan di Papua terdengar bahwa seorang dokter menjadi korban, khususnya orang yang sudah 15 tahun memberikan pelayanan medis dengan nyata di pedalaman. Kematianannya menambah pertanyaan mengenai, apa yang sebenarnya terjadi di Wamena pada 23 September 2019 itu?

Pada 23 September 2019 bukan saja Wamena menjadi tempat kekerasan, di Jayapura-Abepura pun berita kekerasan menjadi perhatian. Menjelang Senin, 23 September 2019, suatu berita tersebar bahwa pada hari Senin akan ada satu demo besar yang lebih anarkis daripada tanggal 29

Agustus 2019; maka, semua diajak untuk tinggal di rumah saja dan siap untuk membela diri. Berita ini diduga berasal dari “kelompok Nusantara” – sebutan untuk sejumlah kelompok etnis yang menjadi pengirim berita. Setelah berita ini dicek kepada pihak penyelenggara demo pada 29 Agustus 2019, ternyata tidak ada rencana apapun untuk mengadakan demo pada hari Senin itu; pendek kata: info berita ini tidak benar.

Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Senin memang lain sekali. Pagi-pagi hari sejumlah ‘mahasiswa eksodus’ mulai berkumpul di halaman Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura. Maksud mereka meminta bantuan pimpinan Uncen untuk membuka suatu ‘Posko’ di halaman Uncen di mana mahasiswa eksodus dapat melaporkan diri, meregistrasi diri dan selanjutnya diberikan bantuan. Maksud kelompok ini (sekitar 200 mahasiswa/i) dapat dibaca jelas pada ‘banner’ yang dipasang pada pintu masuk halaman Auditorium Uncen. Pimpinan Uncen menolak permintaan dan meminta mereka untuk meninggalkan halaman Uncen. Sementara waktu di depan pintu masuk halaman Uncen telah bersiaga pasukan Brimob. Kemudian ada negosiasi antara instansi pengamanan dan kelompok mahasiswa/i dan diputuskan untuk mengalihkan tempat ke ‘mahasiswa punya markas’ di Expo Waena; mereka diantar oleh sarana angkutan Brimob.

Ketika tiba di markas mahasiswa itu, terjadi suatu kericuhan. Ada seorang prajurit dianiaya, mengalami luka serius hingga meninggal dunia. Namun, belum ada informasi yang jelas terkait kronologis dan bagaimana insiden kekerasan itu terjadi. Akibatnya lima orang tewas, terdiri dari empat mahasiswa dan satu prajurit. Selain itu 772 mahasiswa ditangkap dan dibawa ke markas Brimob. Di sana mereka berjam-jam ‘diparkir’ (duduk di luar) dan dijemur di bawah terik matahari, dan – menurut sejumlah berita – dianiaya secara masal (disepak, dipukul). Pendek kata suatu perlakuan yang sama sekali tidak manusiawi! Esok harinya mereka semua dilepaskan kecuali enam orang yang ditahan dan dipindahkan ke Mapolda Papua di Jayapura.

Sementara waktu kesan bahwa ‘gerakan protes disertai perusakan’ makin tersebar. Berita terakhir adalah dari Pegunungan Bintang, Oksibil,

pada 26 September 2019 terjadi pembakaran sejumlah kios.²⁷ Kabarnya peristiwa itu berawal dari adanya sekelompok orang yang sedang minum alkohol dan sempat ditegur oleh tentara. Namun, teguran ini kurang diterima dan memicu insiden perusakan itu.

Selain kabar dari Pegunungan Bintang, tersiar berita lain yang menyebutkan adanya pembakaran di Yahukimo, Boven Digoel, dan di Tolikara. Namun tidak ada rincian informasi yang menjelaskan insiden-insiden tersebut.

Kerusuhan di beberapa daerah di Tanah Papua mengakibatkan gelombang pengungsi. Banyak penduduk migran yang menghendaki keluar dari daerah yang sedang bergejolak setelah insiden pada 23 September 2019. Ada ribuan migran yang keluar dari kota Wamena. Hal yang sama terjadi di Oksibil, sekitar 600 migran keluar dari daerah itu, setelah kios-kios mereka dibakar. Selain daerah itu, terdengar warga di daerah lain yang ingin mengungsi tetap informasi ini sulit untuk diverifikasi.

Sementara waktu dapat disimpulkan bahwa ada indikasi kejadian-kejadian akhir ini telah meningkatkan kemungkinan terjadilah suatu konflik horizontal.

Hingga akhir September 2019, situasi di Tanah Papua masih tegang dan panas. Pihak keamanan mendapatkan sorotan karena tak mampu mengendalikan situasi dari beberapa peristiwa kerusuhan yang terjadi. Hal ini memaksa Kapolri untuk mencopot Kapolda Papua pada 29 September 2019. Selain itu, barangkali perlakuan terhadap para mahasiswa di markas Brimob menjadi alasan tambahan penggantian ini. Penggantinya adalah mantan Wakil Kepolisian Daerah Papua Paulus Waterpau (Juli 2015–April 2017). Kapolri Tito Karnavian, tentu menempatkan kembali ke Polda Papua, karena memiliki *track record* selama menjadi Kapolda Papua.

Ada banyak pertemuan dan rapat untuk membahas bagaimana penyelesaian konflik di Papua. Salah satu yang mungkin cukup berarti adalah perundingan antara pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat dengan staf presiden di Jakarta pada 23-24 September 2019. Dalam pertemuan

27 Menurut harian di Jayapura, Cenderawasih Pos, 27 September 2019, sekitar 200 kios dibakar.

itu DPRD-DPRD menyarankan dengan sangat – kesannya dengan restu Presiden – supaya Presiden bertemu dengan Benny Wenda, ULMWP dan KNPB. ULMWP sudah memberikan tanggapan dengan menyatakan tidak berkeberatan, namun hal itu akan dilakukan setelah pasukan-pasukan tambahan (Brimob maupun TNI) ditarik kembali dari Papua dulu. Menurut ULMWP, selama pasukan keamanan itu masih ada orang Papua tidak aman. “Selama mereka masih ada, bangsa kami tidak aman!”, katanya.

Catatan dan Uraian Sepintas

Kejadian di Wamena menciptakan suatu situasi baru. Dari satu segi kejadian ini merupakan suatu hari berdarah yang mengerikan (korban minimal 32 dan terluka 70), dari segi lain menjadi awal ‘tidak merasa aman lagi’ buat hampir segala lapisan masyarakat; ketakutan dapat dibaca atas muka orang dan ‘cari tempat aman’ adalah pikiran utama di benaknya. Tercipta suatu suasana dimana ‘masa depan’ sulit dapat diramalkan. Tak seorang pun dapat menjelaskan siapa mengerahkan massa pada saat itu. Tak seorang pun dapat bercerita siapa membunuh sekian banyak orang. Tak seorang pun dapat menyatakan apa yang akan terjadi besok. Hanya para korban saja bercerita suatu kisah yang penuh kekerasan yang brutal. Ratusan tempat bakaran bercerita suatu kisah agresi, putus asa, kehilangan nilai dan non-toleransi. Barisan orang yang ingin dievakuasi, baik migran maupun orang asli Papua yang mau pulang ke kampung halamannya, bercerita bahwa tidak ada tempat baginya dimana mereka bisa merasa betah. Secara murni suatu tragedi kemanusiaan!

Bagaimana semuanya ini dapat terjadi? Itulah pertanyaan yang didengar dimana-mana. Siapa ada untung dengan kekacauan ini? Mungkin saja ada sejumlah kelompok berkepentingan yang ‘beruntung’; pihak yang memilih pendekatan pengamanan secara represif mendapat legitimasi untuk bertindak dengan sangat tegas dan terus bertambah jumlah personilnya; pihak yang berjuang demi pengakuan serta pengindahan hak-hak yang sampai saat ini diinjak bisa memakai situasi untuk memperjelaskan kepada dunia luar bahwa memang mesti bertindak dan memaksa supaya mereka

punyai keluhan didengar dengan serius. Siapa lagi yang berkepentingan? mungkin masih ada, namun terdapat begitu sedikit informasi yang dapat dipercaya untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai peristiwa ini. Hanya jelas: insiden ini menunjukkan dengan tajam adanya suatu konflik horisontal. Yang menonjol bahwa selama aksi protes berjalan begitu banyak dibiarkan. Apakah betul bahwa tidak dapat mengendalikan apa-apa? Kenapa suatu kebebasan aksi yang begitu besar?

Makin kami berpikir, makin terasa kebutuhan akan suatu penelitian yang obyektif betul. Kalau mau bahwa situasi itu tidak akan terulang kembali kita perlu kejelasan mengenai apa yang sudah terjadi; hanya kalau begitu tindakan-tindakan preventif dapat ditetapkan dan diambil. Pembiaran adalah opsi terakhir! Namun demikian ada kesan bahwa banyak dibiarkan, mungkin juga karena tidak tahu mau mulai di mana. Pada awalnya KNPB dituding – suatu pola yang mulai menjadi lazim – namun pada 30 September 2019 polisi menyatakan bahwa bukan penduduk asli menyebabkan kekacauan itu. Maka, bukan KNPB. Maka, siapa? Apakah kita perlu memikirkan pelaku dari luar Lembah Balim? Sambil mendengar cerita yang sangat menyedihkan mengenai pembunuhan terhadap dokter dari Tolikara muncul indikasi bahwa kelompok yang beroperasi pada saat itu tidak dapat diidentifikasi oleh masyarakat setempat. Situasi yang serba kabur ini bisa menjadi tanah yang subur untuk saling mencurigai dan suatu konflik horisontal di segala tingkat.

Insiden-insiden di pelbagai tempat lainnya (Yahukimo, Oksibil, Boven Digoel, Tolikara, dan Puncak) memberikan tanda bahwa kerusuhan disertai tindakan kekerasan cenderung menyebar kemana-mana di wilayah pegunungan. Apakah akhirnya masalah spesifik diskriminasi dan kelakuan rasis menjadi ‘momentum’ untuk mengangkat ke permukaan segala ketidakadilan yang pernah dialami, entah di manapun di Papua? Pengalaman yang negatif dapat ada kaitan dengan pernah kehilangan anggota keluarga, kehilangan tanah leluhurnya, kehilangan kekayaan alam, kenyataan marginalisasi ekonomis, penguasaan –ekonomis maupun administratif– oleh migran, pelanggaran hak-hak asasi manusia, diskriminasi publik dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya, ets. Pertanyaan

yang penting tadi masih merupakan suatu pertanyaan, namun bukan tak mungkin bahwa semua gerakan sekarang ini dipicu oleh insiden-insiden rasis di Jawa Timur.

Bisa dinantikan bahwa perhatian besar akan diberikan kepada penyaluran para migran yang mau berangkat; hal ini bukan hanya di Wamena, namun juga di Oksibil dan misalnya Dekai (Yahukimo) di mana sekarang hampir tidak ada migran lagi. Fokus pada 'evakuasi para migran' juga menjadi tema pokok dalam update harian oleh MenkoPolHukum bersama Kapolri yang disiarkan TV nasional. Selama minggu yang lalu buat publik luas di Indonesia 'perkara Papua' menjadi identik dengan 'nasib dan evakuasi migran'. Yang tidak diberikan perhatian adalah 'evakuasi lokal' orang asli Papua; orang-orang yang meninggalkan segalanya di Wamena dan pulang kampung dengan harapan menemukan damai di situ. Perhatian besar bagi evakuasi para migran juga membuat banyak pengungsi internal di Nduga pusing karena berpikir: "siapa peduli dengan nasib kami?"; sudah lebih daripada satu tahun ribuan orang Papua mengungsi ke hutan, lari keluar dari kampungnya karena ancaman suatu operasi militer yang menyebabkan terusirnya mereka dari kampung halamannya sejak akhir 2018.²⁸

Juga peristiwa di Jayapura-Abepura perlu diberikan perhatian seperlunya. Aksi dari mahasiswa-exodus adalah sesuatu yang baru. Tidak terlalu mengherankan ketika disadari bahwa mereka setelah pulang kurang dapat suatu tempat di mana bisa merasa betah; kurang tahu mau ke mana; mau menginap di mana, mau makan di mana? dan bagaimana kelanjutan studinya? Banyak tinggal bersama teman-mahasiswa dari wilayah mereka yang berasrama di sekitar Jayapura-Abepura. Sekaligus mereka merasa perlu mengorganisir diri adalah sebagai kelompok dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu upaya mereka membuka suatu "posko" di mana semua dapat melaporkan diri adalah masuk di akal. Bahwa inisiatif itu akhirnya berujung kekerasan yang mematikan (5 orang mati) dan perlakuan ratusan mahasiswa secara tidak manusiawi tidak dapat

²⁸ Bdk laporan mengenai keadaan mereka serta korbannya sebanyak 182 orang: <https://asiapacificreport.nz/2019/08/05/at-least-182-dead-in-papuan-displacement-camps-says-aid-group/>.

diramalkan pada pagi hari itu. Kenapa menjadi kejadian yang buruk ini? Siapa dapat menjelaskannya?

Melalui aksi mahasiswa eksodus ini beberapa aspek lainnya muncul: **Pertama**, dengan adanya kelompok mahasiswa-eksodus ini terdapat suatu kelompok aktor yang baru; mereka telah memiliki cukup banyak pengalaman keorganisasian; bertahun-tahun mereka hidup di luar Papua, mengorganisir diri dan menyelenggarakan aksi-aksi sejak sekitar 1980; biasanya di bawah nama organisasi induknya AMP (Alliansi Mahasiswa Papua). **Kedua**, aktor yang baru ini, kemungkinan besar, ingin terus memprofilir diri serta mengembangkan suatu hubungan kerjasama – suatu bentuk yang positif, harapan kami – dengan aktor koordinator tunggal sampai saat ini yakni BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa); **Ketiga**, kelompok ini telah kehilangan kepercayaan dalam pemerintahan setempat; dari satu segi karena Gubernur serta MRP pada awalnya memanggil mereka, sedangkan sekarang ini Gubernur mengingatkan mereka untuk kembali ke tempat studi sebelumnya, dan kalau tidak, mereka diancam beasiswanya dibatalkan. Selanjutnya kenyataan bahwa tidak ada seorang pejabat tinggi pun dari pemerintahan yang mengunjungi mereka sewaktu dianiayai di kompleks Brimob, juga tidak akan membantu memulihkan kembali kepercayaan mereka pada pemerintahan di Papua.

Jumlah tersangka di Papua naik terus. Terlepas dari kritik yang tetap atas cara penangkapan²⁹ serta perlakuan di tempat tahanan, tetap juga kritik yang tajam menyangkut diskriminasi. Yang dimaksud: kenapa di Papua sekian orang Papua ditangkap, sedangkan tidak dicari dengan serius siapa-siapa sebenarnya di belakang segala kerusakan di Jayapura, siapa di belakang penembakan yang mematikan di Deiyai, siapa di belakang insiden-insiden pembunuhan oleh kelompok milisi serta kelompok yang berteman dengannya? Dalam sepucuk surat terbuka kepada Presiden³⁰ keluhan yang mendasar mengenai diskriminasi itu masih diangkat dengan sangat jelas.

Yang menonjol juga bahwa di Wamena akses pada internet ditutup

29 <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2111082019ENGLISH.pdf>.

30 Surat Terbuka Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua, 1 Oktober 2019.

mulai jam 12.30 hari peristiwa mematikan itu. Boleh jadi bahwa telah menjadi jelas apa yang sudah kami nantikan, yakni bahwa setiap saat ada kejadian ‘tindakan tutup internet’ akan menjadi ‘hal rutin’. Sudah tentu alasannya yang diberikan adalah ‘menghindari berita hoax’; namun setiap orang yang masih mampu berpikir sendiri akan meragukan kebenaran alasan itu dan menduga bahwa alasan yang benar ada untuk menghindari bahwa akan ada berita ke ‘luar’, dan untuk melumpuhkan komunikasi intern masyarakat di tempat³¹.

Pada suatu acara terbuka serta ramai sana-sini ada ‘pernyataan kesepakatan damai’ yang ditandatangani, seperti yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2019 di Jayapura. Pernyataan sejenis juga ditandatangani di Wamena, satu-dua hari setelah peristiwa 23 September 2019. Lazimnya pernyataan-pernyataan ini disusun oleh sekelompok pejabat, termasuk perwakilan dari adat dan agama. Pernyataan demikian mempunyai arti karena mungkin membantu untuk meredakan emosi sementara waktu, namun sudah tentu tidak membawa suatu solusi; apalagi dampaknya sering terbatas pada suatu seremonial saja. Kadang-kadang juga dipakai untuk melegitimasi pola pengoperasian instansi keamanan. Pernyataan-pernyataan demikian masih kekurangan dukungan komunitas di akar rumput, karena ‘bukan mereka punyai’. Untuk itu perlu langkah-langkah lainnya.

Sambil berefleksi atas ‘langkah-langkah menuju suatu solusi’, perlu diakui bahwa masih kurang terdapat kegiatan ke arah itu. Pemulihan ketenangan secara represif tidak merupakan suatu solusi tetap; hal demikian sudah agak disepakati kita semua. Namun demikian, pendekatan itu yang dipimpin Kapolri bersama Menkopolkam masih dapat perhatian penuh secara nasional. Pada saat ini sebenarnya instansi-instansi keamanan adalah instansi tunggal yang menentukan kebijakan di Papua, kesan kami. Masih berapa lama lagi?

Sangat urgen bahwa inisiatif-inisiatif baru diambil menuju suatu solusi yang lebih tetap. Perlu solusi yang mendukung masyarakat asli Papua

31 Lihat JUBI 25-26 September 2019, perlumpuhan internet sebagai alat represif.

untuk keluar dari lingkaran kedudukan termarginalisasi di segala tingkat. Artinya sejumlah aspek yang penting: kebijakan demografis; kebijakan ekonomis yang mengangkat kepentingan manusia di atas kepentingan investasi ekonomi Negara; kebijakan keamanan yang mengutamakan nilai hidup bersama dan meninggalkan kekerasan represif; akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan tanpa diskriminasi; dan menghilangkan pola korupsi.

Pemerintah setempat sebenarnya mesti menyibukkan diri dengan hal ini secara otonom dan melibatkan instansi-instansi kemasyarakatan dalam proses penetapan kebijakan itu. Juga buat para lembaga keagamaan ada tugas yang besar: mereka bisa menjadi pelopor dengan membina secara pastoral pada komunitas orang beriman masing-masing. Mencari dan mengembangkan bentuk kontak serta membagi pikiran antar-etnis dan antar-agama, menyangkut pertanyaan: bagaimana selanjutnya? Mereka juga perlu mengambil jarak dari segala acara yang seremonial melulu. Kepentingan untuk mengantisipasi atas 'konflik horisontal' yang sudah begitu nyata; siapa berkedudukan struktural yang lebih baik untuk tugas demikian daripada lembaga-lembaga keagamaan? Inilah harapan kami!

Syukurlah masih ada beberapa lembaga sipil (LSM-LSM) yang bersedia untuk sibuk memikirkan apa yang perlu dibuat. Mereka pun sering perlu mengakui bahwa mereka tidak dapat membuat lebih daripada memberikan bantuan kepada siapa saja yang menjadi korban segala peristiwa akhir-akhir ini. Sekaligus mereka coba menyeimbangi informasi publik dengan mengumumkan informasi yang faktual dari penelitian serta observasi mereka. Pekerjaan mereka hebat betul, secara khusus dari koalisi (KMSP) yang tidak mau tahu lelah! Patut dipuji!

Suatu titik terang harapan selama minggu terakhir ini adalah inisiatif dari Presiden untuk mencari berdialog dengan 'yang seberang', yakni: ULMWP, KNPB dan Benny Wenda. Menarik juga kekacauan yang terjadi akibat inisiatif ini. Moeldoko (Kepala Staf Presiden) menyatakan di CNN Indonesia, pada 25 September 2019, bahwa Presiden – atas saran kuat sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat – hendak membuka suatu dialog dengan pihak lawan di Papua karena hanya dengan cara demikian

akhirnya permasalahan di Papua dapat diatasi.

Pendekatan ini berkontras tajam dengan pernyataan Wiranto tanggal 24 September 2019 yang menolak segala bentuk pertemuan “karena bertemu berarti mengakui ULMWP”. Mungkin – menurut Wiranto – bisa ada suatu pertemuan non-formal, namun tidak dengan pemerintah Indonesia. Dia menolak untuk menanggapi pertanyaan para wartawan untuk menjelaskan pertemuan non-formal macam apa? Dia hanya menekankan sekali lagi bahwa ULMWP, KNPB, dan (mungkin juga) AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) adalah penggerak-penggerak utama di belakang kerusuhan di Papua. Apakah mulai kelihatan suatu perbedaan sikap yang makin nyata antara Presiden dan Menkopolhukam?

Ketegangan sekitar even-even internasional seperti Sidang Umum PBB di New York dan di Geneva juga masih muncul. Kemungkinan Indonesia ‘kehilangan muka’ di kalangan internasional ternyata masih menjadi keprihatinan besar para petinggi Negara. Hal ini menjadi jelas dalam keterangan pers pada 23 September 2019. Menkopolhukam didampingi Kapolri dan Panglima TNI menerangkan bahwa kejadian-kejadian di Papua sekarang ini ada hubungan dengan Sidang Umum PBB di New York dan sidang khusus Komisi HAM PBB di Geneva. Pendek kata: semuanya ini direncanakan (oleh Beny Wenda dkk) untuk menarik perhatian komunitas internasional pada Papua dan segala pelanggaran HAM yang terjadi disitu”.

Inilah berarti juga bahwa pemain utama di Papua adalah KNPB; ternyata setiap kepala polisi di tingkat manapun telah memahami visi MenkopolhuKam demikian, maka tidak mengherankan bahwa suatu pertemuan damai dan non-politik sejumlah mahasiswa di Timika dibubarkan polisi dengan alasan: “diatur oleh KNPB”. Pola berpikir demikian juga nyata di Jayapura, Wamena, Manokwari dan Sorong. Dengan kata lain teori dari pihak keamanan sudah dikembangkan dan disosialisasikan, namun sekaligus dibiarkan bahwa tudingan ini tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang nyata. Selama pola ini dipertahankan, segala sengsara di Papua masih jauh dari selesai.

Catatan terakhir menyangkut peningkatan perhatian atas masalah yang sebenarnya di Papua di kalangan non-Papua. Gejala ini dapat dibaca

dalam ‘daftar desakan’ yang disampaikan dalam protes mahasiswa di Jakarta³²; para mahasiswa protes secara aktif sejak satu minggu lebih dan protes ini pada pokoknya ditujukan pada sejumlah usulan undang-undang yang mau diratifikasi oleh DPR RI. Namun mereka punyai ‘daftar desakan’ yang juga mencantumkan unsur yang langsung berkaitan dengan keadaan di Papua.

‘7 pokok yang urgen’ yang dicatat di bawah judul “*Reformasi dikorupsi; Rakyat bergerak*”. Tujuh desakan sbb: [1] Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasarakatan, RUU Ketenagakerjaan; mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA; mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; [2] Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, [3] Tolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil; [4] Stop militerisme di Papua dan daerah lain, Bebaskan tahanan politik di Papua segera; [5] Hentikan kriminalisasi aktivis; [6] Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan & Sumatera yang dilakukan korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya; [7] Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM; termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan; pulihkan hak-hak korban segera.

Di tengah derasnya protes di Jakarta dan memanasnya tensi politik nasional, tersiar kabar para pimpinan aktivis dari ULMWP dan KNPB yang ditahan di Jayapura dan ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba dipindahkan ke Kalimantan Timur, di mana mereka akan menjalani sidang pengadilan.³³ Inilah menjadi kabar buruk bagi masyarakat Papua, bahwa mereka akan berada jauh dari perhatian masyarakat Papua. Artinya, jarak yang jauh dan diluar pandangan atau perhatian, hampir mustahil diberikan bantuan hukum, dan mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Jayapura, 4 Oktober 2019

³² Jakarta, 24 September; komunikasi internal.

³³ https://seputarpapua.com/view/8703-persidangan_pantolan_knpb_dan_ulmwp_dipindahkan_ke_kalimantan_timur.html.

BAB 8

KERUSUHAN WAMENA DAN PELANTIKAN JOKOWI

Insiden kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019 lalu terus mendapatkan banyak perhatian Pemerintah di Jakarta. Para petinggi pemerintahan, dari Menteri, Panglima, hingga Kapolri, turun ke Wamena untuk mengamankan situasi, menurunkan tensi konflik, dan menjamin konflik tak meluas. Bagian ini mencatat berbagai dinamika itu selama beberapa minggu pada Oktober 2019. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, yang didampingi oleh Kapolri Tito Karnavian tiba di Wamena pada minggu awal Oktober 2019, dan mengumpulkan sejumlah tokoh dan pihak-pihak yang berpengaruh, termasuk dari kalangan pembela hak asasi manusia setempat.

Pertemuan-pertemuan itu dilakukan di sejumlah tempat, baik di Wamena maupun di Jayapura, bahkan juga di Jakarta. Dampak dari pertemuan itu bisa jadi menurunkan tensi konflik dan mencegah konflik baru, namun pertemuan ini tak melahirkan jalan penyelesaian dari pokok persoalan rasisme dan konflik itu sendiri. Kesan kuat, pertemuan tersebut adalah seremonial, dan tak berdampak langsung bagi masyarakat Papua yang menjadi korban. Konflik dan kerusuhan beberapa daerah di Papua itu, dalam konteks politik, memberikan tanda situasi memanas menjelang pelantikan Presiden RI terpilih, Joko Widodo. Upaya-upaya meredam konflik itu juga untuk mengamankan dan menjaga momen politik nasional itu. Dan, pelantikan presiden itu pun berlangsung lancar pada 20 Oktober 2019. Pelantikan Jokowi memunculkan harapan dan optimisme Tanah Air. Namun, kurang dirasakan di Tanah Papua. Bahkan, kabar tak menggembirakan saat diumumkan menteri-menteri yang membantu Jokowi, ada beberapa yang 'cacat moral' dengan Papua dan hak asasi manusia.



Massa aksi siswa-siswi yang duduk di Halaman Perkantoran Pemda Jayawijaya. Terlihat Beberapa Kantor Pemda Jayawijaya yang terbakar, 23 September 2019.
Dok: Rizal Lany_SKPKC FP



Rekaman Peristiwa

Munculnya aksi demo besar anti rasisme di Jayapura pada September lalu berujung kepada tindakan kepolisian yang melemparkan tuduhan pihak-pihak di balik aksi yang kemudian diwarnai keriuhan dan anarkis. Kepolisian menuduh ULMWP dan KNPB pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan itu. Maka, sejumlah aktivis dan pimpinan dua organisasi itu ditangkap, ditahan, dan selanjutnya diproses hukum ke pengadilan.

Kabar yang cukup mengejutkan datang dari Kepolisian Daerah Papua. Pada 4 Oktober 2019 tujuh orang aktivis dan pimpinan dari ULMWP dan KNPB yang diputuskan sebagai tersangka kasus makar dipindahkan dari Jayapura ke luar Papua, yaitu di Kalimantan Timur. Tindakan kepolisian daerah Papua ini segera diprotes oleh para kuasa hukum dari tujuh orang tersebut. Menurut kuasa hukum tersangka, cara pemindahan ini melanggar segala peraturan resmi dan dianggap tidak sah. Walaupun mendapatkan protes keras, para tahanan ini tetap dipindahkan ke pulau Kalimantan.

Situasi tegang dan memanas di Tanah Papua sebagai akibat dari aksi-aksi melawan rasisme, ternyata mendapatkan respon dari kelompok lain di luar Papua. Pada awal Oktober 2019 kelompok yang berniat 'jihad' telah tiba di Jayapura. Mereka adalah anggota 'Jemaah Tabligh', yang berafiliasi dengan 'Front Jihad Islam' (FJI). Kehadiran dan keberadaan mereka mengusik ketenangan dan membuat ketakutan di masyarakat Papua.

Para pimpinan pemerintah di Jakarta mulai mengunjungi kota Wamena, pasca peristiwa tragis itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Kapolri Tito Karnavian mengunjungi Wamena pada 8 Oktober 2019. Kedua perwakilan pemerintah ini melihat langsung kondisi kota Wamena sesudah kerusuhan, dan menyelenggarakan pertemuan dialog dengan masyarakat. Pertemuan itu juga dihadiri oleh kalangan aktivis dan pembela HAM Papua, Theo Hesegem. Menurut Theo, yang tinggal juga di Wamena, pertemuan itu sangat mengecewakan karena tidak ada kesempatan dialog sama sekali. Tidak dapat mengungkapkan pendapatnya dengan bebas; hanya tiga orang yang sudah diseleksi untuk bersuara 'atas nama masyarakat'. Tanggapan Theo diamini dan

digarisbawahi banyak peserta pertemuan itu.³⁴ Setelah di Wamena, keesokan harinya pertemuan serupa diselenggarakan di kota Timika.

Sementara itu penyelidikan kepolisian terhadap kerusuhan dalam peristiwa tragis di Wamena mulai disampaikan ke publik. Kepolisian telah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan itu. Polisi mengumumkan sekitar 14 orang yang terlibat kerusuhan di Wamena ditetapkan sebagai tersangka. Pada 22 Oktober 2019 jumlah tersangka kasus kerusuhan Wamena bertambah menjadi 19 orang. Polisi mengumumkan 15 orang telah ditangkap dan empat orang masih dalam pencarian.³⁵ Polisi hanya mengumumkan jumlah tersangka, namun identitas orang-orangnya tidak dibuka ke publik. Bila didata hingga Oktober 2019 ada sekitar 99 orang tersangka yang sedang ditahan di seputar peristiwa konflik rasisme ini, baik yang terlibat kasus perusakan atau anarkis maupun kasus makar.

Penahanan orang-orang Papua yang dijadikan tersangka dalam peristiwa protes dan aksi anti rasisme mendapatkan kritik dan sorotan dari beberapa pihak. Sejumlah orang, termasuk pejabat pemerintahan daerah setempat, menuntut supaya para tersangka yang berhubungan dengan peristiwa di Deiyai pada 28 Agustus 2019 lalu dibebaskan, karena mereka sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang tidak sah, namun hanya menjadi korban kerusuhan itu.³⁶

Situasi konflik dan gejolak yang terus terjadi di Tanah Papua memunculkan wacana untuk penyelesaian konflik dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia melalui lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Wacana pembentukan KKR ini mendapatkan dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur Lukas Enembe mendorong agar dibentuk lembaga KKR, dan ia meminta Universitas Cenderawasih untuk memikirkan dan merancang Komisi tersebut. Untuk membentuk KKR perlu ada keputusan dari Presiden.³⁷

³⁴ JUBI 9-10 Oktober 2019.

³⁵ Lihat, <https://papua.antaranews.com/berita/509868/tersangka-kasus-kerusuhan-wamena-bertambah-menjadi-19-orang>.

³⁶ JUBI 14-15 Oktober 2019.

³⁷ JUBI 11-12 Oktober 2019.

Selain wacana KKR, wacana penyelesaian Papua juga dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan kepada media yang bersedia untuk bertemu dengan pihak atau organisasi politik seperti ULMWP. Desas-desus kesediaan Presiden bertemu ULMWP ditanggapi oleh ULMWP yang mengungkapkan tidak adanya berkeberatan, namun ada persyaratan bahwa referendum menjadi pokok diskusi dan supaya pihak netral (internasional) yang menjadi fasilitator pertemuan itu. Kedua persyaratan itu merupakan dua pokok ‘pembahasan panas’ dalam kalangan pemerintah pusat di Jakarta.

Tak hanya pemerintah pusat yang turun dan membuat pertemuan-pertemuan di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga ke Papua terkait konflik dan situasi yang terjadi di Tanah Papua. Pada 14 Oktober 2019, Komisioner Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan aktivis HAM, aktivis mahasiswa dan tokoh agama dan adat di Jayapura. Perwakilan setempat menjelaskan tentang situasi yang dihadapi dan mendesak Komnas HAM untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik segala kejadian di Papua. Sudah nyata bahwa terjadi hal-hal yang aneh, termasuk ‘membiarkan tindakan anarki dan jatuhnya korban’; ini sudah di luar batas-batas nalar, sulit dipahami, mengingat jumlah personil keamanan yang ada di lapangan sangat banyak.³⁸

Akhirnya pada 20 Oktober 2019 terselenggara seremoni inaugurasi Presiden Joko Widodo yang sah menjabat Presiden Indonesia pada periode kedua, 2019-2024. Seluruh seremoni dijaga sangat ketat oleh pihak keamanan; ternyata ada yang takut bahwa bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat banyak protes selama minggu-minggu terakhir ini di Jakarta. Tiga hari kemudian, pada 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengumumkan kabinet pemerintahan, yang ditunggu-tunggu akan ada kejutan-kejutan atau ‘surprises’.

³⁸ JUBI, 16-17 Oktober 2019.

Catatan dan Uraian Sepintas

a. Pemberitaan yang menyesatkan

Selama bulan-bulan terakhir pemerintah pusat menjaga terus-menerus supaya tidak ada berita palsu (hoaks) yang disebarluaskan, dan di Papua akses internet diblokir. Dalam kerangka ini cukup menarik untuk mendengar bahwa pada awal Oktober *BBC* dan *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) menemukan suatu kampanye media yang dijalankan di Indonesia untuk melawan, memutarbalik berita-berita mengenai Papua dengan menjelaskan agenda Indonesia yang ‘sebenarnya’. Sejumlah *media accounts yang palsu* ternyata ada kaitan dengan suatu perusahaan media di Jakarta, namanya “InsightID”, yang mengeluarkan uang sangat banyak demi kampanye itu. Tujuannya: mempengaruhi opini di tingkat internasional, secara khusus berhubungan dengan perkembangan di Papua. Untuk itu mereka mengandalkan ‘fake’ (palsu) Twitter dan Facebook accounts.³⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak sadar mengenai hal itu. Siapa yang mengatur kampanye berita-berita ini? Heran juga Menkominfo tidak tahu sedangkan mereka begitu rajin melumpuhkan internet di Papua karena ‘berita hoaks’!

b. Mempertanyakan Keadilan Negara

Semakin sering ditanyakan “siapa sebenarnya pemicu aksi anarkis di Papua?”. Atau, “apa artinya ‘negara hukum’ dewasa ini?”, kalau dengan begitu mudah segala macam peraturan hukum diabaikan. Pertanyaan terakhir agak sering muncul akhir-akhir ini ketika orang ditangkap dan ditetapkan sebagai ‘tersangka’, lebih-lebih ‘tersangka makar’. Ternyata orang begitu mudah dituduh dan kelompok sasaran utama: anggota KNPB dan ULMWP.

³⁹ <https://www.rnz.co.nz/news/world/400776/papua-unrest-social-media-bots-skewing-the-narrative>.

Kesan kuat bahwa bukan investigasi yang teliti mengenai fakta berkaitan dengan ‘siapa di belakang segala aksi’ sebagai dasar penangkapan, melainkan suatu pengandaian keterlibatan dari ‘siapa-siapa yang sudah didaftar sebagai pelawan negara’. Juga cara beroperasi sewaktu memindahkan sejumlah tersangka penting ke Kalimantan Timur – menurut para ahli hukum – sama sekali tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku. Kenyataan demikian dengan cukup jelas diangkat, namun kesannya percuma saja. Kapolda secara singkat menyatakan bahwa proses di Jayapura akan membawa bahaya, dan “kalau polisi bilang bahwa berbahaya, memang ada bahaya”. Semua yang bertanya diandaikan mesti menerima penjelasan sederhana itu. Maka, pertanyaannya adalah semua peraturan hukum yang berlaku sebenarnya untuk siapa?

Dengan demikian perlahan-lahan muncul suatu kehilangan kepercayaan mengenai ‘hukum dan keadilan’ yang sangat memprihatinkan. Hal itu juga diangkat oleh media.⁴⁰ Secara khusus kesimpulan komentar redaksi JUBI sangat mengesankan sekaligus memprihatinkan kita semua: *“Tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan pula kini para pemimpin Papua yang semua orang Papua. Melanjutkan ketidakadilan atas nama keadilan dan hukum.”*⁴¹

Dalam pertemuan dengan wakil-wakil Komnas HAM di Jayapura keprihatinan tadi terungkap dengan jelas. Secara khusus suasana misterius sekitar “sejumlah hal yang tidak normal”, seperti “pembiaran aksi anarkis sewaktu demonstrasi 29 Agustus di Jayapura”; seperti kenyataan bahwa aksi anarkis ini ternyata sudah direncanakan dengan sangat efektif; untuk itu ada indikasi yang jelas: persediaan katapult dan kelereng dalam jumlah besar guna menghancurkan kaca-kaca sambil berjalan, dan juga penyediaan bom-bakar (bom molotov). Ini semuanya diatur oleh siapa? Dan kenapa tidak ada reaksi atas semuanya ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendesak.

⁴⁰ JUBI, 18-19 Oktober 2019, hal.2.

⁴¹ Memang baru ini, akhir September, baik pimpinan polisi maupun pimpinan tentara diserahkan kepada orang asli Papua. Kesannya bahwa pengalihan tugas pada mereka tidak berarti banyak, malahan dapat mempersulitkan untuk mengangkat kenyataan serta fakta atau kejadian yang tidak beres.

Sejumlah pertanyaan yang sama dapat diajukan berhubungan dengan kejadian di Deiyai pada 29 Agustus 2019 – 9 orang tewas dan banyak yang terluka dan di Wamena pada 23 September 2019; jumlah orang tewas – angka resmi – 33 orang, namun kemungkinan besar angka sebenarnya lebih kurang 43 orang, dan ratusan orang mengalami luka-luka.

Faktanya bahwa sangat sedikit diketahui mengenai adanya investigasi yang dilakukan yang memenuhi persyaratan dasar, sedangkan dikatakan bahwa para pelaku langsung diketahui, yakni: KNPB dan ULMWP. Perlahan-lahan muncul dugaan bahwa di belakang semuanya ini, mulai dengan insiden rasis di Surabaya dan Malang, ada suatu skenario yang tidak hanya pada masalah rasisme, melainkan punyai satu tujuan: mematikan segala bentuk perlawanan – separatisme – di Papua. Dengan demikian pula dapat dimengerti penambahan personil keamanan dalam jumlah sangat besar yang begitu cepat; suatu ‘aksi pendudukan’ Papua atas nama ‘keamanan’ dan ‘penegakan hukum’.

Para peserta pertemuan dengan Komnas HAM mendesak Komnas HAM untuk membuka misteri ini, karena segala pernyataan dari pihak resmi sampai saat ini tidak membantu. Sehari setelah pertemuan Komnas HAM muncul berita bahwa memang Komnas HAM telah meminta suatu investigasi yang jelas mengenai segala kejadian di Wamena (23 September 2019). Pada saat itu pihak polisi tidak dapat dihubungi (media) untuk memperoleh tanggapannya atas permintaan ini.

c. Aspek-aspek Pasca Konflik

Sesudah konflik ada pergerakan para pihak untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan untuk meredam emosi, menumbuhkan saling percaya, dan mendorong hubungan normal antar warga masyarakat. Pada 19 Oktober 2019, misalnya, ada pertemuan yang diselenggarakan oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat) di Wamena, yang juga dihadiri Kapolda dan Pangdam. Pada kesempatan itu orang asli Papua meminta maaf kepada para migran atas apa yang terjadi dan menyengsarakan kehidupan para migran.

Kesempatan itu juga dipakai oleh wakil-wakil ‘paguyuban etnis’ untuk mengucapkan terima kasih pada orang Papua asli dan untuk selanjutnya mengusulkan sejumlah pegangan kebijakan demi keamanan bersama di masa mendatang.

Kelihatan kedudukan para migran menjadi lebih kuat sesuai kejadian 23 September 2019. Kenyataan demikian juga terungkap dalam inisiatif oleh paguyuban-paguyuban etnis baru-baru ini untuk bertatap muka dengan Presiden dan menyarankan supaya pemekaran diadakan di Papua sesuai dengan tujuh wilayah budaya yang tradisional. Inisiatif para migran ini tidak diterima baik oleh masyarakat asli Papua, dan menekankan supaya para migran perlu tahu diri dan tidak perlu campur tangan dalam hal-hal adat orang Papua.

Rangkaian pertemuan tersebut dianggap penting, namun ada hal ‘membingungkan’, seperti dalam sejumlah seremoni yang gayanya religius serta pertemuan doa yang mempunyai arti dalam proses memulihkan kembali keadaan yang normal. Misalkan pertemuan di Wamena ada beberapa unsur rasa yang membingungkan: [1] seakan-akan para warga asli Papua kurang lebih dimasukkan dalam peranan ‘penjahat utama’ yang patut meminta maaf; [2] menonjol bahwa para wakil ‘paguyuban’ tidak pernah merasa terpenggil untuk meminta maaf atas jatuhnya sekian banyak korban karena aksi-aksi yang mematikan dari pihak “kelompok Nusantara” dan sejenisnya; [3] instansi-instansi keamanan cenderung memakai pertemuan-pertemuan semacam ini untuk memperkuat kedudukannya serta melegitimasi operasionalnya; [4] pemerintah sipil masih tetap hanya reaktif saja, beraksi setelah terjadi sesuatu; [5] dalam sejumlah kalangan gereja masih banyak berdoa dan berpuasa (agak seremonial) namun adanya kurang insiatifnya untuk mengarahkan perkembangan sekarang ini secara aktif dan positif.

Sementara juga masih perlu dicatat kehadiran kelompok Muslim yang mempunyai hubungan erat dengan ‘jihad’ meresahkan masyarakat di Papua. Kehadiran mereka dinilai membuat ketakutan masyarakat biasa. Dalam suatu pernyataan resmi, Kapolda mengatakan bahwa mereka tidak ada niat buruk, mereka ada untuk menyemangati teman-teman Muslim

dalam imannya. Mereka akan tinggal selama empat bulan. Pernyataan polisi itu sebenarnya tidak menakutkan masyarakat biasa. Syukurlah seorang tokoh Islam di Wamena, Ketua Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan bahwa kami di Papua tidak membutuhkan 'jihad' dari luar; kami sendiri dapat mengatur kami punya persoalan. Selanjutnya tidak banyak terdengar mengenai kehadiran kelompok itu maupun kegiatannya. Kesunyian itu juga tak selalu membuat berita baik.

d. Pemerintahan Jokowi Jilid II

Pelantikan Presiden periode kedua – lima tahun - pemerintahannya sudah dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Pidatonya pada saat itu menimbulkan cukup banyak pertanyaan. Dalam seluruh pidato itu tidak ada sekata pun mengenai korupsi, rasisme, keadilan, kebenaran, kebudayaan, harmoni etnis, separatisme; seluruh ceritanya mengenai ekonomi melulu; hal-hal yang lain ternyata kalah 100% dari fokus ekonomi yang eksklusif. Tidak mengherankan juga bahwa kritik dari pihak LSM langsung muncul. Esok harinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan suatu komentar yang sangat pedas, dan mereka tidak ragu untuk menyamakan pendekatan ekonomi pemerintahan Jokowi Jilid II dengan periode sebelumnya, yang tak menempatkan masalah hak asasi manusia pada visi dan misi Presiden.

Pidato Presiden Jokowi untuk Jilid II ini telah mencerminkan program kerja yang membuat masa depan Papua terlihat suram. Ada beberapa hal yang menjadi catatan: [1] Kemungkinan besar tidak akan ada ruang untuk dialog, apalagi untuk dialog yang dimediasi pihak netral (internasional); tidak akan ada penanganan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi di Papua; [2] Masuknya para investor terus didorong dengan segala akibat negatif yang sebenarnya sudah cukup bisa diketahui Presiden: kehilangan tanah masyarakat tradisional, marginalisasi komunitas asli Papua bertambah terus, sedangkan [3] Perusahaan-perusahaan akan semakin menentukan segala kebijakan di Papua; [4] Perlindungan intensif segala kepentingan ekonomi dengan peluang derajat tinggi pelanggaran hak

asasi manusia serta kriminalisasi pribadi orang yang kritis atau melawan; [5] Pertumbuhan penduduk yang cepat bagi migran, meningkatkan posisi minoritas demografis masyarakat asli Papua; [6] Peluang besar adanya insiden-insiden kekerasan sebagai ungkapan rasa tidak berdaya dan frustrasi yang semakin terasa secara mendalam, dan dengan demikian peluang besar munculnya konflik horizontal menjadi sangat riil.

Barangkali koreksi atas skenario politik itu masih dapat diharapkan ketika sejumlah posisi menteri telah terisi dan kebijakan sektoral akan dikembangkan. Hal demikian masih sulit untuk dilihat. Susunan kabinet baru sudah cukup mengagetkan. Wiranto diganti dengan seorang yang keahlian hukum tidak diragukan, maka mungkin akan ada perubahan haluan sedikit di Menkopolhukam. Di samping itu mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sangat membingungkan dan sulit dimengerti, mengingat 'track record'-nya di bidang HAM, secara khusus juga di Papua. Yang mengejutkan juga adalah perpindahan mantan Kapolri Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemungkinan besar agendanya sebagai Kapolri akan dibawa masuk dalam Kementerian Dalam Negeri. Setelah ditunjuk sebagai menteri, ia sudah mengumumkan akan mengunjungi Papua bersama Jokowi dalam beberapa hari lagi. Dan sudah tentu, masa depan Papua masih akan penuh dengan ketegangan dan teka-teki!

Jayapura, 24 Oktober 2019

BAB 1

EKSES POLITIK USAI KEMELUT MEREDA

Dalam bulan November 2019 persoalan rasisme masih menjadi bahan perbincangan publik. Narasi-narasi tentang penolakan rasisme dan kasus-kasus yang muncul dalam aksi penolakan itu tetap diangkat ke publik, bahkan narasinya membekas kuat, terutama ekses negatif dari rentetan peristiwa di seputar aksi-aksi itu.

Pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan Ma'aruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Joko Widodo mengumumkan. Menteri-menteri yang dipilih, sebagian dekat dengan isu-isu Papua, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo – orang yang turut bertanggung jawab dalam kasus pembebasan sandera di Mapenduma 1996. Pasca dilantik, sejumlah petinggi pemerintahan dan keamanan memutuskan untuk selama beberapa hari berkantor di Tanah Papua. Di sisi lain, pihak keamanan melakukan langkah-langkah hukum bagi para aktivis yang dianggap berada di balik aksi-aksi antirasisme. Mereka ditahan, ditetapkan sebagai tersangka.

Persoalan yang dicatat dalam bagian ini yang penting yaitu ekses politik pasca aksi-aksi antirasisme, yaitu lobi-lobi dan pertemuan pemerintah dan orang-orang dan tokoh masyarakat Papua yang diajak oleh pemerintah di Jakarta, yang kemudian memunculkan polemik soal pemekaran provinsi Papua. Peristiwa di Wamena pada September 2019, juga masuk dalam catatan ini. Tragedi kemanusiaan di Wamena itu telah menghancurkan budaya dan hubungan sosial. Hal penting yang dicatat adalah pelaku atau aktor di balik kerusuhan tersebut, hingga kini tidak terungkap.





Hengky Hilapok, seorang tahanan politik Papua yang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 11 Februari 2020.
Foto: Dokumentasi Komasi Papua.

Rekaman Peristiwa

Hal yang sangat terlihat setelah pelantikan Presiden serta pengumuman susunan kabinet adalah kunjungan Presiden Jokowi bersama Mendagri, Tito Karnavian ke Papua pada 27-29 Oktober 2019. Selama tiga hari ini sejumlah tempat dikunjungi: Sorong, Pegunungan Arfak, Manokwari, Wamena dan Jayapura. Kebanyakan kegiatan bersifat agak seremonial – termasuk peresmian jembatan Jayapura–Holtekam dan kesempatan untuk menerangkan sedikit program Pemerintahan Jokowi Jilid II. Tanggapan pada umumnya: ‘boleh saja, namun tidak akan menyelesaikan permasalahan sebenarnya di Papua’.

Salah satu topik yang diangkat dengan cukup jelas selama kunjungan ini adalah keterbukaan ‘Jakarta’ untuk pemekaran Provinsi Papua. Mereka, Presiden dan Mendagri, mengaitkannya dengan pertemuan 61 wakil Papua dengan Presiden di Jakarta (10 September 2019) dan pertemuan di Wamena, 28 Oktober 2019, dimana ‘masyarakat’ meminta pemekaran. Perlu dicatat bahwa kedua pertemuan yang menjadi referensi pemekaran ini dinilai oleh banyak orang sebagai pertemuan yang ‘tidak mewakili rakyat Papua’.⁴²

Selama ini baik MRP (Majelis Rakyat Papua) maupun DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) memberitahukan bahwa mereka pada saat ini tidak mendukung rencana pemekaran (DPRP) dan sama sekali tidak setuju (MRP).⁴³

Peristiwa lain terkait aksi protes terhadap rasisme adalah pemindahan tempat tahanan sejumlah peserta aksi yang ditetapkan tersangka dan ditahan terkait tragedi di Deiyai. Ada sembilan tahanan yang dipindahkan dari Enarotali dan Nabire ke Jayapura pada 1-3 November 2019. Dan, lagi-lagi pemindahan ini terjadi tanpa memberitahukan kepada kuasa hukum para tahanan. Kuasa hukum dari para tahanan itu, Gustaf Kawer, baru mendapatkan informasi pemindahan itu pada 4 November 2019 melalui seorang kenalan tahanan. Ketika Gustaf Kawer meminta keterangan dari

42 Dengan kata lain: mereka lebih mewakili pendukung daripada masyarakat Papua.

43 Bdk. <https://nasional.kontan.co.id/news/ditolak-majelis-rakyat-papua-mendagri-akan-buka-dialog-soal-pemekaran>. Lihat juga, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/05/14101121/mrp-tak-merekomendasikan-pemekaran-papua-ini-alasannya>.

polisi, ia tidak diberikan jawaban yang memadai. Tampaknya polisi tidak berniat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sebelum pemindahan para tahanan kasus Deiyai, Pastor Santon Tekege, Pr mengangkat suaranya dengan menyatakan bahwa kesembilan tahanan ini sama sekali tidak boleh ditahan, karena mereka sama sekali tidak terlibat dalam aksi melawan hukum pada kejadian di Deiyai. Mereka bukan ‘pelaku kejahatan’ melainkan mereka ‘korban’. “Kalau polisi mau tahan 9 orang ini karena demo melawan rasisme, sebaiknya polisi menahan kita semua”. Ini bukan pertama kali bahwa protes senada ini didengar; juga Bupati telah menggarisbawahi pernyataan yang sama, namun pesan mereka diabaikan oleh pihak yang berwajib.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, menyarankan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dibentuk suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. Saran ini sama dengan rencana yang terungkap Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa minggu lalu; inisiatif dari Menkopolhukam disambut baik dan diharapkan saran ini akan ditindaklanjuti secara konkrit.

Kepentingan serta mendesaknya penyelesaian pelanggaran HAM di Papua juga diangkat dalam kegiatan peluncuran buku *Memoria Possionis No. 37* yang berjudul “Papua Bukan Tanah Kosong”, karya SKPKC Fransiskan Papua pada 25 Oktober 2019 bertempat di Aula Kampus STFT Fajar Timur, Abepura. Buku yang sama juga diluncurkan di Jakarta, pada 15 November 2019.

Sementara waktu kesannya bahwa cukup banyak pertemuan diselenggarakan di Jakarta antara pemerintah pusat dan pejabat-pejabat tinggi Papua. Tujuannya: memperoleh persetujuan untuk pemekaran provinsi. Kelihatan para Bupati yang terlibat sudah dengan senang hati menyetujuinya dengan restu Gubernur. Yang menonjol juga adalah sikap masa bodoh Wakil Gubernur Papua yang menyatakan “selama orang Papua masih senang, silahkan saja”.⁴⁴

44 Bdk. Lihat JUBI 11-12 Nov 2019, hal. 10. “Selama orang Papua senang, silahkan Papua dimekarkan.”

Manuver-manuver di Jakarta disoroti di Papua dan kritik menjadi semakin keras.⁴⁵ Dengan jelas diangkat pula bahwa cara ini berlawanan dengan prosedur yang semestinya, karena tidak mempedulikan MRP dan Gubernur yang mempunyai hak pertama untuk menentukan jadi tidaknya pemekaran tersebut.⁴⁶

Seorang pemimpin gereja yang lazimnya sangat vokal, Pdt. Socrates Yoman, yang menjabat sebagai Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, menerbitkan sepucuk surat terbuka kepada semua Bupati dan pemimpin lain yang terlibat dalam soal pemekaran ini. Mereka dinilai sebagai ‘pencari kepentingan pribadi’ dan ‘tidak berniat berurusan dengan rakyat’. Surat yang tajam ini sangat kontras dengan pernyataan Administrator Apostolik di Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC (Uskup Keuskupan Ambon) yang pada 26 Oktober 2019 menyuarakan dukungannya atas pembentukan Provinsi Papua Selatan. Hal ini membuat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Papua⁴⁷ dalam rapat tahunan (1-3 November 2019) menyusun sepucuk surat kritis mengenai situasi di Papua serta dampak sangat negatif pemekaran dan mengirimkannya kepada para Uskup di Papua.

Pada 28 Oktober 2019 “Aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat” menyelenggarakan suatu demo di Surabaya. AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) juga mengambil bagian dalam demo itu. Menarik bahwa demo ini dimaksudkan untuk mengangkat sejumlah pokok permasalahan di Indonesia; pokok-pokok yang diangkat seperti pemberantasan korupsi, namun juga seruan untuk menghentikan segala kriminalisasi aktivis-aktivis yang damai, dan membebaskan semua tahanan politik tanpa persyaratan baik di Papua maupun di Jakarta. Juga dituntut supaya pasukan militer ditarik dari Papua. Inilah suatu tanda bahwa ‘kepedulian mengenai Papua’ sudah menjadi bagian dari agenda nasional buat para mahasiswa di Jawa. Karena yang turun aksi demo sebagian besar orang non-Papua.⁴⁸

45 Bdk. Lihat JUBI 4-5 November 2019, “Pemekaran Propinsi untuk siapa?”; JUBI, 6-7 November 2019, “Rakyat mana yang menginginkan Provinsi Papua Selatan?”

46 Paragraf 76, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, No. 21, 2001.

47 “SKP Papua” adalah sarana koordinasi antara SKP-SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) yang ada di masing-masing keuskupan di Papua.

48 Bdk. Lihat JUBI tgl. 30-31 Oktober 2019.



Tahanan politik Papua sedang menunggu proses sidang perdana di PN Balikpapan, Kalimantan Timur, 11 Februari 2020. Foto: Dokumentasi Komasi Papua.



Tahanan politik Papua yang dipindahkan di Kalimantan Timur saat mendapatkan kunjungan. Foto: Komasi Papua.

Trend yang sama terlihat ketika “Solidaritas Demokrasi untuk Rakyat” melakukan demonstrasi di Yogyakarta pada 11 November 2019.⁴⁹

Pada 30 Oktober 2019, Amnesty International Indonesia memberikan perhatian lagi untuk nasib para pengungsi Nduga. Amnesty berpendapat bahwa pemerintah Indonesia berpikir terlalu kaku, yakni berpegang pada ‘ideologi kaku’ dan hanya sibuk dengan slogan “NKRI harga mati”. Dengan kata lain: hanya melihat soal separatisme di Papua. Sekaligus Amnesty mengungkapkan kekecewaannya mengenai pernyataan MenkopolhuKam, Mahfud MD yang berpendapat bahwa separatisme di Papua lebih berbahaya daripada radikalisme di Indonesia. Dengan pola berpikir semacam ini tidak akan ada keterbukaan dan ruang untuk dialog. Hal ini sangat menyedihkan!

Di tingkatan internasional, ICP (International Coalition for Papua) menerbitkan suatu update mengenai situasi HAM di Papua selama kurun waktu Juli-September 2019.⁵⁰ Laporan itu mencatat beberapa poin, antara lain: ada lebih dari 1500 pengungsi; 19 pembunuhan/eksekusi di luar ranah hukum; 4 serangan kepada wartawan; lebih dari 60 korban kekurangan pelayanan kesehatan; 78 kasus penganiayaan; 2 kasus serangan pada pembela HAM; 22 tersangka ‘makar’ (art. 106 & 110); 4 kasus pelanggaran hak atas informasi; 750 penangkapan sewenang-wenang kasus non-politik; dan 437 penangkapan kasus politik.

Kabar dari Jakarta terkait tahanan kasus makar mengenai proses pra-peradilan yang diajukan oleh tim pembela hukum. Pada 11 November 2019 di Jakarta hakim menunda berjalannya proses ‘pra-pengadilan’. Penundaan ini selama 2 minggu karena pihak terdakwa, Polda Metro Jaya Jakarta, tidak menghadiri sidang. Hal ini dikhawatirkan bahwa melalui strategi penundaan ini seluruh proses pra-pengadilan kelak tidak akan diadakan sama sekali.

49 Bdk. Lihat JUBI dd 13-14 Nov 2019, hal. 3.

50 Bdk. www.humanrightspapua.org (ICP).

Catatan dan Uraian Sepintas

a. Pemekaran dan Potensi Konflik

Catatan kami selama kurun waktu ini didominasi persoalan pemekaran. Pemekaran bukan sesuatu yang asing. Beberapa tahun lalu pemekaran sudah dipromosikan dengan argumentasi pokok: segala pelayanan pemerintah didekatkan pada rakyat. Pemekaran ramai dijalankan di mana-mana. Tahun 2014 suatu penelitian diadakan guna mengetahui sejauh mana program pemekaran telah berhasil atau tidak. Hasil penelitian itu sangat mengagetkan: hanya 23% dinyatakan berhasil! Dengan kata lain 77% gagal! Berdasarkan data ilmiah itu pemerintah memutuskan untuk memberlakukan suatu moratorium mulai tahun 2014: tidak akan ada pemekaran lagi selama moratorium ini berlaku. Sebenarnya sampai hari ini berlaku. Maka, rencana pemekaran di Papua sebenarnya melanggar moratorium yang sedang berlaku.

Maka, sangat mengagetkan bahwa tiba-tiba ‘pemekaran’ (ternyata suatu ‘produk yang begitu jelek’) dinilai sangat cocok untuk Papua. Presiden maupun Mendagri bersedia untuk membuat suatu pengecualian! Menurut Mendagri Tito Karnavian, pembentukan Provinsi Papua Selatan pasti akan jadi, sedangkan pembentukan Provinsi Papua Tengah masih membutuhkan penelitian lanjut. Kenapa pemerintah pusat begitu nekad membuat pengecualian terhadap Papua? Adakah agenda tersembunyi dari kebijakan itu?

Menurut Mendagri Tito Karnavian, informasi data dari BIN dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemekaran. Tito tidak memberikan data informasi BIN itu secara detail. Juga dalam wawancara dengan wartawan dia tampak menghindari, dan sekaligus memberikan kesan bahwa tidak perlu informasi selain info BIN ini. Sikap Mendagri disambut dengan banyak kritik; ditekankan oleh banyak pihak bahwa suatu keputusan mengenai rencana pemekaran perlu didasarkan sejumlah unsur penelitian ilmiah yang menjelaskan derajat ‘feasibility’ (kelayakan) program pemekaran itu. Penelitian perlu dikaitkan dengan keadaan kependudukan, peluang

ekonomi, sumber pendapatan, sumber alam dan sumber daya manusia, dan sebagainya, bukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BIN.

Mendagri menerima segala kritikan tersebut tetapi terkesan tidak mengubah pernyataan dan sikapnya. Tampaknya bagi Mendagri 'keamanan menjadi prioritas utama dan segala yang lain menjadi kepentingan nomor dua atau tiga'. Sekali-kali ia memberikan kesan bahwa nanti masih akan ada dialog, namun bunyinya tidak terlalu serius, karena ia menyatakan bahwa Provinsi Papua Selatan akan jadi dan anggaran untuk itu sudah tersedia; hal yang terakhir itu juga dibenarkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Pemekaran yang lain masih perlu menunggu anggaran. Sudah tentu: keamanan dan anggaran adalah tolak ukur utama untuk kebijakan di Papua.

Pemekaran ini diusulkan pertama kali ketika pertemuan Presiden dengan '61 wakil-wakil Papua' (10/9/2019). Menurut penilaian umum di Papua perwakilan 61 orang itu tidak ada bobot dan bukan merupakan 'perwakilan dari Papua', dan ini dipandang sebagai bagian dari rekayasa. Ke-61 orang tersebut diseleksi oleh BIN dan mereka hanya menyuarakan 'pesan sponsornya'. Maka, mungkin pada saat itu pemekaran sudah ada di agenda BIN dan dinilai sebagai suatu bagian skenario penjinakkan perlawanan di Papua yang dijalankan saat ini. Kelak (28/10/2019) 'keinginan pemekaran' juga terungkap dalam pertemuan-pertemuan di Wamena yang diselenggarakan pihak keamanan. Sekali lagi bobot perwakilan rakyat dalam kedua pertemuan ini dapat dipertanyakan. Sekali lagi pemekaran adalah 'pesan sponsor' bukan keinginan rakyat Papua.

Yang menarik perhatian juga adalah gaya pembahasan pemekaran ini; "Jakarta" membahasnya seakan-akan mereka memutuskan hal ini, sedangkan dalam Otsus tercatat dengan sangat jelas bahwa suatu pemekaran hanya dapat diadakan dengan persetujuan Gubernur/Bupati dan MRP/DPRP. Maka, juga tidak mengherankan bahwa akhir-akhir ini ada kunjungan ramai ke Jakarta dan ternyata mulai berhasil; artinya para Bupati/Gubernur mulai mengutarakan persetujuannya. Perkembangan demikian disambut dengan 'kritik keras' dari Papua. Namun kritikan ini sepertinya tidak membuat para pejabat tinggi bingung atau gelisah.

Lalu MRP menekankan kembali bahwa mereka tidak setuju sama sekali! Pendapat ini didukung oleh banyak orang, baik secara pribadi maupun yang berorganisasi.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan: [a] dalam seluruh proses penentuan pemekaran ini tidak ada lagi unsur ‘pola demokrasi’, dan itu sangat memprihatinkan; [b] pemerintah pusat – Mendagri sebagai fasilitator utama – telah berhasil menjauhkan masalah rasisme dari perhatian publik dan masyarakat dengan memindahkan perhatian ke pemekaran sebagai isu utama; [c] pemerintah pusat juga menciptakan bahaya menuju suatu konflik horizontal karena rencana pemekaran ini. Konflik melalui pertumbuhan kekacauan dan potensi kekerasan di dalam masyarakat secara internal, orang Papua lawan orang Papua, Elit Papua lawan Rakyat Papua dan selanjutnya potensi konflik dengan para migran.

b. Kepastian Hukum

Dalam pemantauan perkembangan selama bulan-bulan terakhir ini kami sudah menyinggung beberapa kali soal ‘kekaburan’, antara lain kekaburan informasi, kekaburan investigasi, terutama berhubungan dengan sejumlah kejadian. Kekaburan itu menyangkut hal yang sangat penting dan mendasar seperti pertanyaan: “Siapa sebenarnya pemicu segala aksi anarkis di Tanah Papua? Apa artinya ‘negara hukum’ kalau banyak peraturan hukum diabaikan oleh para instansi penegak hukum? Informasi mana yang sebenarnya masih bisa dipercaya?”⁵¹ Kami akan menyoroti pertanyaan-pertanyaan ini dengan merefleksikan tiga fakta: [1] tragedi kemanusiaan Wamena, 23 September 2019; [2] pemindahan para tahanan dari Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur; dan [3] penundaan praperadilan kasus makar di Jakarta.

51 Bdk. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/28/wamena-investigation-what-the-government-did-not-tell-us.html>.

1. Wamena, 23 September: Tragedi Kemanusiaan

Mengenai peristiwa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya akhirnya ada data-data yang baru berkat suatu penelitian oleh tim wartawan gabungan TEMPO dan JUBI. Belum ada jawaban-jawaban yang jelas, namun informasi yang jelas tersedia merupakan indikasi bahwa kejadian tersebut merupakan suatu ‘rencana’. Kejadian tersebut merenggut nyawa kurang lebih 44 orang.⁵²

Tentang siapa di belakang rencana itu, memang belum jelas sama sekali. Tak ada penyelidikan yang serius tentang pelaku dan alasan penembakan sejumlah orang. Sekarang sudah ada 11 korban penembakan yang dikonfirmasi, sedangkan 6 korban lagi yang meninggal karena tertembak belum bisa dikonfirmasi.⁵³ Hanya pasukan keamanan yang pada hari itu membawa senjata api, sedangkan masyarakat lainnya membawa busur, panah, dan parang.

Seluruh cerita yang dipublikasi oleh TEMPO-JUBI, sangat berbeda dengan informasi yang sampai saat ini disalurkan oleh pihak resmi. Apakah masih akan ada suatu investigasi lanjutan dan penegakan hukum dalam kasus ini? Atau semuanya perlahan-lahan dihilangkan dari pemantauan dan perhatian kita semua?

2. Pemindahan Tahanan

Pemindahan sejumlah tahanan dari Jayapura ke Kalimantan Timur dan dari Enarotali dan Nabire ke Jayapura tanpa prosedur hukum yang jelas. Hal ini membuat kita semua berprihatin. Terlepas dari segala konsekuensi praktis seperti kemungkinan sanak saudara (keluarga) tidak bisa mengunjungi para tahanan dan kerepotan para penguasa hukum, pemindahan ini dinilai melawan prosedur dan peraturan hukum. Instansi-instansi yang mengklaim diri sebagai instansi ‘penegakan hukum’ ternyata dengan begitu mudah meremehkan

⁵² Lihat Jubi, 25-30 Oktober 2019.

⁵³ Bdk. Lihat Jubi, 28-29 Oktober 2019.

peraturan-peraturan yang berlaku; dan malahan kesan kuat bahwa mereka kurang mempertanggungjawabkannya. Mereka terlihat santai saja, sedangkan para penasehat hukum (pembela resmi para tahanan) merasa tidak berdaya sama sekali.

3. Penundaan Sidang Praperadilan di Jakarta

Suatu indikasi tambahan mengenai pengaburan negara hukum adalah perkembangan sekitar proses praperadilan yang diminta oleh tim pembela hukum 6 aktivis yang ditahan di Jakarta. Sidang proses praperadilan aktivis Surya Anta dan kawan-kawan semestinya dimulai pada 11 November 2019, namun oleh hakim ditunda karena pihak Kepolisian Metro Jakarta, tidak datang menghadiri sidang pada tanggal itu. Proses praperadilan ini memberikan perhatian pada unsur prosedur, seperti waktu orang ditangkap dan dinyatakan ‘tersangka’. Karena cukup banyak hal tak memenuhi kaidah-kaidah atau peraturan yang sesuai hukum, maka tim pembela memutuskan untuk mempraperadilankan Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta.

Penundaan sidang praperadilan ini barangkali menjadi suatu strategi untuk mencegah proses praperadilan dijalankan oleh pengadilan. Hal ini bisa dipandang sebagai strategi karena jika seluruh naskah dan proses substansi atau berkas telah dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, dengan sendirinya proses praperadilan batal. Selain itu, praperadilan ini juga memberikan konsekuensi jika kepolisian mengalami kekalahan dalam praperadilan sehingga kasusnya gugur dan tak bisa dilanjutkan.

Jayapura, 15 November 2019

BAB 10

TAHANAN POLITIK, FOBIA 1 DESEMBER, DAN POLITIK PEMEKARAN

Bagian ini mengungkapkan situasi terkait proses hukum di pengadilan terhadap orang-orang Papua yang ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan makar dalam peristiwa aksi demonstrasi pada Agustus dan September 2019 lalu di beberapa kota di Tanah Papua, seperti di Jayapura, Deiyai, dan di Jakarta. Proses peradilan itu berjalan cukup berliku, panjang dan kurang profesional.

Peristiwa lain mengenai peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 2019. Ada tekanan yang begitu kuat dari pihak keamanan, sehingga berbagai agenda perayaan secara damai pun, seperti doa dan ibadah tak mendapatkan izin. Selain itu, situasi 1 Desember tak menunjukkan gejala berarti karena para pihak yang menjadi penggerak dalam perayaan itu diperiksa polisi.

Situasi politik terkait Papua terus mendidih, dan tak menunjukkan tensinya mereda ketika pemerintah pusat mendukung dan mendorong pemekaran provinsi Papua, yang sesungguhnya telah dihentikan atau dimoratorium. Nampaknya, melalui isu pemekaran provinsi, ada niat memecah konsentrasi haluan dan aspirasi politik orang-orang Papua dari pertengahan November hingga awal Desember 2019.



Surya Anta, Ambrosius Mulait, Apes Tabuni - tiga tahanan politik Papua di Jakarta menjani sidang di PN Jakarta Pusat., 17/2/2020. Foto: Michael Himan.



Rekaman Peristiwa

Pada 15 November 2019, peluncuran buku *Memoria Passionis 2018* yang berjudul “*Papua Bukan Tanah Kosong*” oleh SKPKC Fransiskan Papua di Jakarta. Peluncuran berbentuk diskusi panel diselenggarakan oleh SKPKC bersama JPIC OFM Jakarta dan Vivat Jakarta. Diskusi ini menghadirkan LIPI dan Komnas HAM sebagai narasumber dalam diskusi tersebut. Tujuannya untuk menyampaikan kepada publik yang lebih luas agar dapat memahami permasalahan di Papua yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh media nasional sering kali kurang memadai untuk memahami situasi yang terjadi di Papua. Masalahnya memang kompleks dan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sejarah, ekonomi maupun pelanggaran hak-hak asasi manusia. Berbagai persoalan itu tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ekonomi, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan suatu pendekatan yang lebih tepat. Peluncuran buku ini mendapatkan perhatian pers nasional.⁵⁴

Pada pertengahan November 2019 proses-proses pengadilan terhadap para tahanan berkaitan dengan kerusuhan selama Agustus-September dimulai di Jayapura, termasuk proses pengadilan yang menyangkut tersangka ‘makar’. Dalam proses di pengadilan, Bazoka Logo, Kepala Biro Politik ULMWP di Papua – tersangka makar – melalui kuasa hukumnya dalam ‘eksepsion pleidoi’-nya menjelaskan bahwa tuduhan terhadap kliennya merupakan suatu kriminalisasi. Bazoka memang secara “*qualitate qua*” (karena posisinya) terlibat dalam suatu demonstrasi damai yakni protes New York Agreement (1962) dan yang mendukung agenda konferensi dari Pacific Islands Forum (PIF). Dalam sidang lanjutan pada 14 November 2019,

54 Bdk. <https://tifanews.com/indez.php/2019/11/15/memoria-pasionis-masalah-kesehatan-di-papua-masih-belum-tuntas-teratasi/>.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/17580701/komnas-ham-dorong-pemda-papua-lebih-aktif-tangani-masalah-ham>.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/17405721/komnas-ham-seolah-semua-jawaban-persoalan-papua-bisa-tuntas-dengan-infrastruktur>.
<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1272679/peneliti-lipi-industri-mengubah-daya-tahan-tubuh-orang-papua>.
<https://www.google.com/amp/nasional.tempo.co/amp/1272653/skpkc-fransiskan-papua-anggaran-untuk-papua-tak-tepat-sasaran>.
 JUBI, 18-19 Nov, p.9: Pemekaran Provinsi di Papua Dinilai Hanya Memerparah Ketimbangan.

‘eksepsion pleidoi’ ini ditolak oleh hakim, maka proses akan dilanjutkan.

Pada akhir November 2019 dan awal Desember 2019 beberapa proses hukum di pengadilan sudah berjalan, termasuk para tersangka perusakan pada aksi demo pada 29 Agustus di Kota Jayapura, dan para tersangka kasus kericuhan saat aksi di Deiyai yang disidangkan di Nabire. Dalam kedua proses ini banyak hal yang diangkat dinilai tidak jelas, menyangkut prosedur penangkapan maupun isi tuduhan; juga sering saksi yang dijadwalkan tidak muncul, maka persidangan dihentikan dan ditunda. Para kuasa hukum kecewa dengan proses ini. Bahkan, Tim Pembela Hukum di Jayapura ‘walk out’ (4/12/2019) karena persoalan saksi. Pendek kata, dari pelaporan itu memberi kesan banyak hal yang tidak beres, maka dugaan bahwa para tersangka ditangkap secara sewenang-wenang semakin dibenarkan.

Ternyata apa yang sudah ditakuti memang benar.⁵⁵ Pada 18 November 2019, Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta sudah menyerahkan naskah lengkap mengenai enam tersangka makar di Jakarta kepada pihak Kejaksaan. Enam tersangka: Paulus Surya Ginting (Surya Anta), Isai Wenda, Charles Kosay, Ambrosius Mulait, Anes Danoo Tabuni and Arina Elopere. Mereka ditangkap karena mengibarkan bendera *Bintang Kejora* di depan Istana Merdeka di Jakarta pada 28 Agustus 2019. Dengan demikian proses praperadilan yang diminta para pembela atau kuasa hukum tidak akan berjalan lagi, karena proses hukum di kejaksaan yang terkait dengan materi atau kasus-kasus yang dituduhkan sudah berjalan, maka proses praperadilan otomatis batal. Namun, pada 4-5 Desember 2019 diadakan hearing dalam kerangka proses praperadilan.⁵⁶ Putusannya akan diambil sekitar 10 Desember 2019.

Kemudian, hal lain yang terus bergulir adalah tentang pemindahan para tahanan politik dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur. Para kuasa hukum di Papua masih berupaya untuk memulangkan ketujuh tersangka makar yang dipindahkan sepihak ke Kalimantan Timur

55 Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118101124-12-449218/berkas-lengkap-polisi-serahkan-surya-anta-ke-kejaksaan>.

56 Bdk. https://tirto.id/sidang-tapol-papua-ahli-jelaskan-soal-legalitas-penangkapan-emSd-https://kbr.id/nasional/12-2019/saksi_polisi_todongan_pistol_saar_tangkap_aktivis_papua/101551.html.

dan menggelar konferensi pers pada 11 November 2019.⁵⁷ Para kuasa hukum menjelaskan argumen-argumen mengenai peraturan-peraturan yuridis yang selama ini tidak diindahkan oleh kepolisian. Namun, pernyataan dan protes dari kuasa hukum tersebut nampaknya tak mengubah keputusan Polda Papua dan tetap menempatkan ketujuh tahanan politik di Rutan Polda Kaltim.

Lalu terkait dengan tahanan politik yang baru ini, sebuah laporan dipublikasikan oleh Forum Oikumenis Gereja Papua, yang isinya mencantumkan cukup banyak data konkrit tentang insiden-insiden di Jayapura dan penangkapan serta perlakuan terhadap para tahanan.⁵⁸

Sejalan dengan catatan-catatan di atas juga penting untuk diketahui bahwa *Papuans Behind Bars* telah menerbitkan suatu update mengenai para tahanan di Papua periode Januari 2018 – Oktober 2019⁵⁹ pada 20 November 2019. Selama 2018 tercatat 26 tahanan politik di Papua; sedangkan untuk tahun 2019 tahanan politik bertambah menjadi 77 orang, yang kebanyakan ditangkap selama bulan Agustus-September 2019. Laporan *Papuans Behind Bars* itu memberikan satu gambaran dan uraian yang cukup lengkap mengenai suasana ‘negara hukum’ di Papua dewasa ini.

Di tengah segala ketidakpastian hukum, KNPB Regio Lapago merayakan HUT ke-11 pada 20 November 2019 dan menyatakan bahwa KNPB akan melanjutkan perjuangan untuk memperoleh referendum bagi Papua agar bisa menentukan sendiri masa depan Papua. Untuk itu KNPB bermaksud memobilisir masyarakat guna mengadakan suatu pemogokan massal.⁶⁰

Persoalan mahasiswa eksodus masih belum terselesaikan. Kali ini mahasiswa eksodus yang ada di Kabupaten Dogiyai mengadakan protes kepada Bupati Dogiyai pada 18 November 2019 untuk menentang rencana pemekaran. Selain itu mereka meminta Bupati untuk membuka kemungkinan studi atau kuliah mereka dilanjutkan di universitas-

57 Bdk. <https://fransiskanpapua.org/2019/11/20/siaran-pers-kembalikan-7-tahan-yang-dikriminalisasikan/>.

58 Bdk. <https://awpaadelaide.files.wordpress.com/2019/11/report-on-violence-august-19-efpc-eng.pdf>.

59 Bdk. <https://www.papuansbehindbars.org/?p=3809>.

60 Bdk. Lihat CEPOS, 21 November 2019, hal. 12.

universitas yang ada di wilayah Pasifik; mereka tidak mau kembali ke Jawa. Ini pertama kalinya setelah insiden di Abepura (23/9/2019) bahwa kelompok 'mahasiswa eksodus' beraksi atas inisiatif sendiri.

Seorang anggota DPD RI, Herlina Murib, dalam kunjungannya di Tolikara, Kabupaten Yahukimo, menyarankan supaya pemerintahan Papua membuka peluang bagi 'mahasiswa eksodus' untuk melanjutkan studinya di Regio Pasifik. Pendapat yang disuarakan wakil rakyat itu bertolak belakang dengan sikap dari Kapolda Papua yang mendorong supaya semua mahasiswa kembali ke tempat studinya; polisi menjalankan suatu program untuk menakutkan para mahasiswa. Sampai saat ini hanya sekitar 300 mahasiswa yang menanggapinya secara positif; sebagian besar dari mahasiswa eksodus sulit untuk diyakinkan.⁶¹

Wacana pemekaran provinsi Papua terus bergulir dan menjadi 'topik panas'. Pernyataan dan sikap muncul dari dua orang yang berpengaruh dalam pemerintah pusat, yaitu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian. Wakil Presiden Ma'aruf menyatakan tidak bisa melakukan pemekaran karena moratorium masih berlaku. Menurutnya, kalau moratorium dibuka untuk satu (wilayah) tidak dapat menolaknya untuk yang lain. Masih ada tiga ratusan permohonan di meja; maka, pegang saja pada moratorium guna menghindari sengsara mendatang.⁶² Pernyataan tersebut disampaikan sesudah pertemuan antara anggota-anggota MRP dengan Wapres Ma'aruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian pada 28 November 2019.

Sementara itu pada 1 Desember 2019 Mendagri Tito mengeluarkan pernyataan bernada lain bahwa pelaksanaan pemekaran di Papua adalah soal adanya anggaran yang memadai; mungkin ini masih akan makan waktu, dan selama menunggu saat itu sejumlah persyaratan dapat dipenuhi secara tertulis.⁶³ Ada kesan bahwa di Merauke semua Bupati telah memberikan persetujuannya pembentukan Provinsi Papua Selatan.

61 Bdk. Lihat JUBI, 27-28 November 2019, hal.8.

62 Bdk. <https://nasional.republika.co.id/berita/q1ok23430/wapres-tegaskan-tidak-ada-pemekaran-di-papua>.

63 Bdk. <https://www.jubi.co.id/butuh-waktu-pemekaran-papua-bergantung-pada-kondisi-keuangan-negara/>.

Di tempat yang sama, pada 3 Desember 2019, perwakilan mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)⁶⁴ yang berasal dari lima kabupaten yang bersangkutan⁶⁵ berkumpul dan menolak secara bulat pemekaran provinsi. ‘Masih terlalu pagi; kami tidak siap’, maka alasan utama penolakan adalah menghindari “suatu marginalisasi masyarakat asli yang menghancurkan.”⁶⁶ Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi bersama dengan para mahasiswa dari Pegunungan Bintang kalau para pemimpin kabupaten-kabupaten tidak mengubah sikapnya.

Di tingkat nasional DPD RI telah membentuk suatu Panitia Khusus (Pansus) yang akan memperhatikan secara intensif permasalahan serta perkembangan di Papua. Panitia ini terdiri dari wakil-wakil rakyat Papua di tingkat nasional. Akhir November 2019, Pansus ini mengadakan kunjungan ke Papua dan selama kunjungannya mengundang ULMWP dan KNPB untuk bertemu. Kedua organisasi ini menolak undangan itu karena mereka nilai hal itu bisa menjadi satu trik untuk menangkapnya, dan di sisi lain ada dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebelum menggelar pertemuan. Dua persyaratan itu adalah membebaskan semua tahanan politik di Papua dan penarikan tentara dari Papua.⁶⁷ Dalam sepucuk surat terbuka Direktur Eksekutif ULMWP di Papua, Markus Haluk, merumuskan tanggapan serta sikapnya dengan jelas.⁶⁸ Pihak lain yang diundang Pansus untuk bertemu adalah Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pdt Beny Giyai.

Beny menjelaskan segala ‘masalah-masalah yang sebenarnya’ di Papua dalam suatu pernyataan panjang di media sosial (Facebook) pada 1 Desember 2019.

“Fobia 1 Desember” sudah mulai terlihat di sana-sini, dengan munculnya pernyataan-pernyataan mengenai kerusakan yang dapat terjadi pada perayaan 1 Desember, sebuah momen untuk merayakan hari kemerdekaan Papua. Pada perayaan 1 Desember 1961 untuk pertama

64 PMKRI = Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia – Vereniging Katolieke Studenten Republik Indonesia.

65 Ini kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian dari provinsi Papua Selatan yang baru.

66 Kesimpulan akhir konperensi pers: “Saya ulangi lagi bahwa OAP belum siap menerima hadirnya PPS (Provinsi Papua Selatan). Kami tak ingin menjadi hantu di negeri ini. Kami ingin menjadi tuan di negeri sendiri” (JUBI 6-7 Desember 2019, hal.6).

67 Bdk. Lihat JUBI, 27-28 November 2019, hal. 3.

68 Bdk. <http://papuabaronline.com/2019/11/27/sikapi-rencana-pansus-dpd-ri-ulmwp-payangkan-surat-terbuka/>.



Pemindahan Tahanan Politik Papua ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi headline Koran Jubi.
Foto: Repro SKPKC FP

kalinya bendera *Bintang Kejora* dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan *Hai Tanahku Papua* dikumandangkan. Perlu dicatat bahwa dalam pemakaian bahasa oleh instansi-instansi berwajib, perayaan 1 Desember diidentifikasi dengan 'HUT OPM'. Pengertian demikian tidak benar dan menyesatkan. Perayaan menyangkut suatu kejadian historis di mana identitas bangsa Papua untuk pertama kalinya diakui pemerintah kolonial Belanda: bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, dan perwakilan dalam parlemen sebanyak 50%.

Syukurlah masih ada suara yang mengajak supaya tidak bertindak berlebih-lebihan dan untuk menghentikan segala 'upaya membuat takut'. Sementara Kapolri memberitahukan bahwa pasukannya di Papua sudah cukup, yakni 7.000 (jumlah tambahan selama Agustus-September 2019), sedangkan Pangdam menyatakan bahwa tidak akan mengerahkan pasukan ekstra. Sedangkan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, menegaskan akan mengambil tindakan ekstra dan akan bertindak tegas



Para Tapol Papua di ruang tahanan pengadilan, menjelang sidang di PN Jakarta Pusat, 2/1/2020.
Foto: Michael Himan.



dan keras di mana saja hukum dilanggar. Menkominfo telah menyatakan tidak akan menutup akses internet di Papua pada 1 Desember 2019.

Berikut adalah aksi-aksi yang terjadi menjelang perayaan 1 Desember 2019 di sejumlah kota:

- Wali Kota Jayapura mengumumkan (20/11/2019) bahwa akan menyelenggarakan suatu acara khusus pada tanggal 1 Desember, yakni semacam ‘pembukaan resmi masa menuju Natal dan Tahun Baru’.⁶⁹ Dia mengajak semua untuk membuat hiasan Natal pada 1 Desember dalam setiap gereja, dan pada 1 Desember sore ada penilaian dan penghargaan yang akan dijalankan dalam pertemuan massal di Jayapura. Pendek kata itu menjadi aktivitas alternatif untuk mengisi peringatan 1 Desember.
- Pihak polisi mengadakan ‘aksi preventif’ dengan menangkap dan menginvestigasi orang yang mau mengajak masyarakat untuk menggelar acara doa bersama sebagai perayaan hari 1 Desember. Pada 26 November 2019 polisi menangkap Pilipus Robana, Sekretaris Jenderal Sonamapa (Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat) di kediaman mertuanya di Koya Barat, Jayapura. Pilipus diduga terlibat dalam menyebarkan undangan untuk acara doa bersama pada 1 Desember 2019 di Lapangan Trikora Abepura. Penangkapan juga terjadi di Manokwari terhadap 8 orang yang memiliki sejumlah bendera Bintang Kejora dan bahan-bahan untuk aksi demo. Pada 30 November giliran Markus Haluk dipanggil dan diminta keterangan selama 6 jam; permintaan keterangan dilanjutkan pada tanggal 1 Des; pada saat itu juga Edison Waromi dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan. Markus adalah Ketua Umum ULMWP di Papua sedangkan Edison adalah Ketua ULMWP Bagian Legislatif. Keduanya diizinkan pulang, namun diminta siap-siap jika dipanggil kembali untuk dimintai keterangan oleh kepolisian.
- Pada 30 November 2019 malam, sekitar 34 pendukung ULMWP ditangkap di Jayapura-Sentani. Sekitar 20 orang di antara mereka ditetapkan sebagai ‘tersangka makar’ karena rencana untuk

69 Bdk. Lihat Cenderawasih Pos, 21 November 2019, hlm 11. “1 Desember, Pemkot Gelar Gerbang Natal Port Numbay’.

menghadiri doa bersama di Lapangan Trikora Abepura. Di Merauke 4 anggota KNPB ditangkap. Di FakFak pada malam yang sama 54 orang ditangkap; 23 dari mereka juga ditetapkan tersangka kasus makar. Di Sorong juga sekitar 20 orang ditangkap dan 12 dinyatakan sebagai tersangka makar.

- Selama hari-hari yang sama, 29-30 November 2019 Papua mendapat kunjungan sejumlah petinggi pemerintahan dari Jakarta, antara lain Kapolri, Panglima TNI bersama Menteri Dalam Negeri. Mereka mengunjungi Wamena, Timika, dan Jayapura. Agenda mereka tidak terlalu jelas. Kapolri dan Panglima, katanya, mau memberikan semangat kepada anggota TNI Polri yang ditugaskan di Papua, sedangkan Mendagri menyatakan mau memeriksa persiapan PON 2020 di Papua, di antaranya di kota Timika. Hal yang mencuri perhatian banyak masyarakat adalah pertunjukan kekuatan (*show of force*) ketika para pimpinan itu tiba di Wamena, yang disambut oleh banyak pasukan. Kemudian di Timika diadakan pelatihan dropping 200 parachutis. Pihak keamanan di Wamena juga menyelenggarakan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) pada 30 November 2019 yang dihadiri oleh para pimpinan tersebut.⁷⁰ Selain itu ada pertemuan-pertemuan untuk membahas kondisi dan situasi, namun peranan pemerintah sipil di Papua dalam segala acara demikian sangat sedikit atau malahan sama sekali tidak kelihatan.
- Secara terpisah pimpinan pemerintah dari Jakarta yang berkunjung ke Papua adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selama kunjungannya, 29-30 November 2019, ia menggelar pertemuan di Jayapura dengan sejumlah organisasi dan sejumlah unsur pimpinan, antara lain Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Toni Wanggai, dan Ketua Barisan Merah Putih.
- Wakil-wakil lembaga keagamaan mengajak para umatnya untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan menjaga agar tidak merespon provokasi-provokasi. Selain itu warga juga diminta untuk menjaga ketenangan dan harmoni pada

⁷⁰ Lihat JUBI, 2-3 Desember 2019, hal. 22.

1 Desember, dan mengisinya dengan kegiatan yang biasa pada hari Minggu.

- Christian Warinussy, seorang pembela dan Advokat HAM Papua, mengajak pihak keamanan untuk menyadari bahwa tanggal 1 Desember merupakan suatu ‘hari sejarah yang penting.’ Maka, ia mengungkapkan agar pihak keamanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakannya. Polisi diminta untuk menunjukkan sikap penghormatan. Pesan senada disampaikan oleh Elsham Papua pada 30 November 2019 sambil mengingatkan kepada pihak keamanan bahwa kebebasan pengungkapan pendapat dijamin dalam dalam UUD Republik Indonesia. “Hormatilah sejarah bangsa Papua serta hak-hak yang dilindungi UUD yang Indonesia banggakan”.

Pada 1 Desember 2019 secara umum suasana di Papua nampak tenang. Nampaknya pihak polisi sudah berhasil mencegah pengungkapan isi hati bangsa Papua secara terbuka. Mungkin juga karena tanggal 1 Desember 2019 jatuh pada hari Minggu, hari di mana umat Kristen (Protestan dan Katolik) merayakan ibadah bersama di Gereja. Insiden terjadi di Gereja Katolik Paroki Gembala Baik di Abepura. Empat orang asli Papua menghadiri perayaan Ekaristi atau misa di Gereja dengan pakaian adat Papua, hanya mengenakan koteka dan pakaian tradisional serta membawa bendera Bintang Kejora.

Pada akhir perayaan mereka dipaksa oleh polisi untuk dibawa ke markas polisi, Polsek Abepura, yang sangat berdekatan dengan Gereja Gembala Baik. Di sana mereka diinterogasi, selanjutnya dibawa ke markas kepolisian di Jayapura untuk dimintai keterangan tambahan. Sesudah itu mereka diperbolehkan pulang dan tetap ada pemanggilan jika diperlukan.

Sedangkan di pedalaman Papua tentara menyerang kelompok TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di Kampung Timonikime, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya. Dalam peristiwa ini dua anggota TNPB tewas. Serangan ini menjadi titik awal pengungsian masyarakat di Distrik Balingga dan Ayumnati.

Peristiwa lain pada 1 Desember 2019 juga terjadi di luar Papua. Sekelompok mahasiswa Papua di Ambon menggelar aksi demonstrasi

yang menuntut menuntut referendum bagi Papua. Aksi demonstrasi ini kemudian dibubarkan oleh polisi. Di tempat lain, demo yang sama terjadi di kota Yogyakarta, yang kali ini dapat berjalan tanpa gangguan.

Catatan dan Uraian Sepintas

Salah satu aspek terpenting dari perkembangan-perkembangan dewasa ini adalah ‘makin kaburnya hukum dan pengadilan’. Adalah sangat memprihatinkan gaya memperlakukan peraturan-peraturan hukum akhir-akhir ini. Seakan-akan ada instansi (polisi, tentara) yang menempatkan diri ‘di atas hukum’. Apalagi mereka mengklaim diri sebagai ‘instansi penegak hukum’!

Sidang-sidang pengadilan yang sedang berjalan juga memberikan kesan mudah membuat kita putus asa; ternyata banyak peraturan dipermainkan dan ada indikasi nyata bahwa sejumlah saksi yang dipanggil oleh jaksa adalah saksi yang sangat membingungkan sampai kesannya palsu. Contohnya ada berita yang mengabarkan seorang saksi yang diandalkan untuk dua tersangka mengenai perbuatan pada dua peristiwa yang berbeda yang dijalankan pada waktu yang sama namun pada tempat yang berbeda.⁷¹ Juga upaya polisi Polda Metro Jaya Jakarta yang ‘menyabotase’ sidang praperadilan melanggar segala perasaan keadilan dan kebenaran. Di mana-mana Indonesia membanggakan diri sebagai ‘Negara Hukum’, namun dalam praktik sehari-hari kebanggaan ini tidak dibenarkan, dan kurang ada tanda bahwa pimpinan negara berupaya untuk menjaga supaya semua pelayan hukum tetap di jalur yang benar.

Bagi masyarakat biasa perkembangan ini sangat menakutkan karena sikap sewenang-wenang akan mengalahkan perlindungan hukum yang semestinya didapatkan. Padahal, telah dinyatakan oleh UUD 1945, yang menjamin hak kebebasan setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapatnya. Bahkan, setiap bangsa Indonesia mempunyai hak untuk berkumpul, memperingati saat-saat bersejarah yang penting, seperti peringatan 1 Desember yang menjadi sejarah penting bagi bangsa Papua.

71 Bdk. JUBI, 4-5 Desember 2019, hal. 1 dan sambungan pada hal. 26.

Apakah “Negara Hukum” sudah menjadi ‘masa yang lampau’?

Yang juga menonjol adalah frekuensi kunjungan dari ‘Jakarta’, oleh pejabat-pejabat yang sangat menentukan kebijakan di Papua. Suatu kunjungan pada prinsipnya tidak menjadi soal, namun kunjungan itu hampir tidak ada kaitan dengan para pejabat tinggi dalam pemerintahan setempat (daerah). Apa yang menjadi masukan oleh pemerintahan setempat dalam kunjungan-kunjungan ini? Kapan pemerintahan setempat diminta untuk turut memikirkan? Kapan mereka – pemerintahan setempat – diminta izin? Apalagi di wilayah yang ‘otonomi khusus’? Kesan kuat bahwa para pejabat tinggi Jakarta menentukan, mengatur dan melaksanakan sendiri program mereka.

Jayapura, 6 Desember 2019

BAB II

OPERASI MILITER DAN LUKA DAMAI NATAL

Pada pertengahan Desember 2019 para tersangka makar di Tanah Papua mulai menjalani proses hukum di pengadilan, termasuk tersangka makar di Jakarta. Proses pengadilan ini mendapatkan perhatian publik, di antaranya mengenai proses pengadilan yang berjalan kurang profesional.

Kehadiran pasukan dari Kepolisian dan TNI semakin mengusik kegelisahan masyarakat. Jumlahnya semakin bertambah, dan penyebaran pasukan meluas, hingga beberapa kabupaten di pegunungan Papua. Warga mengalami ketakutan dan trauma menjadi korban konflik dan kekerasan.

Seorang ajudan Wakil Bupati Nduga telah menjadi korban. Peristiwa ini menyulut kemarahan dan kekecewaan. Titik puncaknya, Wakil Bupati Nduga Wensius Nimiangge melepaskan jabatannya di depan publik dan disaksikan masyarakatnya. Simbol negara yang melekat dalam dirinya sebagai pejabat negara pun dilepaskan.

Konflik pun terus memanas. Hingga jelang Natal tiba tak ada tanda akan reda. Masyarakat Papua tak tenang menghadapi perayaan Natal. Para pemimpin dan tokoh agama di Tanah Papua menyerukan pesan damai dan keselamatan Natal, yang menyinggung realitas konflik dan politik yang dirasakan masyarakat Papua.

HARGAI TANAH ADAT
ORANG ASLI PAPUA

4. Stop Pendekatan
5. Stop Pemekaran
6. Negara Bertang
dan Kesehatan D
7. Menyelesaikan

Ko Tra Lup

STOP
MILITERISME

STOP
ILEGAL LOGG

Provinsi Dan Kabupaten Di Papua
gung jawab Terhadap Pemerataan Pendidikan
Di Tanah Papua
Persoalan Papua Melalui Dialog



Rekaman Peristiwa

Sejumlah sumber berita masih tetap menarik perhatian pada jumlah orang yang ditangkap dan ditahan dalam peristiwa ‘perayaan 1 Desember’. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 112 orang yang ditangkap, dan 50 orang di antaranya dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan makar. Maka pertanyaan di kalangan publik di Papua adalah apa kesalahan mereka hingga ditangkap dan dituduh makar?

Kasus hukum lain yang terpantau dalam media terkait proses hukum kasus demonstrasi antirasisme yang berujung rusuh. Dalam harian *Cenderawasih Pos*, 10 Desember 2019 memberitakan hal yang membingungkan terkait persidangan para tersangka perusakan di Jayapura pada aksi demonstrasi 29 Agustus 2019. Tim Pembela OAP (Orang Asli Papua) di Jayapura telah meminta hakim diganti karena tidak menghadirkan saksi pelapor tersangka pada 11 Desember 2019. Kemudian pengakuan yang menarik perhatian dari tersangka yang menyatakan dirinya dipukul oleh polisi dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁷²

Situasi persidangan di Jayapura rupanya juga tak jauh beda dialami oleh para tersangka makar di Jakarta. Hakim di Jakarta menolak praperadilan keenam tahanan ‘makar’ Papua dan pembela merasa bahwa hakim bias. Tim Advokasi Papua saat itu akan melaporkan hakim tunggal praperadilan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung karena dinilai bias dan mengada-ada terkait alasan penolakan.⁷³

10 Desember adalah Hari HAM Sedunia. Salah satu perayaan dan peringatan Hari HAM Internasional diselenggarakan oleh SKPKC Fransiskan Papua, bertempat di kompleks STFT Fajar Timur di Abepura. Perhatian utama diberikan kepada aspek “melawan lupa”. Begitu banyak pelanggaran telah terjadi dan kesannya bahwa semuanya dinilai ‘angin lalu’ saja. Penyegaran ingatan kita sangat dibutuhkan supaya kita bersama

⁷² Lihat juga JUBI 13-14 Des, hlm 1-2.

⁷³ Lihat CNNIndonesia, 11 Desember 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019121101206-12-455948/pengacara-surya-anta-cs-berencana-laporkan-hakim-ke-bawas-ma>.

‘melawan lupa’. Kasus yang sudah bertahun-tahun menjadi perhatian khusus adalah penembakan empat orang anak di Paniai 8 Desember 2014. Janji Presiden Jokowi pada 27 Desember 2014 lalu akan segera menyelesaikan kasus ini ternyata tak diselesaikannya hingga 5 tahun, masa jabatan sebagai presiden berlalu.

Pada 13 Desember 2019 Komnas HAM menjelaskan status penyelesaian kasus Paniai terkendala oleh ditolaknya penyelidikan terhadap Staf TNI. Ketidaksediaan TNI tersebut dimuat dalam pelaporan penyidikan oleh Komnas HAM yang diteruskan ke Jaksa Agung. Komnas HAM pun akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai itu.⁷⁴

Perayaan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2019 di Papua dicerai dengan dugaan intimidasi aparat keamanan (Brimob) terhadap kantor Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) di Manokwari.⁷⁵ Sekitar 15 anggota Brimob BKO Polda Maluku menduduki kantor LP3BH sejak pukul 06.00. Pihak kepolisian beralih tindakan ini upaya untuk pengamanan. Katanya, “Ini untuk mengamankan, bukan intimidasi. Kalau orang merasa diintimidasi dengan kehadiran Polisi, berarti dia diduga bermasalah. Kenapa mesti takut, kalau tidak salah?”

Kehadiran aparat keamanan di berbagai daerah di Papua telah mengusik ketenangan masyarakat Papua. Jumlahnya terus bertambah banyak sejak bulan Desember. Pada pertengahan Desember 2019 pasukan dari Kepolisian dan TNI didrop di beberapa kabupaten di Pegunungan Papua, antara lain di Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai.⁷⁶ Pasukan masuk kampung dan membangun atau mendirikan kamp. Di Intan Jaya disebutkan pasukan ada ‘kontak senjata’. Situasi ini menyebabkan warga Papua takut dan mengungsi, namun argumentasi pihak keamanan pasukan ini didrop supaya masyarakat merasa lebih aman, alasan yang berbeda dengan realitas yang terjadi.

74 JUBI 13-14 Desember 2019, hal 1 & 26 dan JUBI 16-17 Desember 2019, hal 2.

75 JUBI 13-14 Desember 2019, hal 21.

76 JUBI 18-19 Desember 2019, hal. 1-2.

Berhubungan dengan pengedropan pasukan ini, Polisi di Jayapura mengingatkan kepada orang yang mengangkat fakta (pengedropan pasukan) ini untuk hati-hati: ‘jangan menyebarkan bohong, akan dihukum’, dan dilanjutkan dengan peringatan: ‘walau benar, sebaiknya tidak perlu disebarluaskan; hati-hati memakai media sosial’.⁷⁷ Padahal itu bagian dari pengungkapan keprihatinan dan keresahan yang sedang dirasakan oleh warga yang mengalami trauma dengan kekerasan dan konflik. Pengalaman panjang tak ingin diulang, tetapi situasi ini tak bisa dihindari lagi, kembali mendengar kabar-kabar ‘perang’, seperti peristiwa dua anggota TNI yang terbunuh di Intan Jaya pada 18 Desember 2019 dan satu anggota TNI terbunuh dan 3 anggota mengalami luka-luka pada 20 Desember 2019.⁷⁸

Trauma dan luka itu benar-benar mengoyak hati masyarakat, ketika seorang sopir dan ajudan Wakil Bupati Nduga, Hendrik Lokbere ditembak mati oleh anggota TNI pada 20 Desember 2019. Ia tertembak saat dalam perjalanan ke Batas Batu untuk menjemput seseorang. Ketika berada di dekat tempat penjemputan, ia ditembaki oleh pasukan yang sedang beroperasi di wilayah tersebut.

Peristiwa kematian Hendrik Lokbere menyebabkan kemarahan dan kekecewaan sang Wakil Bupati Nduga. Tiga hari kemudian, 23 Desember 2019, Wakil Bupati Nduga Wensius Nimiangge melepaskan jabatannya sebagai Wakil Bupati di depan publik, disaksikan pihak keamanan dan masyarakat. Ia melepaskan jabatannya karena tidak mau lagi menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang membunuh warganya secara sewenang-wenang. Pengambilan sikapnya dipuji banyak orang, dan diremehkan oleh yang merasa ditantang oleh sikap keberanian Wakil Bupati ini. Misalnya, yang sangat menyakitkan hati banyak orang adalah tanggapan dari pihak Menkopolhukam yang menyatakan bahwa hal ini hanya semacam ‘manuver politik’ dan bahkan meragukan adanya jenazahnya atau pembunuhannya.⁷⁹

77 <https://en.antaranews.com/news/138335/police-rebuke-baseless-rumors-of-additional-troops-in-papuas-sugapa> (JUBI 18-19 Desember 2019, hal. 2).

78 Lihat, “Another soldier killed in gunfight with rebels in Indonesia’s Papua”, http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/20/c_138646552.htm.

79 Contoh: Menkopolhukam menuduh Wakil Bupati “of engaging ‘political maneuver’ by publicly declaring resignation and fabricating story about a fatal shooting”. See: <https://jakartaglobe.id/news/chief-security-minister-accuses-papuan-district-official-of-political-maneuver>.

Catatan dan Uraian Sepintas

Di penghujung tahun 2019, tepatnya pada pertengahan Desember, situasi di Papua didominasi oleh berbagai insiden kontak senjata di berbagai tempat di pegunungan dan perbatasan Keerom. Kontak senjata itu telah menyebabkan sejumlah korban. Paling tidak korban yang terpublikasi, antara lain di Intan Jaya tiga anggota TNI mati, tiga anggota terluka. Lalu di perbatasan Keerom satu anggota TNI mati dan satu anggota TNI terluka dalam kontak senjata pada 30 Desember 2019.⁸⁰ Sementara itu dilaporkan warga sipil yang turut menjadi korban meninggal dalam peristiwa kontak senjata berjumlah satu orang di Nduga dan seorang warga sipil di Yahukimo. Menurut Kapolda Papua selama tahun 2019 Polda Papua menangani 23 kasus kelompok bersenjata, yang telah memakan korban 10 orang anggota kepolisian dan 10 orang warga sipil.⁸¹

Adanya insiden-insiden selama Desember 2019 tersebut dijadikan alasan untuk meminta dengan lebih kuat lagi kepada Pemerintah Pusat supaya menarik pasukan dari pedalaman. Namun justru pihak keamanan memutuskan untuk menambah 400 personil dari Manado dikirim ke Nduga.⁸² Rupanya “Jakarta” dan “Papua” dua dunia yang betul-betul berbeda bahasa, pemahaman, sikap, dan harapan.

Hal demikian juga jelas dalam diskusi di RRI (Radio Republik Indonesia) di mana seorang petinggi Negara menyatakan, “Mau apa? Apakah Bupati dan Gubernur mampu menjamin keamanan di wilayahnya? Jelaslah, tidak. Maka, bagaimana mau tarik pasukan dari sana?” Gaya bicara demikian mungkin menyakinkan orang yang tidak tahu keadaan *de facto* di Papua. Namun gaya bicara ini mudah dapat menyesatkan, karena faktanya bahwa selama tidak ada pasukan keamanan di kampung, Bupati atau Gubernur sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menjamin keamanannya.

Selama 45 tahun kami hidup dan kerja di Papua, dan kami tahu bahwa secara khusus selama bulan Desember di Papua tidak ada kesulitan apa-

80 <https://en.antaranews.com/news/138891/police-military-hunt-armed-group-on-indonesia-png-border>.

81 <https://en.tempo.co/read/1288991/papua-police-handle-23-armed-group-cases-in-2019-police>.

82 <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCg2Qm-tni-tambah-pasukan-di-nduga-papua>.

apa, baik sebaliknya. Masyarakat mengarahkan perhatian pada perayaan Natal, suatu pesta masyarakat di seluruh Tanah Papua yang dinilai sangat penting. Seorang anggota DPRP memprotes ketika pertengahan Desember 2019 pasukan mulai dikerahkan memasuki wilayah Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, dan tempat lainnya. Pasukan keamanan itu mulai menetap di kampung dan bahkan menduduki fasilitas-fasilitas yang bukan miliknya. Keprihatinan anggota DPRP itu tak ditanggapi, dan terbukti saat itu juga mulai terjadi insiden-insiden yang memakan banyak korban, dan menyebabkan kekacauan serta pengungsian penduduk.

Sebenarnya sempat muncul pernyataan di publik dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait cara pendekatan menyelesaikan persoalan konflik di Papua. Dalam sambutannya ketika menerima penghargaan Hamengku Buwono IX Award 2019 di Yogyakarta pada 19 Desember 2019, Kalla mendorong agar pendekatan sosial dipakai untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan martabat.⁸³ Namun, ini sebatas wacana.

Bagaimana Pemerintahan Joko Widodo memiliki sikap terhadap sejumlah insiden dan konflik yang menyebabkan korban berjatuh dan gelombang pengungsi? Mengapa tak menghentikan operasi militer dan bersenjata untuk menghormati perayaan Natal bagi masyarakat Papua?

Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua ini, sesungguhnya kami menaruh harapan terhadap pengangkatan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Kemampuannya yang bagus sebagai pakar hukum diharapkan lebih terbuka untuk mencari jalan penyelesaian dan pendekatan yang tepat, selain pendekatan keamanan yang sangat dominan. Namun, harapan itu luntur, ketika ia mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan bahwa selama pemerintahan Jokowi tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Rupanya, Mahfud MD menggunakan definisi 'pelanggaran HAM' menurut dirinya sendiri, yang tidak sesuai dengan dan dipakai oleh dokumen resmi nasional maupun internasional.⁸⁴

83 Dia bilang: "Conflicts need to be resolved with dignity"(lihat more references for Papua on Joe Collins email 20/12/2019 – Social Approach needed).

84 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191213111727-20-456653/kontras-pernyataan-mahfud-md-narasi-menyesatkan>.

Pandangan dan sikap Manfud MD kemudian mendapatkan kritik hebat, bahkan Gus Mus pun memberikan catatan keras melalui pernyataan di publik, bahwa “kuasa sudah mulai mencoba pribadi orangnya Menkopolhukam; ‘unsur kiai’-nya sudah hilang”. Banyak orang di Papua sangat kecewa, apalagi ketika reaksi dan sikap yang murni karena kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh Wakil Bupati Nduga dinilai oleh Menkopolhukam sebagai upaya ‘manuver politik’.

Nilai-nilai penghargaan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua sulit diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Negara. Bagi masyarakat Papua, momen perayaan Natal adalah momen yang suci untuk merayakan hidup yang penuh damai dan harapan bagi semua orang. Namun, bulan Desember 2019 itu menjadi momen duka karena kekerasan dan krisis kemanusiaan. Sulit sekali mengungkapkan kegembiraan dalam perayaan Natal pada 2019 ini karena berhadapan dengan sekian banyak fakta yang menyangkal ‘kehendak baik’ dan ‘damai’. Kita kesulitan untuk melupakan para korban; kita kesulitan untuk melupakan para tahanan; kita kesulitan untuk melupakan ribuan pengungsi yang menderita di hutan.

Inilah perayaan Natal yang penuh campur aduk, kesedihan di saat momen kegembiraan. Situasi batin ini terungkap dalam sejumlah “Pesan Natal”, dimana banyak pemimpin coba mengungkapkan harapannya namun tidak luput dari kecenderungan untuk menyebutkan pula kenyataan masih begitu jauh dari harapan damai itu. Sehingga, “Pesan Natal” telah bercampur antara uraian (realitas) politik dengan inspirasi kepercayaan (iman). Contoh yang paling jelas terdapat dalam pesan Natal Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua⁸⁵ yang merefleksikan keagamaan dikawinkan dengan suatu uraian politik. Disimpulkan oleh para gembala bahwa seluruh skenario tindakan keamanan di Papua dewasa ini merupakan suatu perencanaan yang rapi oleh tiga aktor utama, yakni BIN, Mendagri/Mantan-Kapolri dan Kapolda Papua. Tujuannya hanya satu: menghancurkan segala perlawanan di Papua. Para pemimpin Gereja yang menyajikan Pesan Natal ini jelas tidak bergembira; mereka bergumul

85 Diterbitkan di Jayapura pada 24 Desember 2019; ditandatangani oleh pimpinan Gereja GIDI, Gereja GKI, Gereja BAPTIS dan Gereja KINGMI.

dengan kenyataan demikian dan bagaimana menghubungkannya dengan keselamatan yang dirayakan pada pesta Natal. Mereka sadar bahwa Firman Tuhan tidak jatuh dalam ‘suatu ruang yang kosong’. Dalam kenyataan tersebut, dalam ruang yang tidak kosong itu perlu menghadirkan Kristus, Sang Pendamai dan Penyembuh atau Pemulih.

Dalam suasana demikian, perayaan Natal serta penyambutan Tahun Baru cenderung kehilangan kemeriahan dan kehangatan, walau sejumlah seremoni masih berjalan seperti biasa. Kesannya bahwa kita semua merayakan Natal dengan lebih sederhana. Misalnya ‘Pos Natal’ yang lazimnya ramai dibangun oleh para warga di setiap sudut pemukiman kurang terlihat meriah pada tahun 2019 ini. Hiasan dan asesoris-asesoris Natal sangat kurang. Namun doa dan ungkapan tema Natal 2019, “Menjadi Sahabat Bagi Sesama” tetap hidup dalam masyarakat Papua yang merayakan Natal. Maka nilai persahabatan dan perdamaian dianggap tetap lebih kuat dan bermakna, serta terus diperjuangkan bersama.

Jayapura, 31 Desember 2019

BAB 12

PENUTUP

Selama enam bulan, Agustus–Desember 2019, Papua mengalami pelbagai peristiwa terkait pengakuan martabat serta harga diri manusia Papua. Hal itu memberi pelajaran berharga bagi orang-orang di luar Papua maupun orang Papua itu sendiri. Sebuah pelajaran yang sama yakni pengakuan terhadap martabat setiap manusia.

Rasisme dan segala penyelesaiannya serta beberapa peristiwa lainnya yang telah digambarkan dalam bagian-bagian buku ini, menjadi alasan bagi kita, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk berbenah diri. Sikap dan cara pandang kita terhadap mereka yang berbeda dengan kita menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk membangun sebuah keharmonisan dan kedamaian hidup di Tanah Papua.

Dari bagian ke bagian itu, penulis menuliskan sejumlah kesimpulan dan refleksi untuk menutup pembahasan laporan terkait persoalan konflik yang dipicu persoalan rasisme yang dialami oleh orang Papua.

Kesimpulan

1. Terdapat suatu masalah penting di Indonesia, yakni adanya sikap diskriminasi dan rasis. Menjadi jelas juga bahwa selama kurang lebih enam bulan terakhir pada tahun 2019, masalah rasisme dan diskriminasi ini sebenarnya tidak direspon secara memadai. Pembiasaan masalah ini akan mengancam secara serius prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika’.
2. Ternyata konflik horizontal sangat mudah bisa terjadi seperti pengalaman dalam sejumlah insiden kekerasan yang luar biasa di Tanah Papua. Persoalan diskriminasi dan rasisme yang dibiarkan terjadi terhadap orang-orang Papua juga telah menyuburkan benih-benih konflik horizontal di masa mendatang.
3. Pendekatan terhadap permasalahan di Papua selalu menggunakan pendekatan pengamanan atau militerisme. Maka, Papua dibanjiri pasukan polisi dan tentara sampai menjadi wilayah yang de facto menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Walau keadaan sudah dinilai kondusif atau normal kembali, pasukan keamanan tidak dikurangi atau ditarik dari Papua. Keadaan demikian tidak akan menyelesaikan permasalahan di Papua, tetapi justru akan memperkuat lingkaran kekerasan yang tetap dominan dalam kehidupan orang-orang asli Papua.
4. Insiden-insiden rasisme yang menyulut kembali pergolakan di Tanah Papua menjadi momentum bagi instansi-instansi keamanan untuk menyelenggarakan suatu operasi keamanan, yaitu melakukan penambahan jumlah pasukan kepolisian (Brimob) dan tentara untuk mengakhiri segala bentuk gerakan perlawanan politik di Tanah Papua. Secara khusus Kelompok bersenjata (TPN-PB), ULMWP, dan KNPB yang menjadi sasaran utama.
5. Banyak orang asli Papua ditangkap berhubungan dengan pelbagai insiden, namun penangkapannya sering kurang jelas alasannya, apalagi buktinya. Alasan penangkapan yang digunakan oleh pihak TNI dan Polri adalah ‘person’ itu terlibat atau menjadi pendukung

ULMWP atau KNPB. Yang menonjol juga bahwa mereka kemudian diproses hukum dan dijadikan tersangka dengan tuduhan makar.

6. Kenyataan penangkapan seperti disebut di atas (poin 5) memiliki dampak besar hingga proses persidangan di pengadilan. Persidangan menjadi sangat rumit dan ada intervensi kuat dari Negara (TNI-Polri), karena para tersangka ditangkap secara paksa dan penetapan tersangka dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap negara yang menegakan betul-betul peraturan hukum semakin berkurang atau rendah.
7. Segala penentuan kebijakan selama penanganan 'krisis rasisme' ini dijalankan instansi keamanan, sedangkan peranan pemerintah sipil (lokal dan nasional) kurang nyata. Peranan pemerintah sipil 'dipinggirkan' dan hanya menjadi penonton.
8. Selama berbulan-bulan 'krisis rasisme', ada juga permasalahan lain di Papua seperti keadaan ribuan pengungsi lokal (secara khusus di Nduga) tenggelam dan tidak diberikan perhatian. Sepatutnya persoalan pengungsi harus diselesaikan dengan baik dan benar.

Refleksi Akhir

Kisah perjalanan di Tanah Papua selama kurang lebih enam bulan ini, kami menyimpulkan sebagai sebuah kisah *Pengakuan Martabat Setiap Orang di Tanah Papua*. Bagi kami, pengakuan martabat sebenarnya inti segala perkembangan di Tanah Papua selama ini.

Semuanya diawali dengan tindakan rasis di beberapa tempat di Jawa. Sudah tentu tindakan ini bukan sesuatu yang baru, dan sikap yang terungkap pada saat itu mencerminkan suatu kenyataan penilaian diskriminatif terhadap orang asli Papua yang sudah lama tertanam dalam hati dan pikiran di kalangan warga Indonesia. Hal demikian sangat terasa dari tahun 1960-an sampai saat ini. Sehingga juga tidak mengherankan peristiwa di Jawa direspon di Papua dengan ungkapan protes yang massal. Aksi protes ini mengungkapkan betapa mendalam warga Papua merasa dihina dan tidak diakui martabatnya.

Dengan kejadian yang begitu menyakitkan diharapkan bahwa masyarakat luas di Indonesia mulai sadar mengenai dampak dari tindakan rasis, yang secepatnya harus ditangani, sehingga bisa menyelesaikan dengan cepat. Namun hal itu tak dilakukan oleh Negara. Sebaliknya seluruh perhatian diarahkan ke Papua seakan-akan kesalahan pokok dibuat oleh warga asli Papua. Maka, Papua digambarkan dalam segala berita nasional dari satu sudut tertentu saja, yakni: perlawanan di Papua terhadap integrasi ke dalam Republik Indonesia. Dengan menciptakan peralihan ini, pemerintah pusat juga merasa tepat untuk menjawab segala kejadian ini dengan mengirim ribuan pasukan ke Papua. Bukan itu saja. Konflik makin diperbesar menjadi konflik horizontal maupun vertikal yang dampaknya besar sampai saat ini.

Sejumlah hal yang sangat memprihatinkan dapat dilihat selama proses ini adalah:

- Adanya gesekan antar kelompok yang memicu konflik dan kekerasan bernuansa suku dan agama yang merusak harmoni sosial masyarakat.
- Adanya kekuatan yang dominan dalam menangani persoalan konflik rasisme dari pihak aparat keamanan – sesekali dibantu kelompok radikal – yang menyingkirkan kekuatan masyarakat sipil, pemerintah sipil baik di Papua maupun di Jakarta (Pusat).
- Masyarakat sulit memahami persoalan dan peristiwa yang terjadi sebenarnya karena segala lalu lintas komunikasi dan pemberitaan dikuasai oleh pihak keamanan. Sekaligus terdapat pemblokiran internet di Papua dan pengaktifan sekitar 10 website yang menyebarkan pemberitaan mengenai Papua yang tidak lengkap dan sering menyesatkan. Ironisnya, website-website itu dibiayai oleh institusi negara.
- Tidak adanya investigasi yang teliti mengenai setiap kejadian di Papua, sebaliknya muncul upaya kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang Papua. Selanjutnya, tak ada satu proses persidangan pun yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum karena dasar pengaduan ternyata tidak kuat atau aduan itu justru palsu.
- Pemerintah pusat mengabaikan kebijakan terkait pemekaran Papua, yang sesungguhnya telah dimoratorium dan diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua, namun pihak-pihak tertentu telah memaksa rencana

pemekaran yang dilandasi oleh informasi dari BIN atau pihak keamanan, yang melewati segala prosedur yang telah berlaku untuk mengawali proses pemekaran.

Beberapa perkembangan yang sangat memprihatinkan ini menjadi tanda tanya besar. Apa yang sedang terjadi di Negara Indonesia dewasa ini? Negara yang membanggakan diri karena mempunyai Pancasila, ternyata dijalankan berbalik arah dari penghayatan isi Pancasila. Negara yang selalu mengklaim dirinya sebagai negara hukum ternyata sudah lepas dari kendali hukum. Begitu banyak tindakan yang melawan hukum, dibiarkan dan 'dilegitimasi', secara khusus oleh pihak yang mengklaim sebagai 'penegak hukum' di negara ini.

Negara yang menjunjung tinggi nilai 'kebenaran' justru membiarkan dan mendukung pihak-pihak yang membuat berita-berita yang menyesatkan. Negara yang bangga dan kaya karena menjadi tempat tinggal sekian banyak suku dan kebudayaan yang hidup bersama dalam harmoni, tiba-tiba kehilangan pegangannya dan terjebak dalam sikap diskriminasi, rasisme dan dinilai 'tidak manusiawi'. Negara yang akhir-akhir ini dipuji oleh 'dunia internasional' sebagai negara demokrasi ternyata mulai melupakan visi dan misinya, sehingga perebutan kekuasaan menjadi satu-satunya sasaran, dan kepentingan keamanan (militerisme) menjadi satu-satunya tolak ukur untuk bertindak di Tanah Papua.

Syukurlah, belum semua nilai dan harga diri ini hilang. Masih ada sejumlah harapan di tengah segala kekacauan terjadi. Seperti ketika warga asli Papua melindungi banyak warga migran di Lembah Baliem saat kerusuhan 23 September 2019. Dan juga pengambilan sikap wakil Bupati Kabupaten Nduga sewaktu ia melepaskan segala status dan jabatannya karena tidak mau menjadi perpanjangan tangan dari pihak yang membunuh warganya. Suatu pengambilan sikap berdasarkan nilai kemanusiaan dan rasa tanggungjawab yang murni.

Catatan lainnya adalah Polsek Jayapura menyadari bahwa 20 orang yang ditahan menjelang 1 Desember sebenarnya bukan penjahat sehingga sebaiknya dibebaskan merayakan Natal di kampung masing-masing. Hal

positif lain ketika aksi demo yang mengungkapkan protes dan perasaan terhadap tindakan rasisme – demonstrasi pertama – di Jayapura pada 19 Agustus 2019 yang berlangsung secara damai. Atau ketika penolong para korban dalam sejumlah insiden yang selalu muncul serta pembela para tahanan yang bekerja tanpa merasa lelah atau mencari keuntungan.

Cerita sisi humanis itu hanya terselip di antara perilaku negara yang membiarkan kekerasan dan ketidakmanusiaan terus berlangsung di Tanah Papua. Apa yang terjadi di Negara kita? Apa yang terjadi dengan kita sampai ‘hukum’ menjadi kata kosong, ‘demokrasi’ dimanipulasi, ‘kekuasaan’ menjadi sasaran utama, hingga ‘manusia’ menjadi ‘tidak bernilai’ lagi? Sudah tentu: kita semua, termasuk orang Papua, mau hidup dengan tenang dan damai; kita semua mau diperlakukan secara adil dan setara, termasuk semua orang Papua.

Kesimpulan pokok kami bahwa memang akar segala macam perkembangan yang sangat negatif dan memprihatinkan, yang justru cenderung merusak Negara, terletak pada sikap tidak mengakui martabat setiap manusia! Kalau kita mengakui sesama kita sebagai ‘teman hidup yang sama harganya dan sama martabatnya’ segala insiden yang menjadi sarana kerusakan dapat dihindari. Hanya berdasarkan pengakuan martabat setiap manusia kita akan mencari jalan penyelesaian berbagai persoalan tanpa lari pada penggunaan kekuasaan yang disertai kekerasan. Hanya dengan dasar pengakuan martabat setiap orang kita akan mendengar satu sama lain dan akan memahami apa yang menjadi aspirasi dari masing-masing di antara para pihak.

Maka, cukup menghibur ketika muncul pernyataan dari mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bahwa kita perlu suatu pendekatan sosial untuk menyelesaikan masalah di Papua, “Kita perlu selesaikan masalah di Papua dengan martabat (*needs to be solved with dignity*).”

Kita berharap tahun 2020 bisa menjadi suatu tahun ‘penciptaan budaya damai’ dan bukan ‘penciptaan budaya konflik’!

PROFIL PENULIS



THEO VAN DEN BROEK, lahir di Nijmegen, Belanda, pada 1944. Ia pindah ke Papua pada 1975, menjadi missionaris dari Ordo Fransiskan di Keuskupan Jayapura. Setelah 10 tahun mengembangkan karya sosial gereja, ia memimpin kantor Keuskupan Jayapura dan mendampingi Mgr. Herman Munninghof OFM.

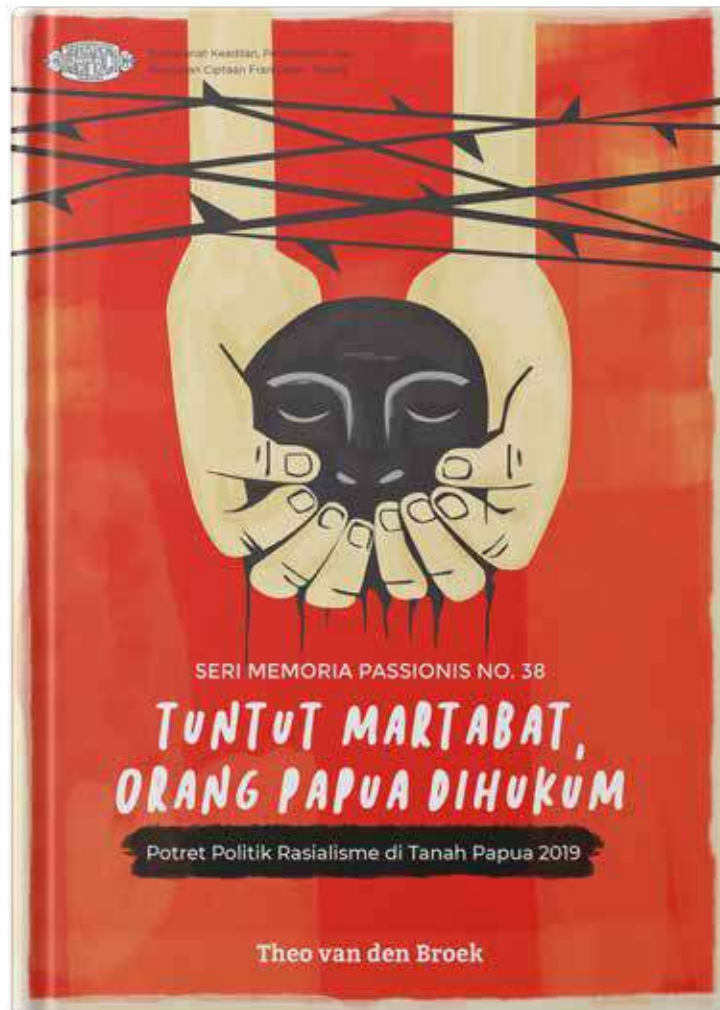
Saat Mgr. Leo L Ladjar diangkat sebagai Uskup pada 1997, Theo dipercaya untuk memprakarsai dan mengembangkan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di Keuskupan Jayapura. Ia bersama tim, mempublikasikan laporan dan dokumentasi situasi (hak asasi manusia) di Papua secara periodik dalam seri Memoria Passionis.

Saat ini, Theo masih turut dalam publikasi laporan Memoria Passionis. Ia juga membantu kerja-kerja di bidang hak asasi manusia yang dikerjakan oleh SKP-SKP di lima Keuskupan di Tanah Papua.

Buku SKPKC



AVAILABLE NOW:



TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM

Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019

Prahara rasisme datang bertubi-tubi mengoyak harmoni kemanusiaan dan martabat orang-orang Papua. Sejatinya martabat ini mendapat ruang yang dihormati dalam bangsa ini, namun ruang itu hilang. Hati orang Papua semakin pupus dan sulit menyatu dalam sebuah bangsa, Indonesia.

Berawal dari tindakan rasisme dan penghinaan kepada mahasiswa Papua pada 15 Agustus 2019 lalu di Surabaya dan Malang. Gelombang ‘kemarahan’ dan protes antirasisme secara damai menyebar ke seluruh daerah Papua. Namun, sebagian aksi damai itu, berubah menjadi kericuhan. Ribuan aparat keamanan dikirim ke Papua, ratusan orang ditangkap, ditahan, dan sejumlah aktivis diadili di pengadilan.

Kisah rasisme itu menjadi kisah kelam dalam satu dekade belakangan ini. Pelbagai kisah ini coba direkam dan dituliskan lebih rinci, diberikan analisis yang mendalam. Kisah kelam rasisme dan dampaknya yang terekam dari Agustus hingga Desember 2019 dinarasikan dengan runtut oleh penulis buku ini, Theo van den Broek – sesepuh SKPKC Fransiskan Papua.

Penulis tidak saja memberikan fokus perhatian pada kasus rasisme, tetapi juga dampak dan pelbagai peristiwa yang muncul. Orang Papua yang menolak tindakan rasisme justru berujung pada duka mendalam: kehilangan nyawa, harta benda, dan beban psikis serta trauma.

Buku Seri Memoria Passionis No.38, “Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum: Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019”, adalah langkah dan gerak SKPKC Fransiskan Papua untuk tetap melanjutkan tradisi dokumentasi dan mempublikasikan memori penderitaan yang tak kunjung terhenti. Dan, tetap merawat harapan, sekecil apapun api lilin menyala, ia tetap memberi terang.

